



LAPORAN KINERJA TAHUN 2018

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI SURABAYA

Ayo dukung



KATA PENGANTAR



Penyusunan Laporan Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Tahun 2018 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Laporan Kinerja disusun secara periodik dan merupakan bentuk akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Dalam Laporan Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Tahun 2018 tertuang perubahan susunan organisasi berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI nomor 12 Tahun 2018 tanggal 08 Juni 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM, perubahan perjanjian kinerja dan indikator yang mengacu revisi Rencana Strategis periode 2015-2019 pada tahun 2018, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja tahun 2018 serta membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini terhadap target tahun 2019 (akhir periode Renstra 2015-2019), evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program/kegiatan terhadap target capaian kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode tahun sebelumnya.

Perubahan indikator kinerja tertuang dalam revisi Rencana Strategis 2015-2019 menyesuaikan dengan susunan organisasi dan tata kerja baru dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang ingin dicapai menuju terwujudnya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya yang akuntabel serta dalam upaya menjamin adanya pengembangan dan peningkatan pelayanan publik.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Tahun 2018 diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya pada masa yang akan datang.

Surabaya, 13 Pebruari 2019

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya



Drs. I Made Bagus Gerametta, Apt

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Balai Besar POM di Surabaya Tahun 2018 merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis periode tahun 2015-2019 meliputi tujuan, sasaran dan indikator yang ingin dicapai dalam tahun 2018.

Berdasarkan Revisi Renstra 2015-2019 tanggal 7 September 2018, untuk mencapai tujuan Balai Besar POM di Surabaya tahun 2015-2019, telah ditetapkan 6 (enam) sasaran strategis yaitu :

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Jawa Timur
2. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya
3. Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Surabaya
4. Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Jawa Timur
5. Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya
6. Terwujudnya RB BBPOM di Surabaya sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019

Pencapaian sasaran strategis tahun 2018 diukur terhadap 15 indikator kinerja utama dari 16 indikator kinerja utama yang akan dicapai pada akhir tahun periode Rencana Strategis 2015-2019. Indikator kinerja utama yang diukur pada tahun 2018 adalah Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Surabaya, yang merupakan salah satu indikator kinerja utama pada sasaran strategis-2 yaitu meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Surabaya.

Pada tahun 2018, dari 6 sasaran strategis yang ditetapkan, terdapat 3 sasaran strategis yang pencapaiannya memuaskan (> 100% - 125%) yaitu sasaran strategis pertama “Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Jawa Timur” rata-rata capaian sebesar 105,44% dan sasaran strategis keempat “Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Jawa Timur” rata-rata capaian sebesar 103,16% serta sasaran strategis kelima “Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya” capaiannya sebesar 120,93%. Terdapat 2 sasaran strategis yang capaian indikator kinerja masuk kriteria tidak dapat disimpulkan (>125%) yaitu sasaran strategis kedua “Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan

kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya” dan sasaran strategis ketiga “Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Surabaya”. Dan terdapat 1 sasaran strategis dengan kriteria capaian indikator kinerja cukup (75% - <100%) yaitu sasaran strategis keenam “Terwujudnya RB BBPOM di Surabaya sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019” sebesar 99,88%.

Persentase capaian target indikator kinerja BBPOM di Surabaya pada tahun 2018 antara 91,71% sampai dengan 127,8%. Capaian indikator kinerja terendah pada “Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya” sebesar 91,71%. Sedangkan 2 capaian indikator kinerja tertinggi pada “Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya” sebesar 125,83% dan “Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Surabaya” sebesar 127,8%. Sedangkan berdasarkan analisis efisiensi kegiatan maka seluruh kegiatan di Balai Besar POM di Surabaya sudah efisien dengan Tingkat efisiensi (TE) berkisar antara Tingkat efisiensi (TE) berkisar antara 0,03 (Pengujian Laboratorium Sampel Obat dan Makanan) hingga 0,50 (kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi). Namun demikian masih perlu upaya perbaikan mulai dari perencanaan yang matang, monitoring dan evaluasi secara konsisten serta pengendalian internal untuk penyempurnaan capaian yang lebih efisien dan efektif.

Pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Jawa Timur untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Balai Besar POM di Surabaya didukung anggaran APBN Tahun Anggaran 2018 sebesar sebesar Rp. 62.144.247.000,- (enam puluh dua milyar seratus empat puluh empat juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah). Kemudian terdapat perubahan pagu anggaran setelah adanya revisi DIPA untuk tunjangan kinerja menjadi Rp. 61.356.765.000,- (enam puluh satu milyar tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah). Realisasi anggaran yang dibelanjakan sebesar Rp. 57.229.782.957,- (lima puluh tujuh milyar dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah), dengan persentase serapan anggaran sebesar 93,27%.

Balai Besar POM di Surabaya berupaya melakukan perbaikan secara terus menerus dalam rangka meningkatkan kinerja di masa yang akan datang sehingga dapat tercipta manajemen kinerja pemerintahan yang berorientasi hasil, melalui :

- I. Penguatan pemberantasan obat dan makanan yang mengandung bahan berbahaya/dilarang, dan ilegal termasuk palsu, melalui program-program peningkatan keterlibatan aktif masyarakat diantaranya Gerakan Nasional Peduli Obat dan Pangan Aman (GNPOPA), Aksi Nasional Pangan

Jajanan Anak Sekolah (AN PJAS), Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD), dan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi)

2. Peningkatan kerjasama dengan lintas sektor melalui penandatanganan MoU/Perjanjian Kerjasama dengan pemerintah daerah dan instansi terkait serta melakukan evaluasi terhadap hubungan kerjasama yang terjalin supaya lebih efektif dalam upaya peningkatan pengawasan obat dan makanan di Provinsi Jawa Timur
3. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan menerapkan Zona Integritas sehingga terwujud Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Balai Besar POM di Surabaya
4. Pengembangan layanan publik bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Banyuwangi menggunakan fasilitas di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi meliputi layanan informasi dan pengaduan masyarakat.

Surabaya, 13 Pebruari 2019

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya



Drs. I Made Bagus Gerametta, Apt

HIGHLIGHT

Selama tahun 2018, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya telah menerima beberapa penghargaan dan catatan keberhasilan antara lain :

1. Nilai SAKIP tahun 2018 tertinggi diantara seluruh satker di lingkungan Badan POM.
2. Penghargaan kepada Penyidik PPNS Balai Besar POM di Surabaya atas prestasi berhasil menyelesaikan perkara tindak pidana sesuai kewenangannya sebanyak 18 berkas dan merupakan penyidikan kasus jumlah terbanyak tahun 2018 dari Kepolisian Daerah Jawa Timur.



3. Desa Wates Kota Mojoketro yang telah diintervensi oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya sejak tahun 2015 memperoleh penghargaan sebagai Juara II Nasional Lomba Desa Pangan Aman dari Badan POM



4. Pasar Minulyo, Kabupaten Pacitan yang telah diintervensi oleh Balai Besar POM di Surabaya memperoleh penghargaan Juara II Nasional Lomba Pasar Aman dari Bahan Berbahaya

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
HIGHLIGHT	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. <i>GAMBARAN UMUM ORGANISASI</i>	<i>1</i>
1.2. <i>STRUKTUR ORGANISASI</i>	<i>3</i>
1.3. <i>ASPEK STRATEGIS ORGANISASI</i>	<i>6</i>
1.4. <i>ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS</i>	<i>7</i>
1.5. <i>ISU STRATEGIS</i>	<i>10</i>
BAB II PERENCANAAN KINERKA	14
2.1. <i>RENCANA STRATEGIS</i>	<i>14</i>
2.2. <i>PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018</i>	<i>24</i>
2.3. <i>KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR</i>	<i>26</i>
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
3.1. <i>CAPAIAN KINERJA ORGANISASI</i>	<i>28</i>
3.2. <i>REALISASI ANGGARAN</i>	<i>89</i>
3.3. <i>ANALISIS EFISIENSI KEGIATAN</i>	<i>91</i>
BAB IV. PENUTUP	96
4.1. <i>KESIMPULAN</i>	<i>96</i>
4.2. <i>SARAN</i>	<i>97</i>
LAMPIRAN	98

DAFTAR GAMBAR

Daftar Gambar

- Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Balai Besar POM di Surabaya
- Gambar 2. Jumlah SDM berdasarkan tingkat pendidikan
- Gambar 3. Wilayah Kerja Balai Besar POM di Surabaya dan Loka POM
- Gambar 4. Sarana Produksi dan sarana distribusi yang diawasi di Provinsi Jawa Timur
- Gambar 5. Peta Strategi Level II Balai Besar POM di Surabaya
- Gambar 6. Peta Strategi Level II Loka POM
- Gambar 7. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis
- Gambar 8. Kriteria Pencapaian Indikator
- Gambar 9. Realisasi IPOM BBPOM di Surabaya Tahun 2016 sampai 2018
- Gambar 10. Perbandingan realisasi IPOM tahun 2018 dengan Balai lain
- Gambar 11. Perbandingan realisasi persentase obat yang MS tahun 2018 dengan Balai lain
- Gambar 12. Perbandingan realisasi persentase obat tradisional yang MS tahun 2018 dengan Balai lain
- Gambar 13. Perbandingan realisasi dan capaian presentase kosmetik yang MS tahun 2018 dengan tahun sebelumnya
- Gambar 14. Perbandingan realisasi persentase kosmetik yang MS tahun 2018 dengan Balai lain
- Gambar 15. Perbandingan realisasi persentase obat tradisional yang MS tahun 2018 dengan Balai lain
- Gambar 16. Perbandingan realisasi persentase makanan yang MS tahun 2018 dengan Balai lain
- Gambar 17. Perbandingan Indeks kepatuhan (Compliance Index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya tahun 2018 dengan Balai lain
- Gambar 18. Perbandingan Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Surabaya tahun 2018 dengan Balai lain
- Gambar 19. Perbandingan persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Jawa Timur
- Gambar 20. Perbandingan Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya tahun 2018 dengan Balai lain
- Gambar 21. Perbandingan Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya tahun 2018 dengan Balai lain
- Gambar 22. Perbandingan Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Jawa Timur tahun 2018 dengan Balai lain
- Gambar 23. Realisasi Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya tahun 2017 dan 2018
- Gambar 24. Perbandingan Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya tahun 2018 dengan Balai lain

- Gambar 25. Realisasi Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Surabaya tahun 2017 dan 2018
- Gambar 26. Perbandingan Presentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Surabaya tahun 2018 dengan Balai lain
- Gambar 27. Realisasi nilai AKIP BBPOM di Surabaya tahun 2015-2018
- Gambar 28. Perbandingan nilai AKIP BBPOM di Surabaya tahun 2018 dengan Balai lain
- Gambar 29. Perbandingan Realisasi Anggaran
- Gambar 30. Nilai kinerja berdasarkan aplikasi monev

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel

- Tabel 1. Rincian Distribusi Pegawai berdasarkan Penempatan dan Tingkat Pendidikan
- Tabel 2. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja 2015-2017 (OTK Lama)
- Tabel 3. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai Besar POM di Surabaya 2018-2019 (OTK Baru)
- Tabel 4. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Surabaya Tahun 2018
- Tabel 5. Pencapaian Sasaran Strategis
- Tabel 6. Perbandingan Pencapaian Sasaran Strategis
- Tabel 7. Hasil Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
- Tabel 8. Perbandingan Target dan Realisasi IPOM di wilayah kerja BBPOM di Surabaya tahun 2018
- Tabel 9. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dengan target 2019
- Tabel 10. Capaian kegiatan yang menunjang IPOM tahun 2018
- Tabel 11. Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat tahun 2018
- Tabel 12. Realisasi Kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat tahun 2018 dengan target 2019
- Tabel 13. Realisasi Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat tahun 2018
- Tabel 14. Realisasi Kinerja Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat tahun 2018 dengan target 2019
- Tabel 15. Realisasi Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat tahun 2018
- Tabel 16. Realisasi Kinerja Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat tahun 2018 dengan target 2019
- Tabel 17. Realisasi Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat tahun 2018
- Tabel 18. Realisasi Kinerja Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat tahun 2018 dengan target 2019
- Tabel 19. Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat tahun 2018
- Tabel 20. Realisasi Kinerja Persentase makanan yang Memenuhi Syarat tahun 2018 dengan target 2019
- Tabel 21. Realisasi Indeks Kepatuhan (Compliance Index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya tahun 2018
- Tabel 22. Realisasi Kinerja Indeks Kepatuhan (Compliance Index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya tahun 2018 dengan target 2019
- Tabel 23. Realisasi Indeks Kepatuhan (Compliance Index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya tahun 2018
- Tabel 24. Realisasi Kinerja Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Surabaya tahun 2018 dengan target 2019
- Tabel 25. Perbandingan Jumlah dan Jenis Layanan Publik
- Tabel 26. Realisasi Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di provinsi Jawa Timur tahun 2018
- Tabel 27. Realisasi Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2018

- Tabel 28. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Jawa Timur tahun 2018 dengan target 2019
- Tabel 29. Pengujian sampel obat dan makanan tahun 2018
- Tabel 30. Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya tahun 2018
- Tabel 31. Perbandingan Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya tahun 2018 dengan target 2019
- Tabel 32. Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan
- Tabel 33. Realisasi Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya tahun 2018
- Tabel 34. Perbandingan Realisasi Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya tahun 2018 dengan target 2019
- Tabel 35. Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan
- Tabel 36. Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu Di Provinsi Jawa Timur tahun 2018
- Tabel 37. Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu Di Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2018
- Tabel 38. Perbandingan Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu di Provinsi Jawa Timur tahun 2018 dengan target 2019
- Tabel 39. Layanan Sertifikasi tahun 2018
- Tabel 40. Realisasi Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya tahun 2018
- Tabel 41. Perbandingan Realisasi Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya dengan target 2019
- Tabel 42. Realisasi perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Surabaya tahun 2018
- Tabel 43. Perbandingan Realisasi persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Surabaya tahun 2018 dengan target 2019
- Tabel 44. Jumlah Perkara Tahap II
- Tabel 45. Hasil Penyidikan obat dan Makanan tahun 2018
- Tabel 46. Realisasi Nilai AKIP BBPOM di Surabaya tahun 2018
- Tabel 47. Kategori Penilaian SAKIP
- Tabel 48. Perbandingan Realisasi nilai AKIP BBPOM di Surabaya tahun 2018 dengan target 2019
- Tabel 49. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
- Tabel 50. Realisasi anggaran per sasaran strategis
- Tabel 51. Tingkat Efisiensi Kegiatan
- Tabel 52. Tingkat Efisiensi Kegiatan per Sasaran Strategis

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 05018/KBPOM/2001 Tahun 2001 dan beberapa kali mengalami perubahan sampai terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI nomor 12 Tahun 2018 tanggal 08 Juni 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM, Balai Besar POM di Surabaya merupakan UPT BPOM yaitu satuan kerja bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Kedudukan Balai Besar POM di Surabaya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, dipimpin oleh seorang Kepala yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI nomor 12 Tahun 2018 merupakan langkah strategis penguatan kelembagaan BPOM yang diperlukan dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Terdapat 3 UPT BPOM di wilayah Provinsi Jawa Timur (terdiri dari 38 Kabupaten/Kota) dengan masing-masing wilayah kerja sebagai berikut :

- a. Balai Besar POM di Surabaya, cakupan pengawasan meliputi 27 kabupaten/kota (Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Madiun, Kota Batu, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep).
- b. Loka POM di Kabupaten Kediri, cakupan pengawasan meliputi 6 kabupaten/kota (Kabupaten Kediri, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Blitar, Kota Kediri, Kota Blitar)
- c. Loka POM di Kabupaten Jember, cakupan pengawasan meliputi 5 kabupaten (Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Lumajang)

Balai Besar POM di Surabaya menyelenggarakan tugas dan fungsi :

Tugas

Melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

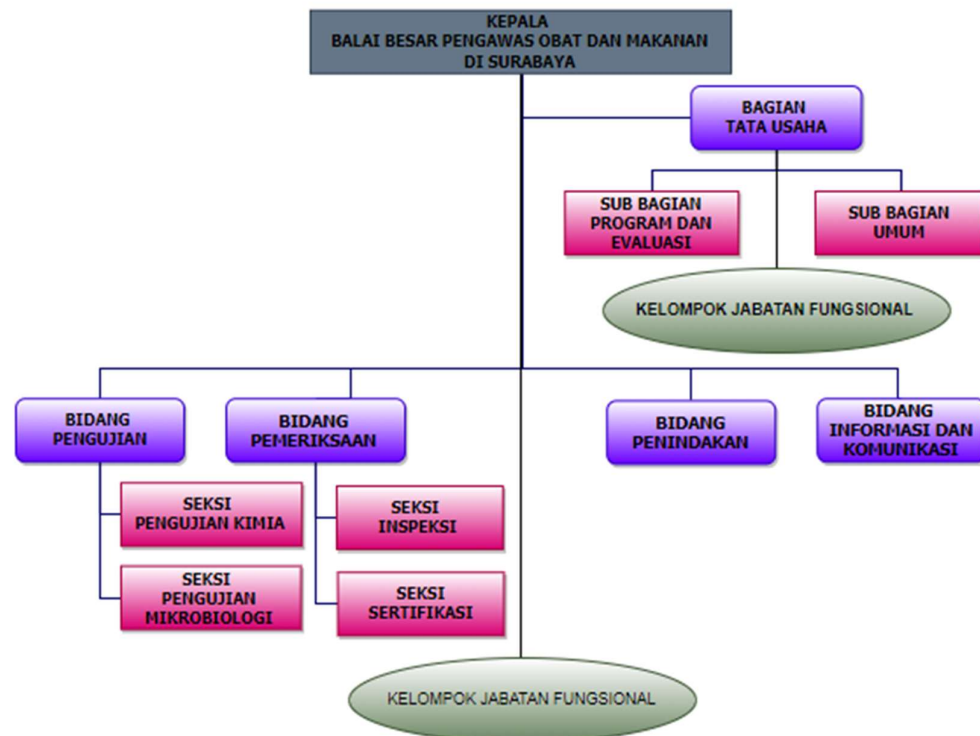
- a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
- e. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan;
- f. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan;
- g. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- h. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- i. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- k. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Loka POM di Kabupaten Kediri dan Loka POM di Kabupaten Jember menyelenggarakan tugas dan fungsi:

- a. melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian
- b. sertifikasi produk
- c. pengambilan contoh (sampling)
- d. pengujian Obat dan Makanan,
- e. intelijen, penyidikan,
- f. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan
- g. koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta
- h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Jawa Timur, maka pelaksanaan tugas dan fungsi antar UPT BPOM dikoordinasikan oleh Balai Besar POM di Surabaya guna memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

1.2. Struktur Organisasi



Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Balai Besar POM di Surabaya

Tugas pokok dan fungsi Balai Besar POM di Surabaya dijabarkan sebagai berikut :

- I. Bidang Pengujian mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengujian menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan;
 - b. pelaksanaan pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan; dan
 - c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan.

Bidang Pengujian terdiri atas:

- a. Seksi Pengujian Kimia;
- b. Seksi Pengujian Mikrobiologi; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Seksi Pengujian Kimia mempunyai tugas melakukan pengujian kimia Obat dan Makanan. Seksi Pengujian Mikrobiologi mempunyai tugas melakukan pengujian mikrobiologi Obat dan Makanan.

2. Bidang Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pemeriksaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan;
 - b. pelaksanaan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
 - c. pelaksanaan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan;
 - d. pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan; dan
 - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan.

Bidang Pemeriksaan terdiri atas:

- a. Seksi Inspeksi;
- b. Seksi Sertifikasi; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Seksi Inspeksi mempunyai tugas melakukan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan.

Seksi Sertifikasi mempunyai tugas melakukan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan.

3. Bidang Penindakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penindakan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - b. pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
 - c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
4. Bidang Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - b. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - c. penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
5. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtangaan. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
 - b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - c. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
 - d. pengelolaan penjaminan mutu dan tata laksana;
 - e. pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - f. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
 - g. pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtangaan; dan
 - h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Evaluasi;

- b. Subbagian Umum; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, pengelolaan keuangan, penjaminan mutu, tata laksana, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan persuratan, kearsipan, kepegawaian, teknologi informasi komunikasi, perlengkapan, dan kerumahtanggaan.

1.3. Aspek Strategis Organisasi

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Dalam melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan, BPOM melaksanakan sistem pengawasan *full spectrum* mulai dari *pre-market* hingga *post-market control* yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*). Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BPOM tidak bertindak sebagai *single player*. Kerjasama dengan berbagai lintas sektor terutama pemerintah daerah diperlukan untuk memperluas cakupan pengawasan obat dan makanan. Menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), BPOM mengubah paradigma pengawasan dari *watchdog control* menjadi *proaktif control*, dengan mendorong penerapan *Risk Management Programme*.

Balai Besar POM di Surabaya sebagai UPT BPOM melaksanakan kegiatan utama berdasarkan bisnis proses yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis periode 2015-2019 yaitu melaksanakan program pengawasan Obat dan Makanan (*post-market*) di seluruh wilayah administratif Provinsi Jawa Timur meliputi pengawasan sarana produksi, sarana distribusi sesuai standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sampling dan pengujian laboratorium terhadap produk Obat dan Makanan serta penyidikan dan penegakan hukum.

Balai Besar POM di Surabaya sebagai UPT BPOM, mempunyai 4 (empat) inti kegiatan atau pilar lembaga, yakni :

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) terlibat dalam registrasi/penilaian, inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi;
2. Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup: sampling dan pengujian, inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di Provinsi Jawa Timur;
3. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan

dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;

4. Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

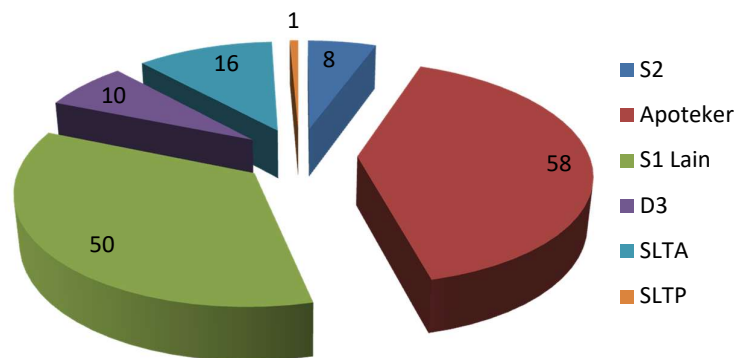
Pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Surabaya dalam upaya penguatan pelaksanaan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan perlu didukung dengan peningkatan kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi dengan pemangku kepentingan sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan kesehatan masyarakat dengan memberikan perlindungan terhadap produk-produk Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan serta mendorong pelaku usaha dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan mampu menerapkan kaidah-kaidah cara produksi yang baik dan cara distribusi yang baik sehingga produk Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat memenuhi aspek keamanan, mutu maupun kemanfaatannya.

1.4. Analisis Lingkungan Strategis

Internal

Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Balai Besar POM di Surabaya sebanyak 143 orang terdiri dari 134 orang penempatan Balai Besar POM di Surabaya, sebanyak 4 orang Loka POM di Kabupaten Jember dan 5 orang penempatan Loka POM di Kabupaten Kediri sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan pada lingkup tugasnya. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada gambar 2.



Gambar 2. Jumlah SDM berdasarkan tingkat pendidikan

Rincian distribusi pegawai berdasarkan lokasi penempatan dan tingkat pendidikan, sebagai berikut :

Tabel 1. Rincian Distribusi Pegawai berdasarkan Penempatan dan Tingkat Pendidikan

Lokasi Penempatan	S2	Apoteker	S1 Lain	D3	SLTA	SLTP
Balai Besar POM di Surabaya	7	52	49	10	15	1
Loka POM di Kabupaten Jember	-	3	1	0	0	0
Loka POM di Kabupaten Kediri	1	3	0	0	1	0

Sumber Daya Lainnya

- Kantor Balai Besar POM di Surabaya memiliki 2 (dua) bangunan gedung dengan total luas tanah 5.164,673 m² dan luas bangunan 4.496,09 m², didukung laboratorium dan peralatan yang memadai sesuai standar Laboratorium Badan POM dan metode analisis terkini. Balai Besar POM di Surabaya memiliki laboratorium pengujian kimia, laboratorium pengujian mikrobiologi dan laboratorium kalibrasi yang terakreditasi ISO/IEC 17025:2017. Selain itu Balai Besar POM di Surabaya dalam mewujudkan visi, misi dan tujuannya telah membangun sistem manajemen mutu berdasarkan standar ISO 9001 : 2015 dan telah tersertifikat untuk seluruh bisnis prosesnya.
- Kantor Loka POM di Kabupaten Jember status bangunan pinjam pakai pemerintah daerah.
- Kantor Loka POM di Kabupaten Kediri status bangunan pinjam pakai pemerintah daerah.

Keunggulan Balai Besar POM di Surabaya

- Laboratorium Unggulan Pengujian Rokok
- Laboratorium Rujukan Pengujian Endotoksin dan Sterilitas
- Satu-satunya UPT Badan POM yang mempunyai Laboratorium Kalibrasi yang telah terakreditasi ISO/IEC 17025:2017 sejak tahun 2005
- Mempunyai tenaga ahli sebagai evaluator yang aktif membantu proses pendaftaran pangan melalui *e-registration*.
- Pengembangan layanan publik bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Banyuwangi menggunakan fasilitas di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi meliputi layanan informasi dan pengaduan masyarakat.

Anggaran

Anggaran Balai Besar POM di Surabaya termasuk Loka POM di Kabupaten Jember dan Loka POM di Kabupaten Kediri, bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2018 No. SP DIPA-063.01.2.432784/ 2017 yang diterbitkan pada tanggal 5 Desember 2017 sebesar Rp. 61.356.765.000 (Enam Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).

Eksternal

Kondisi Geografis dan Demografis

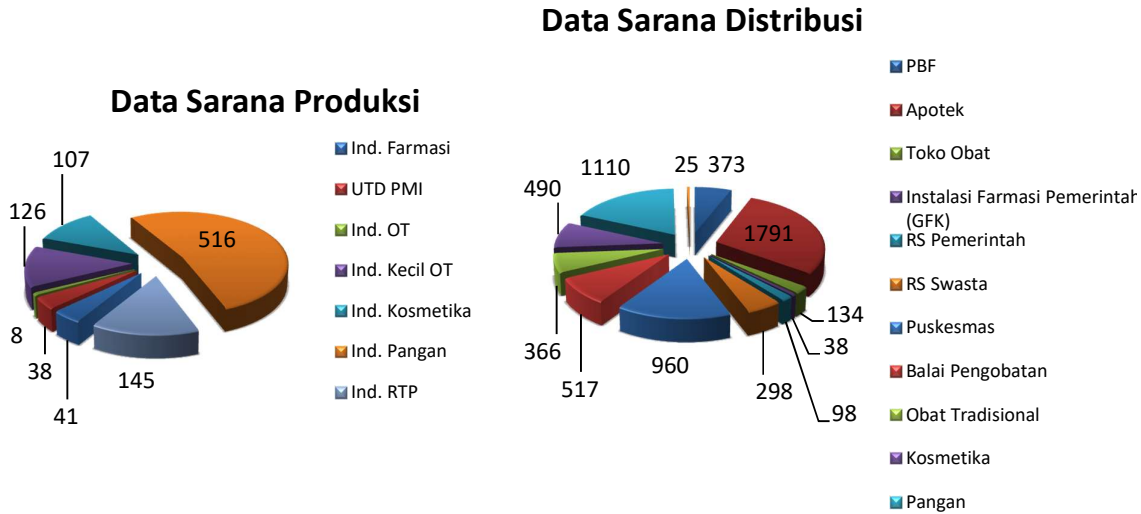
Provinsi Jawa Timur terletak pada 111° hingga 114°4' Bujur Timur dan 7°12' hingga 8°48' Lintang Selatan. Wilayah Provinsi Jawa Timur seluas 47.963 km². Cakupan wilayah kerja Provinsi Jawa Timur terdiri dari 38 Kabupaten/Kota terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota dengan jumlah penduduk 38.610.202 jiwa.



Gambar 3. Wilayah Kerja Balai Besar POM di Surabaya dan Loka POM

Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang diawasi

Sarana produksi produk Obat dan Makanan yang diawasi di wilayah Provinsi Jawa Timur meliputi industri farmasi, unit tranfusi darah, industri obat tradisional, industri kecil obat tradisional, industri kosmetik, industri pangan serta industri rumah tangga pangan. Sedangkan sarana distribusi meliputi Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Toko Obat, Gudang Farmasi Kab/Kota, RS pemerintah dan swasta, Puskesmas, Balai Pengobatan, sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, pangan serta bahan berbahaya. Jumlah sarana produksi dan distribusi yang diawasi di wilayah Provinsi Jawa Timur sebagaimana pada gambar 4. tersebut di bawah ini.



Gambar 4. Sarana Produksi dan sarana distribusi yang diawasi di Provinsi Jawa Timur

1.5. Isu Strategis

Beberapa isu strategis yang dapat berpengaruh pada kinerja Balai Besar POM di Surabaya antara lain :

1. Peredaran produk ikan makarel dalam kaleng mengandung cacing di Jawa Timur

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Keamanan Pangan yang dimaksud keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Dalam upaya mengendalikan risiko bahaya pada pangan, selain pengaturan bahan tambahan pangan dan standar kemasan pangan oleh pemerintah tapi produsen juga wajib menerapkan sanitasi dan higiene pada seluruh kegiatan rantai pangan sehingga aman dikonsumsi.

Beberapa temuan produk ikan makarel produksi lokal Jawa Timur dan produk impor dari Korea Selatan mengandung cacing parasit. Adanya cacing menunjukkan indikasi jika produk tersebut tidak memenuhi syarat higiene meski sudah mengalami proses pemasakan dan sterilisasi.

2. Generasi Stunting Mengancam Masa Depan Bangsa

Stunting merupakan manifestasi dari malnutrisi atau gizi buruk sebagai akibat dari kebutuhan pangan yang tidak tercukupi pada anak-anak. *Stunting* ditandai dengan gangguan pertumbuhan anak sehingga memiliki tinggi badan lebih rendah dari standar usianya. Kondisi ini dapat berdampak pada

pertumbuhan fisik yang tidak optimal dan juga berisiko menimbulkan gangguan kesehatan dan perkembangan kecerdasan anak-anak yang akan menjadi generasi penerus bangsa.

Karena itu, saat ini keamanan pangan dan akses pangan yang bernutrisi dan berkualitas menjadi prioritas dari *World Health Organization* (WHO) dan menjadi fokus tema dari Hari Pangan Sedunia Tahun 2018, yaitu *Our Actions are Our Future, a Zero Hunger World by 2030 is possible*.

BPOM mempunyai peran strategis dalam upaya percepatan penurunan *stunting* melalui program keamanan pangan melalui pengawasan fortifikasi pangan, intervensi keamanan pangan di desa (desa pangan aman), Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman/Gemas SAPA, dan Pangan Jajanan Anak Sekolah /PJAS dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Balai Besar POM di Surabaya melakukan pengawasan *post-market* dengan cara pengambilan sampel dan pengujian laboratorium produk obat dan makanan yang beredar, inspeksi cara produksi dan distribusi dalam rangka pengawasan implementasi Cara Produksi dan Cara Distribusi yang baik, pengawasan iklan dan penandaan, serta investigasi awal dan penyidikan berbagai kasus tindak pidana bidang obat dan makanan yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat.

3. Tren Penjualan Produk Obat dan Makanan Secara Online

Era perkembangan teknologi yang semakin pesat dewasa ini membuat persaingan bisnis dalam bidang apapun menjadi lebih variatif. Banyak metode bisnis yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk menarik pelanggan sebanyak-banyaknya antara lain pemanfaatan media elektronik (internet). Hal ini juga menjadi peluang untuk penjualan produk-produk obat, suplemen makanan, obat tradisional, kosmetika dan makanan ilegal (tidak memiliki ijin edar, kadaluwarsa). Untuk itu, penertiban peredaran produk ilegal yang dipasarkan secara *online* menjadi salah satu fokus pengawasan BPOM. Balai Besar POM di Surabaya sejak tahun 2014 melakukan sampling produk Obat dan Makanan yang dijual secara *on-line*, sebagai upaya perlindungan masyarakat dari peredaran Obat dan Makanan yang tidak aman.

4. Pengawasan Obat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Mengantisipasi dampak yang dapat merugikan masyarakat dari penerapan JKN, Balai Besar POM di Surabaya meningkatkan peran dalam memberikan jaminan obat yang aman, bermutu dan bermanfaat serta mengantisipasi adanya penggunaan obat palsu dan pendistribusian obat dari jalur ilegal melalui pengawasan/inspeksi sarana produksi terhadap pemenuhan cara produksi obat yang baik, pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi, melakukan sampling dan pengujian laboratorium obat-obat publik di sarana instalasi farmasi/gudang farmasi Kabupaten/Kota, puskesmas, rumah sakit dan sarana pelayanan kesehatan lainnya.

5. Keamanan pangan di masyarakat desa, baik sebagai konsumen maupun sebagai pelaku usaha pangan desa

Pembangunan ekonomi desa/kelurahan merupakan subsistem dari pembangunan ekonomi kabupaten/kota dan merupakan subsistem dari pembangunan ekonomi provinsi yang berlanjut sebagai penopang perkembangan ekonomi secara nasional. Kurang lebih 80 % penduduk berada di perdesaan, maka pembangunan ekonomi harus melibatkan langsung atau tidak langsung penduduk perdesaan. Oleh sebab itu pengembangan ekonomi perdesaan menjadi hal yang wajib untuk dilakukan. Dengan berkembangnya ekonomi desa akan menurunkan angka kemiskinan. Untuk itu Badan POM menginisiasi program Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD), sebagai salah satu prasyarat peningkatan kesehatan keluarga secara mandiri. Program ini sarat dengan keterpaduan dan koordinasi karena melibatkan semua pihak terkait baik jajaran pemerintahan daerah maupun tatanan masyarakat termasuk pelaku usaha sebagai pilar ekonomi di perdesaan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan memberdayakan masyarakat desa melalui kader-kader yang selama ini telah terbentuk, seperti PKK dan karang taruna. Hingga tahun 2018 Balai Besar POM di Surabaya baru dapat mengintervensi 34 desa dari 8.499 desa yang ada di Provinsi Jawa Timur. Kecilnya jumlah desa yang diintervensi ini disebabkan karena keterbatasan sumber daya, sehingga diperlukan kerjasama dengan lintas sektor terkait agar dapat ikut serta menggalakkan sosialisasi tentang keamanan pangan di seluruh desa.

Masyarakat sebagai sub sistem pengawasan Obat dan Makanan mempunyai peran penting dalam memilih dan menggunakan produk sehingga kesehatannya tetap terjaga serta partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan informasi produk-produk yang kemungkinan dapat merugikan kesehatan menjadi prioritas untuk segera ditindaklanjuti oleh petugas Balai Besar POM di Surabaya sehingga masyarakat terhindar dari produk yang tidak memenuhi syarat.

6. Reformasi Birokrasi

Tujuan reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Balai Besar POM di Surabaya merupakan satu-satunya Unit Pelaksana Teknis Badan POM dari seluruh Indonesia yang telah memperoleh predikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi) pada tahun 2017. Tahun 2018 Balai Besar POM di Surabaya mempersiapkan mengajukan predikat WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani), sehingga diperlukan upaya sosialisasi program pengawasan Obat dan Makanan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat antara lain kemudahan akses informasi. Pada tahun 2018 Balai Besar POM di

Surabaya mengembangkan unit layanan publik dengan bekerjasama memanfaatkan sarana pemerintah Kabupaten Banyuwangi di Mall Pelayanan Publik, diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat dan pelaku usaha terutama UMKM untuk mendapatkan informasi langsung sehingga produk yang dihasilkan memenuhi cara produksi yang baik dan memenuhi aspek keamanan, mutu dan kemanfaatannya.

7. Implementasi Inpres 3 tahun 2017

Dengan diterbitkannya Instruksi Presiden No. 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, diharapkan dapat memperkuat kinerja BPOM dalam pengawasan Obat dan Makanan melalui peningkatan sinergisme kemitraan dengan Kementerian maupun lintas sektor terkait di daerah. Perlu adanya landasan hukum yang kuat dalam koordinasi pelaksanaan di daerah, untuk itu peraturan Gubernur yang mengatur mekanisme koordinasi, pembinaan, pengawasan dan tindaklanjut perlu disiapkan. Tindaklanjut oleh instansi terkait atas rekomendasi yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM di Surabaya sangat berpengaruh terhadap peredaran Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Perencanaan kinerja Balai Besar POM di Surabaya terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis Balai Besar POM di Surabaya tahun 2015-2019 yang ditetapkan dalam SK Kepala Balai Besar POM di Surabaya Nomor HK.04.970.05.2015.2701 tanggal 6 Mei tahun 2015. Renstra tersebut memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, strategi, arah kebijakan serta program dan kegiatan BBPOM di Surabaya.

Revisi Renstra Balai Besar POM di Surabaya 2015-2019 dilakukan pada tanggal 07 September 2018 mengacu OTK baru merupakan amanat tindak lanjut dari Permen PPN/Kepala Bappenas nomor 5 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis K/L 2015-2019, dimana pasal 14 menyebutkan bahwa perubahan terhadap Renstra K/L 2015-2019 berjalan, dapat dilakukan sepanjang :

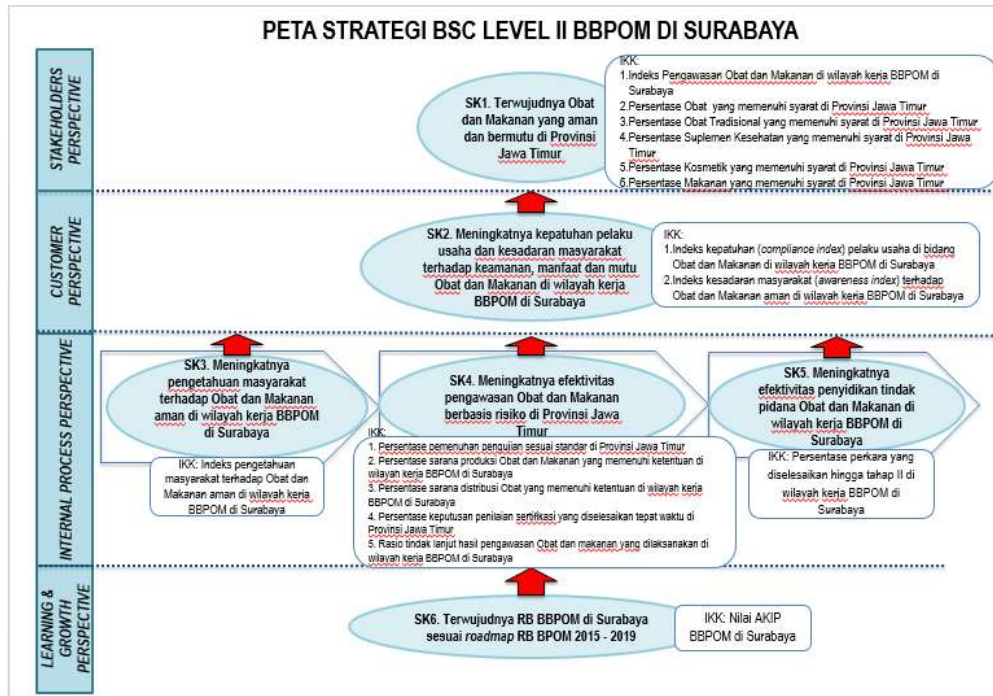
- (1) terdapat undang-undang yang mengamanatkan perubahan Renstra K/L; atau
- (2) adanya perubahan struktur organisasi dan/atau tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga.

Pada Revisi Renstra Balai Besar POM di Surabaya juga terjadi perubahan pendekatan manajemen kinerja, yang semula berdasarkan *Logical Framework* berubah menggunakan pendekatan *Balanced Scorecard*. *Balanced Scorecard* atau BSC merupakan *performance management tools* yang mampu menterjemahkan strategi organisasi ke dalam kerangka operasional sampai level individu, sehingga setiap personil dalam organisasi mengetahui apa yang harus dilakukan serta dapat berkontribusi pada kesuksesan pencapaian visi dan misi organisasi. Konsep BSC ini juga digunakan untuk mengkaitkan antara informasi Rencana Strategis ke dalam Rencana Aksi (*Action Plan*) yang bersifat tahunan. Yaitu, mengkaitkan antara Rencana Strategis yang lebih pada perencanaan berbasis organisasi (*organization-wide planning*) dengan perencanaan program. BSC ini merupakan alat yang dapat membantu merumuskan Rencana Aksi beserta Rencana Kinerjanya.

Tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2015-2019 adalah sebagai berikut:

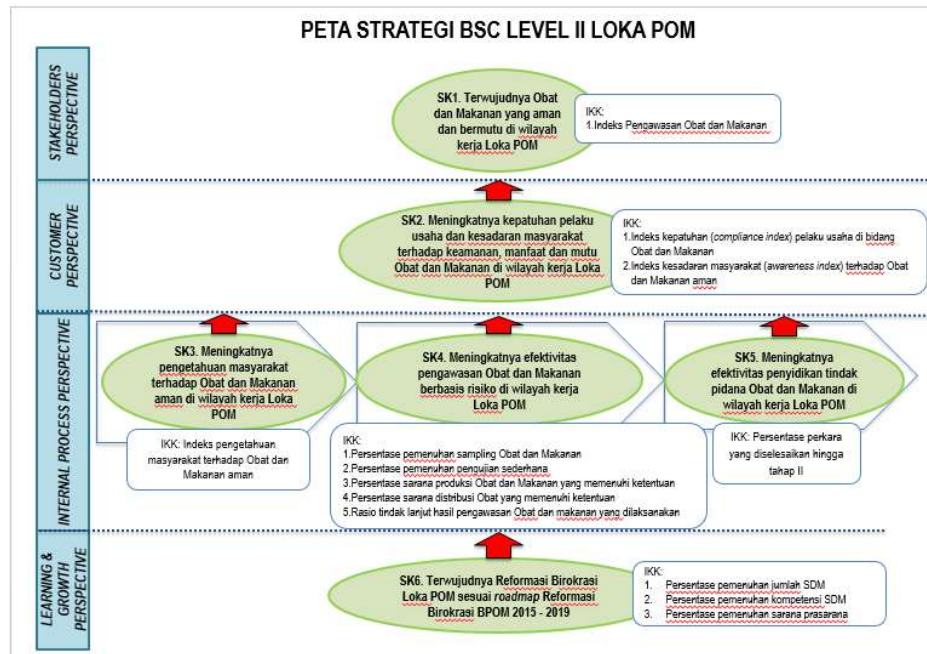
- (1) Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat.
- (2) Meningkatnya daya saing produk Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu serta mendukung inovasi.

Berdasarkan pertimbangan dari 4 (empat) perspektive dalam pendekatan *Balance Scorecard* (BSC) meliputi *Learning & Growth*, *Internal Process*, *Customer* dan *Stakeholders* maka sasaran strategis dalam periode waktu 2015-2019 dapat dilihat pada peta strategi level II Balai Besar POM di Surabaya, sebagai berikut :



Gambar 5. Peta Strategi Level II Balai Besar POM di Surabaya

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.01.1.22.06.18.3240 Tahun 2018 tentang Penunjukan Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan Sebagai Koordinator Loka Pengawas Obat dan Makanan, bahwa Balai Besar POM di Surabaya merupakan koordinator atas Loka POM di Kabupaten Kediri dan Loka POM di Kabupaten Jember. Peta Strategi Loka POM sebagai berikut :



Gambar 6. Peta Strategi Level II Loka POM

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Balai Besar POM di Surabaya dengan perubahan struktur organisasi sesuai Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Surabaya Tahun 2018 menetapkan 6 (enam) sasaran strategis dengan 15 (lima belas) indikator yang dilengkapi dengan target kinerja. Perubahan sasaran strategis, indikator dan target kinerja Balai Besar POM di Surabaya tergambar dalam tabel di bawah ini.

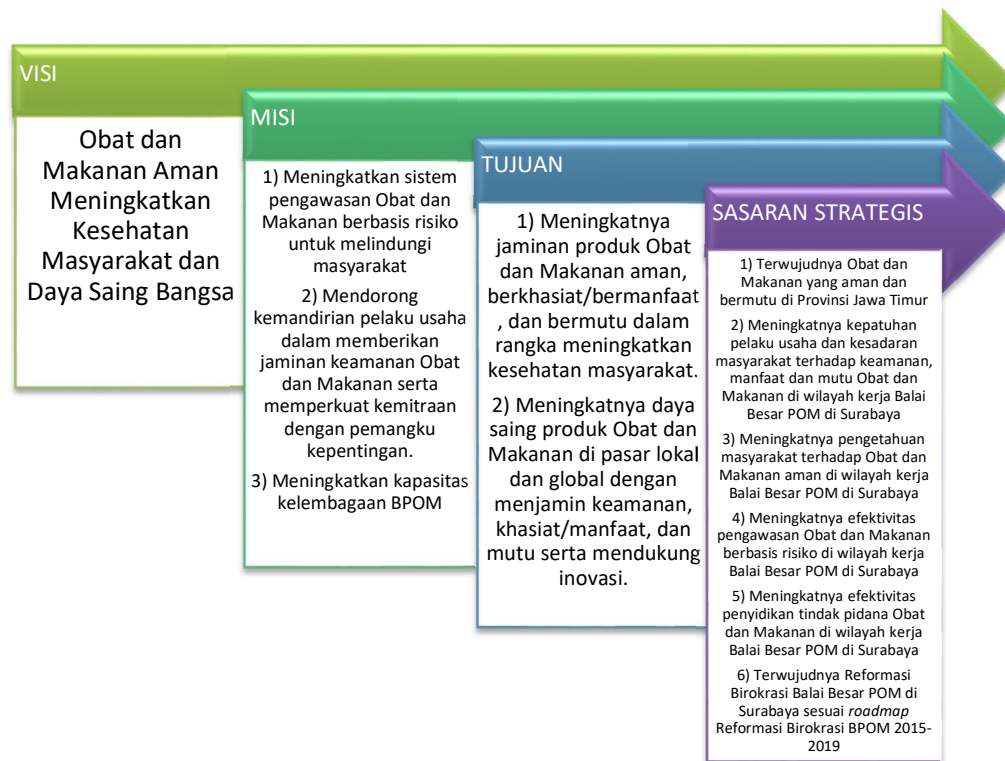
Tabel 2. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja 2015-2017 (OTK Lama)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja		
		2015	2016	2017
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase obat yang memenuhi syarat	92.00	92.50	93.00
	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	80.00	81.00	82.00
	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	89.00	90.00	91.00
	Persentase Suplemen Makanan yang memenuhi syarat	79.00	80.00	81.00
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82.30	82.80	83.30
Meningkatnya kapasitas dan komitmen pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat	75.00	75.25	75,5
	Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	38	38	38
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	Nilai SAKIP BBPOM dari BPOM	B	A	A

Tabel 3. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai Besar POM di Surabaya 2018-2019 (OTK Baru)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	
		2018	2019
Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Jawa Timur	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Jawa Timur	70	71
	Persentase obat yang memenuhi syarat meningkat di Provinsi Jawa Timur	93.50	94
	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat meningkat di Provinsi Jawa Timur	83.00	60
	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat meningkat di Provinsi Jawa Timur	92.00	80
	Persentase Suplemen Makanan yang memenuhi syarat meningkat di Provinsi Jawa Timur	82.00	87
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat meningkat di Provinsi Jawa Timur	89.60	71
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Surabaya	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Surabaya	60	61
	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Surabaya	-	66
Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Surabaya	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Surabaya	60	61
Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Surabaya	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Jawa Timur	100	100
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Surabaya	60	65
	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Surabaya	75	77
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Jawa Timur	82	85
	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Surabaya	36.10	46,95
Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Surabaya	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di masing-masing wilayah kerja BB/BPOM	50	50
Terwujudnya Reformasi Birokrasi Balai Besar POM di Surabaya sesuai dengan roadmap Reformasi Birokrasi BPOM 2015- 2019	Nilai AKIP Balai Besar POM di Surabaya	78	81

Dengan memperhatikan prioritas pembangunan RPJMN 2015-2019, maka kedudukan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 7. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (periode 2015-2019) diharapkan Balai Besar POM di Surabaya mampu mencapai sasaran strategis secara efektif dan efisien sehingga memberikan kontribusi positif dalam dimensi pembangunan manusia seiring dengan proses revolusi mental sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia serta mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, dengan penjabaran masing-masing Sasaran Strategis sebagai berikut :



Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Jawa Timur

Komoditas/produk yang diawasi Balai Besar POM di Surabaya tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya

pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Balai Besar POM di Surabaya merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari: Pertama, pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilans, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan *post-market* dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Ke-dua, pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat. Ke-tiga, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *pro justitia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan *full spectrum* di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan pre-market dan post-market yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut :

- a. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Surabaya hingga akhir tahun 2019 di targetkan 71%
- b. Persentase Obat yang memenuhi syarat di Provinsi Jawa Timur hingga akhir tahun 2019 ditargetkan 94%.
- c. Persentase Produk Obat Tradisional yang memenuhi syarat Provinsi Jawa Timur hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 60%.
- d. Persentase Produk Kosmetik yang memenuhi syarat Provinsi Jawa Timur hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 80%.

- e. Persentase Produk Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat Provinsi Jawa Timur hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 87%.
- f. Persentase Makanan yang memenuhi syarat Provinsi Jawa Timur hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 71%.



Sasaran Strategis 2

Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat, dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Surabaya

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat.

Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, berhasiat/bermanfaat, dan bermutu) dimulai dari proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Asumsinya, pelaku usaha memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk memelihara sistem manajemen risiko secara mandiri. Dari sisi pemerintah, BPOM bertugas menyusun kebijakan dan regulasi terkait Obat dan Makanan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan mendorong penerapan *Risk Management Program* oleh industri. Peningkatan kapasitas dan komitmen pelaku usaha diasumsikan akan berkontribusi pada peningkatan daya saing Obat dan Makanan.

Selain itu, dalam sub sistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan BPOM melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE).

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

- a. Indeks Kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha dibidang obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Surabaya hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 61.
- b. Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Surabaya hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 66.



Sasaran Strategis 3

Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman
Di wilayah kerja Balai Besar POM di Surabaya

Sesuai dengan prinsip dasar pilar ke 3 (tiga) pengawasan Obat dan Makanan dimana salah satunya adalah terkait pengawasan oleh masyarakat, BPOM perlu berupaya untuk selalu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. Untuk mencapai tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat yang tinggi, BPOM perlu secara aktif memberikan pengetahuan kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) melalui berbagai forum dan media. Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman, diharapkan akan mampu menimbulkan sikap dan perilaku yang mampu membentengi diri sendiri dari produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) :

Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Surabaya hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 61.



Sasaran Strategis 4

Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis resiko
Di wilayah kerja Balai Besar POM di Surabaya

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*full spectrum*) mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan BPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BPOM, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM akan meningkat efektivitasnya apabila BPOM mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. BPOM perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

- a. Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Jawa Timur hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 100%.
- b. Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Surabaya hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 65%.
- c. Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Surabaya hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 77%.
- d. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja Balai Besar POM di Surabaya hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 85%.
- e. Rasio tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai Besar POM di Surabaya hingga akhir tahun 2019 ditargetkan sebesar 46,95%.



Sasaran Strategis 5

Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan
Di wilayah kerja Balai Besar POM di Surabaya

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial.

Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar. Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan BPOM menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan,

ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh BPOM melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU):

Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja Balai Besar POM di Surabaya hingga akhir tahun 2019 ditargetkan 50%.



Sasaran Strategis 6

Terwujudnya Reformasi Birokrasi Balai Besar POM di Surabaya sesuai *roadmap* Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2015-2019, BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BPOM akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk menginstitusionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di BPOM. Pada tahun 2015-2019, BPOM berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB, Opini BPK, dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di BPOM agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran.

Sumber daya, yang meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan BPOM untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Untuk melaksanakan tugas BPOM, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU):

Nilai AKIP Balai Besar POM di Surabaya tahun 2019 ditargetkan 81.

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Balai Besar POM di Surabaya menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis 2015-2019 dan DIPA Balai Besar POM di Surabaya Tahun Anggaran 2018 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 61.356.765.000 (Enam Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah). Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis yang seharusnya terwujud pada tahun 2018 dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh BBPOM di Surabaya, sebagai berikut :

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Surabaya Tahun 2018

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
RENJA 2018 (OTK Lama)			
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	4507
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	63
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	24

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	21
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	83
6	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	9
7	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	Jumlah layanan publik BB/BPOM	18000
		Jumlah komunitas yang diberdayakan	44
PETA STRATEGI (OTK Baru)			
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Jawa Timur	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	70
		Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Jawa Timur	93.5
		Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Jawa Timur	83
		Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Jawa Timur	92
		Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Jawa Timur	82
		Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Jawa Timur	89.6
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	60
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	60
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Jawa Timur	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Jawa Timur	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	60
		Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	75

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Jawa Timur	82
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	36.1
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	50
6	Terwujudnya RB BBPOM di Surabaya sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019	Nilai AKIP BBPOM di Surabaya	78

Penetapan target Perjanjian Kinerja tahun 2018 pada sasaran program berdasarkan target pada Rencana Kinerja Tahun (RKT) tahun 2018. Target pada RKT tahun 2018 dibuat dengan mengacu pada Renstra tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan berdasarkan tren data capaian periode Renstra tahun sebelumnya. Sedangkan penetapan target Perjanjian Kinerja tahun 2018 pada sasaran Kegiatan, disesuaikan dengan target yang tercantum pada DIPA tahun 2018.

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka Balai Besar POM di Surabaya sebagai unit kerja Eselon II wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala Balai Besar POM di Surabaya) dengan pemberi amanah (Kepala BPOM RI) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Pengukuran akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja BBPOM Surabaya selalu dimonitoring setiap triwulan melalui aplikasi *e-performance* untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan tiap triwulan berikutnya.

2.3. Kriteria Pencapaian Indikator

Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut :



Gambar 8. Kriteria Pencapaian Indikator

Penetapan ini bertujuan untuk :

1. Mencegah penetapan target kinerja tahunan yang rendah.
2. Pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing pernyataan kinerja sasaran strategis BBPOM di Surabaya guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2018 terhadap target yang telah ditetapkan, membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2018 dengan tahun lalu, membandingkan realisasi kinerja tahun 2018 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya serta melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Pada tahun 2018 BBPOM di Surabaya telah berhasil mencapai 5 sasaran strategis yang telah ditetapkan dan belum berhasil mencapai target 1 sasaran strategis seperti tergambar pada tabel dibawah ini.

Tabel 5. Pencapaian Sasaran Strategis

NO.	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN (NPS)	KRITERIA
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Jawa Timur	105,44	Memuaskan
2.	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	125,83	Tidak dapat disimpulkan
3.	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	127,80	Tidak dapat disimpulkan
4.	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Jawa Timur	103,16	Memuaskan
5.	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	120,93	Memuaskan
6.	Terwujudnya RB BBPOM di Surabaya sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019	99,88	Cukup

Bila dibandingkan dengan pencapaian kinerja 3 Balai lain dengan beban kerja yang setara yaitu BBPOM di Semarang, BBPOM di Bandung, BBPOM di Makassar, maka diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini.

Tabel 6. Perbandingan Pencapaian Sasaran Strategis

NO.	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN BBPOM Surabaya	CAPAIAN BBPOM Semarang	CAPAIAN BBPOM Bandung	CAPAIAN BBPOM Makassar
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	105.44	110.86	100.97	108.51
2.	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja	125.83	110.13	139.52	98.72
3.	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja	127.80	128.83	118.35	115.43
4.	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi	103.16	112.77	108.73	100.48
5.	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja	120.93	105.26	62.74	128.56
6.	Terwujudnya RB BBPOM sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019	99.88	92.36	97.18	94.58

Untuk sasaran strategis pertama, pencapaian 3 Balai lain yang setara sama dengan pencapaian BBPOM di Surabaya, yaitu diatas 100% (memuaskan), begitu juga dengan pencapaian sasaran strategi keempat. Sedangkan pencapaian sasaran strategis kedua, ketiga dan kelima bervariasi.

Pada sasaran strategis kedua dan ketiga, capaian BBPOM di Surabaya diatas 125% sehingga masuk kriteria tidak dapat disimpulkan. Hal ini disebabkan karena penentuan target yang belum tepat yaitu terlalu rendah. Indikator untuk mengukur sasaran strategis kedua dan ketiga merupakan indikator yang baru diukur tahun 2018 sehingga kesulitan untuk menentukan target awal. Untuk selanjutnya akan diadakan reviu target menyesuaikan baseline tahun 2018.

Pencapaian sasaran strategis keenam yang diukur dengan indikator nilai AKIP pada BBPOM di Surabaya dan 3 balai lain yang setara adalah dibawah 100% dengan kriteria cukup, namun BBPOM di Surabaya mendapat capaian yang tertinggi dibandingkan 3 balai lainnya, selain itu nilai AKIP BBPOM di Surabaya merupakan nilai tertinggi secara nasional.

Analisis Akuntabilitas Kinerja

Pada Rencana Strategis BBPOM di Surabaya telah ditetapkan 6 sasaran strategis dan 15 indikator Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian sebagai berikut :

Tabel 7. Hasil Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Jawa Timur	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	70	64.2	91.71
		Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Jawa Timur	93.5	91.93	98.32
		Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Jawa Timur	83	91.63	110.40
		Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Jawa Timur	92	92.73	100.80
		Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Jawa Timur	82	100.00	121.95
		Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Jawa Timur	89.6	92.15	102.84
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	60	75.50	125.83
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	60	76.68	127.80
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Jawa Timur	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Jawa Timur	100	100	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	60	60.19	100.32
		Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	75	75.12	100.16
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Jawa Timur	82	90.75	110.67
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	36.1	37.78	104.65
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	50	60.47	120.93
6	Terwujudnya RB BBPOM di Surabaya sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019	Nilai AKIP BBPOM di Surabaya	78	77.91	99.88

Dari 15 (lima belas) **Indikator Kinerja Utama (IKU)**, terdapat **3 indikator** yang tidak mencapai target dengan kategori “cukup”, **2 indikator** mempunyai capaian melebihi 125% dengan kategori “tidak dapat disimpulkan”, dan **10 indikator** mencapai target dengan kriteria “memuaskan”. Kriteria memuaskan menunjukkan bahwa penguatan pengawasan Obat dan Makanan menjadi komitmen utama harus terus dipertahankan dan diperkuat secara optimal sehingga produk-produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan di Provinsi Jawa Timur tetap terjamin aman, bermanfaat/berkhasiat dan bermutu untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target tersebut sehingga dapat memperkuat pengawasan Obat dan Makanan antara lain membentuk tim koordinasi dan pengawasan terpadu dengan pemerintah daerah dan lintas sektor terkait. Dari aspek produksi telah dilakukan upaya meningkatkan keamanan dan mutu produk obat dan makanan dengan intensifikasi pembinaan, bimbingan dan konsultasi pemenuhan cara produksi yang baik, informasi standar mutu dan penggunaan bahan berbahaya yang dilarang serta peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada produsen sehingga produk yang dihasilkan aman, bermutu dan berkhasiat/bermanfaat. Terlebih dalam kondisi pasar bebas, AFTA dan MEA yang sudah berlangsung saat ini dan tidak dapat dibendung lagi masuknya produk-produk impor melalui jalur resmi maupun ilegal, maka dibutuhkan pengawasan yang komprehensif dan lebih kearah hulu yaitu sebelum produk beredar di masyarakat secara intensif. Untukantisipasi dampak produk yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan serta berisiko terhadap kesehatan maka dilakukan KIE bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati memilih dan mengkonsumsi produk obat dan makanan melalui penyuluhan, brosur, banner, poster, pemasangan *billboard* dan *videotron* di tempat-tempat strategis dan iklan layanan 3Indica di media massa serta upaya mendorong peran aktif masyarakat dalam mencari informasi dan pengetahuan tentang obat dan makanan.

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh BBPOM di Surabaya, sebagai berikut :



Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Jawa Timur

Indikator Kinerja Sasaran Strategis I

1. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2018

Tabel 8. Perbandingan Target dan Realisasi IPOM di wilayah kerja BBPOM di Surabaya tahun 2018

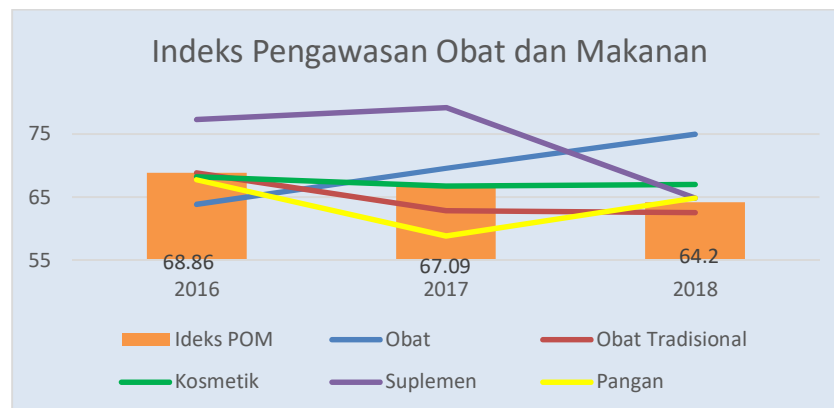
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks Pengawasan Obat dan Makanan (IPOM) di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	70	64.2	91.71	Cukup

Nilai Indeks Pengawasan Obat dan Makanan (IPOM) adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM yang akan diukur menggunakan 3 (tiga) dimensi yaitu pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan Indeks POM sementara ini dilakukan melalui pengumpulan data sekunder dari Laporan Tahunan, Laporan Kinerja, serta laporan kinerja hasil pengawasan lain yang relevan.

Indeks POM dihitung menggunakan metodologi statistik dan Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk pembobotan indikator kinerja pembentuk indeks. Indeks ini dihitung berdasarkan capaian kinerja BPOM pada tahun n-1 yaitu tahun 2017.

Realisasi IPOM BBPOM Surabaya tahun 2018 belum mencapai target dengan kategori cukup.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2018 dengan tahun 2017/2016



Gambar 9. Realisasi IPOM BBPOM di Surabaya Tahun 2016 sampai 2018

Berdasarkan grafik IPOM menurut komoditi di atas, IPOM BBPOM di Surabaya tahun 2018 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Komoditi Obat mengalami kenaikan indeks dari tahun 2016 hingga tahun 2018. Sedangkan untuk komoditi lainnya mengalami fluktuasi setiap tahun.

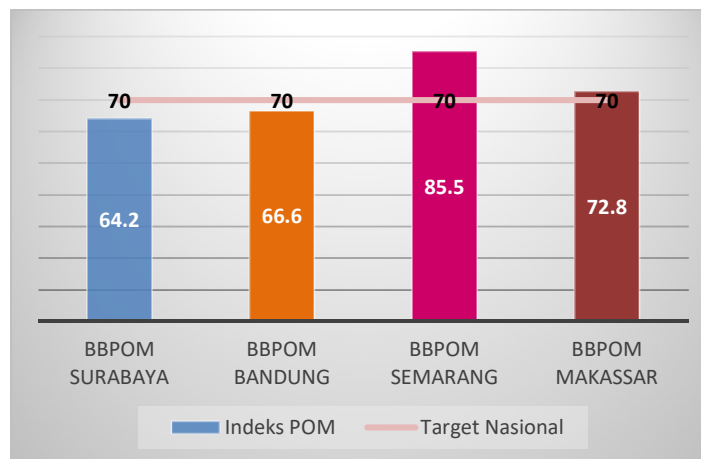
c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dengan target 2019 dalam Renstra OTK baru

Tabel 9. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dengan target 2019

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	71	64.2	90.42	Cukup

Realisasi kinerja tahun 2018 **belum mencapai target** Renstra tahun 2019, capaiannya adalah 90,42% dengan kategori cukup, sehingga diperlukan upaya upaya untuk meningkatkan nilai IPOM dengan meningkatkan nilai survey kepuasan masyarakat dan meningkatkan intensitas pembinaan kepada pelaku usaha yang mempunyai bobot tertinggi dalam penilaian IPOM.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dengan Balai lain yang sejenis/setara



Gambar 10. Perbandingan realisasi IPOM tahun 2018 dengan Balai lain

Realisasi indeks pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Bandung masih berada di bawah target nasional 70, sedangkan 2 Balai lainnya berada di atas target nasional. Hal ini dapat dipengaruhi oleh luasnya cakupan dan jumlah sarana produksi dan distribusi yang harus diperiksa baik di BBPOM di Surabaya maupun BBPOM di Bandung.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta 33 indikator 33e solusi yang telah dilakukan

IPOM obat tahun 2018 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2017 dan 2016, karena pedoman sampling menggunakan metode acak sehingga cakupan pengawasan obat lebih luas dan merata. Kriteria temuan dan mekanisme tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat telah diatur pada pedoman tindak lanjut.

Pemeriksaan sarana produksi suplemen tidak dilakukan secara khusus karena produksi suplemen menggunakan fasilitas bersama dengan produk obat dan atau makanan. Pemeriksaan sarana distribusi suplemen juga tidak dilaksanakan secara khusus karena suplemen didistribusikan bersama dengan obat dan atau obat tradisional. Sehingga tidak ada data pengawasan produksi dan distribusi suplemen. Sedangkan hasil pengujian suplemen sejak tahun 2015 hingga tahun 2018 seluruhnya 100% memenuhi syarat. Berdasarkan hal tersebut di atas, tidak ditemukan factor yang mempengaruhi penurunan indeks suplemen.

IPOM obat tradisional mengalami penurunan dari tahun 2015 karena penurunan kepatuhan pelaku usaha obat tradisional yang ditunjukkan dengan menurunnya persentase sarana produksi obat tradisional yang memenuhi ketentuan. Penurunan persentase cakupan sarana distribusi obat tradisional yang diawasi juga memberikan konstribusi penurunan indeks. Penurunan cakupan sarana distribusi obat tradisional yang diawasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efektifitas pengawasan sarana distribusi obat tradisional.

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan BBPOM di Surabaya yang diperoleh berdasarkan survey oleh Inspektorat mengalami fluktuasi dari tahun 2015 hingga 2017. Tingkat kepuasan masyarakat merupakan salah satu indikator yang mempunyai bobot tertinggi di dalam pengukuran IPOM, sehingga sangat berpengaruh pada pengukuran IPOM. BBPOM di Surabaya telah berhasil menaikkan hasil survey tingkat kepuasan masyarakat tahun 2018 dari 86,6 menjadi 87,04 sehingga diharapkan dapat menaikkan IPOM tahun 2019.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Nilai indeks POM dipengaruhi oleh semua kegiatan pengawasan BBPOM di Surabaya, mencakup pengujian obat dan makanan, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan, rekomendasi tindak lanjut pengawasan, penyidikan obat dan makanan, tingkat kepuasan masyarakat, pemberdayaan komunitas, sertifikasi sarana, bimbingan teknis kepada pelaku usaha, dan pengujian laboratorium pihak ketiga (pengusaha).

Tabel 10. Capaian kegiatan yang menunjang IPOM tahun 2018

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Pengujian Laboratorium Sampel Obat dan Makanan	Jumlah sampel yang diperiksa	4507	4516	100,20
Audit sarana dalam rangka Sertifikasi, Labelisasi Halal, dan Surveilans	Jumlah sarana yang diaudit dan dibina	525	525	100
Pemberdayaan Komunitas	Jumlah komunitas yang diberdayakan	44	44	100
Pengawasan Sarana Produksi Obat, Obat Tradisional, Kosmetika, NAPZA, Prekursor, Makanan dan Bahan Berbahaya	Jumlah sarana produksi yang diperiksa	618	618	100
Pengawasan Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetika, NAPZA, Prekursor, Makanan dan Bahan Berbahaya	Jumlah sarana distribusi yang diperiksa	1488	1500	100,81
Penyidikan obat dan makanan	Jumlah perkara di bidang obat dan makanan	21	22	104,76
Pengujian sampel pihak ke3	Jumlah sampel yang diuji	261	261	100
Pengukuran kepuasan masyarakat	Nilai	87	87,04	100,04

Berdasarkan tabel diatas, semua kegiatan sudah dilaksanakan sesuai target, bahkan beberapa ada yang melebihi target. Capaian jumlah sampel yang diuji tahun 2018 dipengaruhi oleh:

- Terjadi perubahan metode sampling menjadi metode acak pada beberapa komoditi antara lain obat dan obat tradisional menyebabkan ketersediaan sampel di pasaran tidak memberikan pengaruh yang signifikan pada proses pengambilan sampel.
- Beberapa obat dan bentuk sediaan pada prioritas sampling sudah tidak diproduksi dan tidak ditemukan di peredaran.
- Kebutuhan sarana prasarana pengujian seperti metode analisis, alat laboratorium, suku cadang alat laboratorium (*high technology*), reagensia dan media mikrobiologi, serta alat gelas (*glassware*) untuk pengujian belum sepenuhnya tercapai.
- Pemenuhan ruang lingkup pengujian dan pelaksanaan verifikasi metode analisa menyebabkan jumlah sampel yang diuji lebih besar dari target yang ditetapkan.

g. **Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya**

Berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja periode 2015-2017, telah dilakukan proses reuiu indikator kinerja utama (IKU) yang lebih mencerminkan kinerja pengawasan secara keseluruhan, sehingga didapatkan indikator baru yaitu Indeks Pengawasan Oba dan Makanan.

2. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Jawa Timur

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2018

Tabel 11. Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase obat yang memenuhi syarat di provinsi Jawa Timur	93.5%	91.93%	98.32%	Cukup

Persentase obat yang memenuhi syarat di Provinsi Jawa Timur diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{Obat MS} = 100\% - \% \text{Obat TMS}$$

$$\% \text{Obat TMS} = (\text{sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan atau TMK label/penandaan}) \text{ dibagi total sampling } \times 100\%$$

Capaian persentase obat yang memenuhi syarat di Provinsi Jawa Timur tahun 2018 masih **belum mencapai target** yaitu 98,32% dengan kriteria “cukup”.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2018 dengan tahun 2017/2016

Perbandingan realisasi dan capaian persentase obat yang memenuhi syarat di Provinsi Jawa Timur tahun 2018 dengan tahun 2017/2016 **tidak bisa dilakukan** karena adanya perubahan dalam alur pemeriksaan Obat yang dimulai dari sampling hingga pengujian. Sampling dilakukan tidak hanya sebatas jenis Obat yang diuji petik dalam pengawasan, tetapi mencakup keseluruhan jenis Obat yang beredar di Provinsi Jawa Timur. Ruang lingkup indikator tersebut tidak hanya mencakup hasil pengujian saja, tetapi juga mencakup produk yang tidak memiliki nomor izin edar (NIE)/ produk ilegal termasuk palsu, tidak memenuhi ketentuan label/penandaan, produk kedaluwarsa, dan produk rusak.

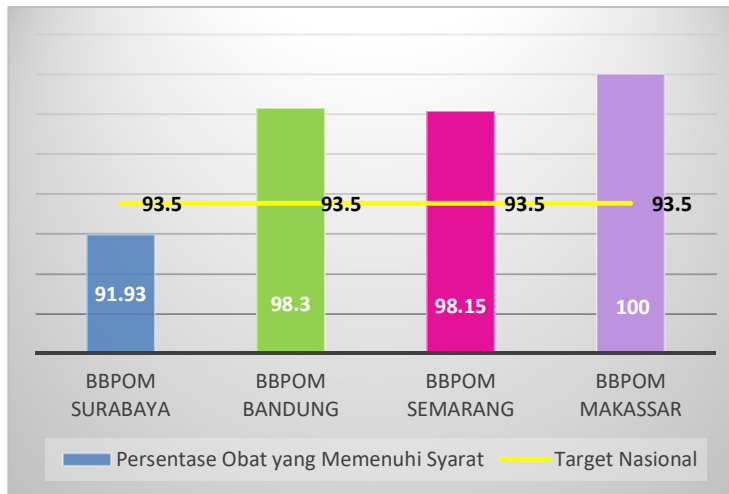
c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dengan target 2019 dalam Renstra OTK baru

Tabel 12. Realisasi Kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat tahun 2018 dengan target 2019

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	REALISASI 2018	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase obat yang memenuhi syarat di provinsi Jawa Timur	94%	91.93%	97.79%	Cukup

Realisasi kinerja persentase obat yang memenuhi syarat di Provinsi Jawa Timur tahun 2018 masih belum mencapai target 2019, capaiannya adalah 97,79% dengan kriteria “cukup”.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dengan Balai lain yang sejenis/setara



Gambar 11. Perbandingan realisasi persentase obat yang MS tahun 2018 dengan Balai lain

Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa realisasi indikator persentase obat yang memenuhi syarat di BBPOM di Surabaya berada **dibawah target nasional 93,5%**, sedangkan 3 Balai lainnya mempunyai realisasi di atas target nasional.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi persentase obat memenuhi syarat pada tahun 2018 belum mencapai target yang ditetapkan karena adanya perubahan dalam alur pemeriksaan Obat yang dimulai dari sampling hingga pengujian. Sampling dilakukan tidak hanya sebatas jenis Obat yang diuji petik dalam pengawasan, tetapi mencakup keseluruhan jenis Obat yang beredar di Provinsi Jawa Timur. Ruang lingkup indikator tersebut tidak hanya mencakup hasil pengujian saja, tetapi juga mencakup produk yang tidak memiliki nomor izin edar (NIE)/ produk ilegal termasuk palsu, tidak memenuhi ketentuan label/penandaan, produk kedaluwarsa, dan produk rusak. Pada sampel obat yang diperiksa tahun 2018 diperoleh 867 sampel, dengan 14 sampel tidak memenuhi syarat (TMS) pengujian, 53 sampel TMS penandaan label, dan 3 sampel tanpa izin edar. Sebesar 75% dari sampel obat tidak memenuhi syarat adalah sampel tidak mematuhi ketentuan penandaan yang berlaku (tidak melampirkan brosur dan kelengkapan informasinya). Dari 53 sampel TMS penandaan yang diproduksi oleh 23 Industri Farmasi, 6 diantaranya adalah Industri Farmasi di Jawa Timur. Dengan demikian diperlukan pembinaan baik berupa peringatan maupun bimbingan agar produsen obat mau mematuhi ketentuan penandaan label pada produk obat.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Beberapa hal yang mendukung capaian obat yang memenuhi syarat, antara lain :

- Intervensi pengawasan dilakukan secara rutin dan terus-menerus kepada 25 industri farmasi untuk pemenuhan penerapan Cara Produksi Obat yang Baik (CPOB), sehingga produk obat yang dihasilkan memenuhi standar termasuk aspek kesesuaian penandaannya. Apabila industri farmasi melakukan pelanggaran terhadap pemenuhan CPOB maka industri farmasi wajib membuat *Corrective Action Preventive Action* (CAPA) dan dilakukan monitoring secara berkesinambungan sehingga menjamin obat yang diproduksi memenuhi standar baik secara kualitas maupun kesesuaian dengan dokumen registrasi.
- Peningkatan koordinasi dengan Badan POM dan Balai Besar POM seluruh Indonesia terkait temuan produk obat TMS penandaan produksi Industri Farmasi diluar Jawa Timur.
- Telah dilakukan audit sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik pada 52 PBF, sehingga pihak sarana berupaya untuk memenuhi persyaratan CDOB yang ditetapkan secara maksimal.
- Pelaksanaan kegiatan penyidikan selalu ditingkatkan yang diimbangi dengan peningkatan kompetensi personel dengan demikian cakupan temuan pelanggaran di bidang obat dan makanan lebih luas. Pada tahun 2018 terdapat temuan produk obat ilegal, obat keras, dan bahan baku obat ilegal sebanyak 2 kasus
- Peningkatan kompetensi personel pengujian dan adanya penambahan instrument/alat yang dibutuhkan sebanyak 26 unit sehingga mampu melakukan pengujian dengan parameter yang lebih banyak secara optimal.
- Penyuluhan dan penyebaran informasi tentang KIE Pemberantasan Obat ilegal kepada masyarakat sebanyak 500 orang penduduk Kabupaten Tulungagung, 500 orang Kabupaten Ponorogo, 1500 orang Kabupaten Pacitan, dan 500 orang Kabupaten Banyuwangi

g. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja periode 2015-2017, telah dilakukan proses reviu indikator kinerja utama (IKU) persentase obat yang memenuhi syarat. Perubahan yang dilakukan adalah perubahan dalam alur pemeriksaan Obat yang dimulai dari sampling hingga pengujian. Sampling dilakukan tidak hanya sebatas jenis Obat yang diuji petik dalam pengawasan, tetapi mencakup keseluruhan jenis Obat yang beredar dan menjadi kewenangan pengawasan BBPOM di Surabaya. Ruang lingkup indikator tersebut tidak hanya mencakup hasil pengujian saja, tetapi juga mencakup produk yang tidak memiliki nomor izin edar (NIE)/ produk ilegal termasuk palsu, tidak memenuhi ketentuan label/penandaan, produk kedaluwarsa, dan produk rusak.

3. Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Jawa Timur

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2018

Tabel 13. Realisasi Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat di Provinsi Jawa Timur	83%	91.63%	110.40%	Memuaskan

Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat di Provinsi Jawa Timur diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{Obat Tradisional MS} = 100\% - \% \text{Obat Tradisional TMS}$$

$$\% \text{Obat Tradisional TMS} = (\text{sampel Obat Tradisional yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan atau TMK label/penandaan}) \text{ dibagi total sampling} \times 100\%$$

Capaian persentase obat tradisional yang memenuhi syarat di Provinsi Jawa Timur tahun 2018 sudah **melebihi target** yang ditetapkan yaitu 110,40% dengan kriteria “memuaskan”.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2018 dengan tahun 2017/2016

Perbandingan realisasi dan capaian persentase obat tradisional yang memenuhi syarat di Provinsi Jawa Timur tahun 2018 dengan tahun 2017/2016 **tidak bisa dilakukan** karena adanya perubahan dalam alur pemeriksaan obat tradisional yang dimulai dari sampling hingga pengujian. Sampling dilakukan tidak hanya sebatas jenis obat tradisional yang diuji petik dalam pengawasan, tetapi mencakup keseluruhan jenis obat tradisional yang beredar di Provinsi Jawa Timur. Ruang lingkup indikator tersebut tidak hanya mencakup hasil pengujian saja, tetapi juga mencakup produk yang tidak memiliki nomor izin edar (NIE)/ produk ilegal termasuk palsu, tidak memenuhi ketentuan label/penandaan, produk kedaluwarsa, dan produk rusak.

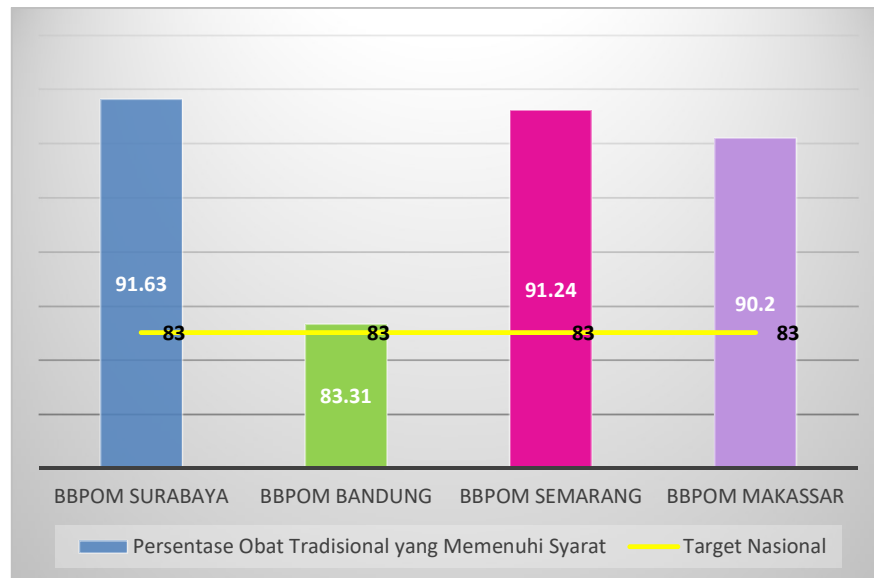
c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dengan target 2019 dalam Renstra OTK baru

Tabel 14. Realisasi Kinerja Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat tahun 2018 dengan target 2019

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat di Provinsi Jawa Timur	60%	91.63%	152.72%	Tidak dapat disimpulkan

Realisasi kinerja persentase obat tradisional yang memenuhi syarat di Provinsi Jawa Timur tahun 2018 sudah **melebihi target 2019**, capaiannya adalah 152,72% dengan kriteria “tidak dapat disimpulkan” karena capaian sudah melebihi 125%.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dengan Balai lain yang sejenis/setara



Gambar 12. Perbandingan realisasi persentase obat tradisional yang MS tahun 2018 dengan Balai lain

Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa realisasi indikator persentase obat tradisional yang memenuhi syarat di BBPOM di Surabaya dan 3 balai lainnya yang setara berada **diatas target nasional** 83%. BBPOM di Bandung mempunyai realisasi yang paling rendah dibandingkan 3 balai lainnya yang setara.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi persentase obat tradisional yang memenuhi syarat pada tahun 2018 sudah mencapai target tahun 2018, namun tidak dapat disimpulkan pada tahun 2019. Hal ini disebabkan penurunan target pada tahun 2019 menjadi 60%. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan dalam alur pemeriksaan obat tradisional yang dimulai dari sampling hingga pengujian. Sampling dilakukan tidak hanya sebatas jenis obat tradisional yang diuji petik dalam pengawasan, tetapi mencakup keseluruhan jenis obat tradisional yang beredar di Provinsi Jawa Timur. Ruang lingkup indikator tersebut tidak hanya mencakup hasil pengujian saja, tetapi juga mencakup produk yang tidak memiliki nomor izin edar (NIE)/ produk ilegal termasuk palsu, tidak memenuhi ketentuan label/penandaan, produk kedaluwarsa, dan produk rusak. Pada tahun 2018, perubahan dalam alur pemeriksaan obat tradisional yang dimulai dari sampling hingga pengujian baru dilakukan seiring dengan Reviu Renstra yang dilakukan pada Bulan September 2018. Sehingga hasil pemeriksaan belum utuh selama satu tahun menggunakan alur pemeriksaan

baru. Dari 693 sampel obat tradisional yang diperiksa sebanyak 11 sampel TMS pengujian, 42 sampel TMS penandaan (tidak mencantumkan kode produksi, netto, kadaluarsa), 5 sampel tanpa iji edar. Dari jumlah sampel yang tidak memenuhi syarat, sebanyak 72,4% tidak memenuhi persyaratan penandaan label. Untuk meningkatkan persentase obat tradisional yang memenuhi syarat diperlukan pembinaan baik berupa peringatan maupun bimbingan agar produsen obat tradisional bersedia mematuhi ketentuan penandaan label pada produk obat tradisional.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian obat tradisional yang memenuhi syarat antara lain :

- Intervensi pengawasan yang dilakukan terhadap 62 sarana produksi obat tradisional untuk meningkatkan kepatuhan produsen terhadap peraturan yang berlaku serta pemenuhan penerapan Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB), termasuk aspek kesesuaian penandaannya, sehingga produk obat tradisional yang dihasilkan memenuhi standar baik secara kualitas maupun kesesuaian dengan dokumen registrasi.
- Publikasi hasil pengawasan Obat Tradisional oleh Badan POM berupa *Public Warning* melalui *website* BPOM yang diteruskan juga kepada lintas sektor terkait di Jawa Timur meliputi informasi identitas obat tradisional yang tidak memenuhi persyaratan mutu (mengandung bahan kimia obat), tanpa izin edar agar diketahui oleh masyarakat dan tidak memilihnya untuk dikonsumsi karena dapat merugikan kesehatan. Hal ini mendorong produsen obat memenuhi standar mutu.
- Sebanyak 9 perkara telah diprojustisia terhadap obat tradisional yang illegal dan mengandung bahan kimia obat (BKO) Selain penindakan secara 41ndic bagi produsen dan distributor obat tradisional illegal dan/atau mengandung bahan kimia obat (BKO) juga dilakukan pemusnahan terhadap produk obat tradisional yang merupakan hasil penyitaan di tingkat penyidikan maupun putusan pengadilan. Kegiatan tersebut dipublikasikan agar dapat meningkatkan kewaspadaan masyarakat dan pencegahan pelanggaran oleh pelaku usaha.
- Kegiatan penyebaran informasi mengenai Obat Tradisional, dan Kosmetik melalui penyampaian Iklan Layanan Masyarakat di radio di Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Trenggalek.
- Pembinaan kepada pelaku usaha telah dilakukan kepada 39 UKOT. Melalui pembinaan yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kab/ Kota setempat, sebanyak 22 UKOT di wilayah

Jawa Timur telah mendapatkan Surat Keterangan Pemenuhan Aspek (SKPA) dengan rincian 20 UKOT mendapatkan SKPA Tahap I dan 2 UKOT mendapatkan SKPA Tahap II

- Pengembangan metode analisa yang menyesuaikan dengan tren produk beredar
- g. **Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya**

Berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja periode 2015-2017, telah dilakukan proses reuiu indikator kinerja utama (IKU) persentase obat tradisional yang memenuhi syarat. Perubahan yang dilakukan adalah perubahan dalam alur pemeriksaan obat tradisional yang dimulai dari sampling hingga pengujian. Sampling dilakukan tidak hanya sebatas jenis obat tradisional yang diuji petik dalam pengawasan, tetapi mencakup keseluruhan jenis obat tradisional yang beredar dan menjadi kewenangan pengawasan BBPOM di Surabaya. Ruang lingkup indikator tersebut tidak hanya mencakup hasil pengujian saja, tetapi juga mencakup produk yang tidak memiliki nomor izin edar (NIE)/ produk ilegal termasuk palsu, tidak memenuhi ketentuan label/penandaan, produk kedaluwarsa, dan produk rusak.

4. Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Jawa Timur

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2018

Tabel 15. Realisasi Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat tahun 2018

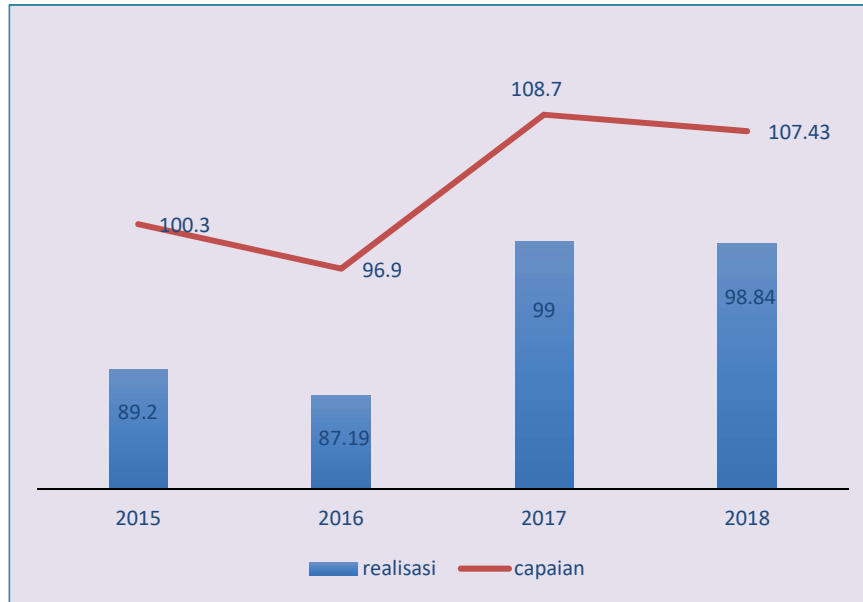
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase kosmetik yang memenuhi syarat di Provinsi Jawa Timur	92%	98.84%	107.43%	Memuaskan

Persentase kosmetik yang memenuhi syarat di Provinsi Jawa Timur diperoleh dengan rumus:

$$\text{Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat} = \left(\frac{\text{Jumlah Kosmetik yang memenuhi syarat pada tahun berjalan}}{\text{Total Kosmetik yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan (n)}} \right) \times 100\%$$

Capaian persentase kosmetik yang memenuhi syarat di Provinsi Jawa Timur tahun 2018 sudah **melebihi target** yang ditetapkan yaitu 107,43% dengan kriteria “memuaskan”.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2018 dengan tahun 2017/2016



Gambar 13. Perbandingan realisasi dan capaian presentase kosmetik yang MS tahun 2018 dengan tahun sebelumnya

Realisasi dan capaian presentase kosmetik yang memenuhi syarat di Provinsi Jawa Timur tahun 2018 dengan tahun sebelumnya menunjukkan ada kenaikan signifikan pada tahun 2017, dan sedikit menurun di tahun 2018.

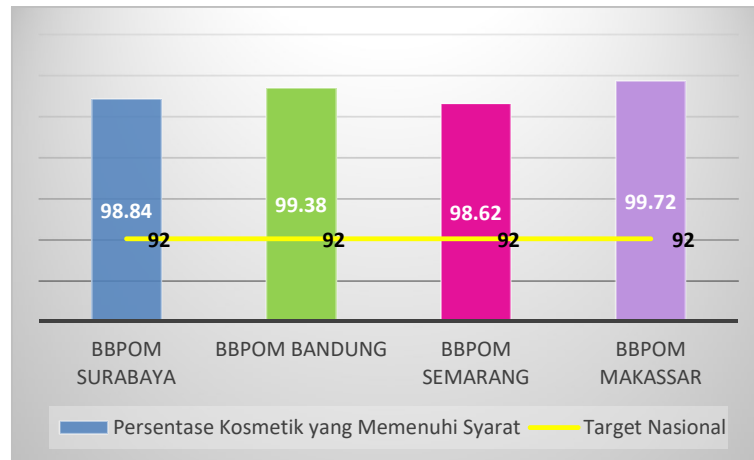
c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dengan target 2019 dalam Renstra OTK baru

Tabel 16. Realisasi Kinerja Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat tahun 2018 dengan target 2019

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase kosmetik yang memenuhi syarat di Provinsi Jawa Timur	80%	98.84%	123.54%	Memuaskan

Realisasi kinerja persentase kosmetik yang memenuhi syarat di Provinsi Jawa Timur tahun 2018 **melebihi target 2019**, capaiannya adalah 123,54% dengan kriteria “memuaskan”.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dengan Balai lain yang sejenis/setara



Gambar 14. Perbandingan realisasi persentase kosmetik yang MS tahun 2018 dengan Balai lain

Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa realisasi 44 indikator persentase kosmetik yang memenuhi syarat di BBPOM di Surabaya dan 3 balai lain yang setara berada **diatas target nasional 92%**.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Persentase kosmetik yang memenuhi syarat pada tahun 2018 telah berhasil mencapai target yang ditetapkan. Dari 1376 sampel kosmetik yang diperiksa, sebanyak 18 sampel TMS pengujian laboratorium. Sampel kosmetik yang diuji Balai Besar POM di Surabaya berasal dari hasil sampling Balai Besar POM di Surabaya dan Direktorat Pengawasan Kosmetik (sebanyak 5% dari total sampel). Dari 18 sampel yang TMS Pengujian, 10 sampel (56%) berasal dari Direktorat Pengawasan Kosmetik (produksi non Jawa Timur) dan 8 sampel (44%) dari sampling Balai (1 sampel produksi Jawa Timur). Sehingga persentase sampel memenuhi ketentuan tidak dapat menggambarkan persentase kosmetik memenuhi ketentuan yang beredar di Jawa Timur.

Tingginya capaian sampel kosmetik yang memenuhi syarat disebabkan oleh perbedaan cara pengukuran dibandingkan dengan komoditi lainnya. Untuk tahun 2018, pemeriksaan sampel kosmetik tidak memperhitungkan penandaan label, sampel tanpa ijin edar, kadaluarsa dan rusak. Perubahan cara pengukuran pemeriksaan sampel kosmetik akan diterapkan sepenuhnya pada tahun 2019, sehingga target sampel kosmetik yang memenuhi syarat menurun di tahun 2019 dari 92% menjadi 80%.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target persentase kosmetik yang memenuhi syarat, antara lain:

- Penerapan sanksi (proses *projustitia* maupun non *projustitia*) sesuai ketentuan yang berlaku terhadap 7 sarana kosmetik yang melakukan pelanggaran antara lain memproduksi kosmetika mengandung bahan berbahaya, menjual kosmetika tanpa izin edar, menjual kosmetika yang sudah ditarik dari peredaran.
- Pengawasan terhadap 76 sarana produksi kosmetika, dan 185 sarana distribusi kosmetika, serta evaluasi DIP (Dokumen Informasi Produk) yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan sehingga meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan penerapan CPKB semakin baik, sehingga dapat meningkatkan prosentase kosmetika yang memenuhi standar.
- Peningkatan koordinasi dengan Badan POM terkait hasil produk kosmetik TMS pengujian.
- Penyebaran informasi melalui penyuluhan, leaflet, brosur, pameran, talk show, media masa baik cetak maupun elektronik terhadap penggunaan dan pemilihan kosmetika yang aman dan bermutu kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih berhati-hati dalam memilih kosmetika.
- Kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) tentang Keamanan Produk kosmetik yang dihadiri oleh 1500 orang di Kabupaten Bojonegoro, dan 1478 orang di Kabupaten Tuban
- Pembinaan kepada pelaku usaha telah dilakukan kepada 22 pelaku usaha kosmetik. Melalui pendampingan secara berkesinambungan, diharapkan produsen kosmetik tersebut dapat menerapkan aspek – aspek CPKB secara bertahap.

g. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja periode 2015-2017, telah dilakukan proses reviu indikator kinerja utama (IKU) persentase kosmetik yang memenuhi syarat. Perubahan yang dilakukan adalah perubahan dalam alur pemeriksaan kosmetik yang dimulai dari sampling hingga pengujian. Sampling dilakukan tidak hanya sebatas jenis kosmetik yang diuji petik dalam pengawasan, tetapi mencakup keseluruhan jenis kosmetik yang beredar dan menjadi kewenangan pengawasan BBPOM di Surabaya. Ruang lingkup indikator tersebut tidak hanya mencakup hasil pengujian saja, tetapi juga mencakup produk yang tidak memiliki nomor izin edar (NIE)/ produk ilegal termasuk palsu, tidak memenuhi ketentuan label/penandaan, produk kedaluwarsa, dan produk rusak. Namun, perubahan ini berlaku mulai tahun 2019.

5. Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Jawa Timur

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2018

Tabel 17. Realisasi Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat tahun 2018

Tabel 17. Realisasi Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat di Provinsi Jawa Timur	82%	100%	121.95%	Memuaskan

Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat di Provinsi Jawa Timur diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{Suplemen Kesehatan MS} = 100\% - \% \text{Suplemen Kesehatan TMS}$$

$$\% \text{Suplemen Kesehatan TMS} = (\text{sampel Suplemen Kesehatan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan atau TMK label/penandaan}) \text{ dibagi total sampling} \times 100\%$$

Capaian persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat di Provinsi Jawa Timur tahun 2018 sudah **melebihi target** yang ditetapkan yaitu 121,95% dengan kriteria “memuaskan”.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2018 dengan tahun 2017/2016

Perbandingan realisasi dan capaian persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat di Provinsi Jawa Timur tahun 2018 dengan tahun 2017/2016 **tidak bisa dilakukan** karena adanya perubahan dalam alur pemeriksaan suplemen kesehatan yang dimulai dari sampling hingga pengujian. Sampling dilakukan tidak hanya sebatas jenis suplemen kesehatan yang diuji petik dalam pengawasan, tetapi mencakup keseluruhan jenis suplemen kesehatan yang beredar di Provinsi Jawa Timur. Ruang lingkup indikator tersebut tidak hanya mencakup hasil pengujian saja, tetapi juga mencakup produk yang tidak memiliki nomor izin edar (NIE)/ produk ilegal termasuk palsu, tidak memenuhi ketentuan label/penandaan, produk kedaluwarsa, dan produk rusak.

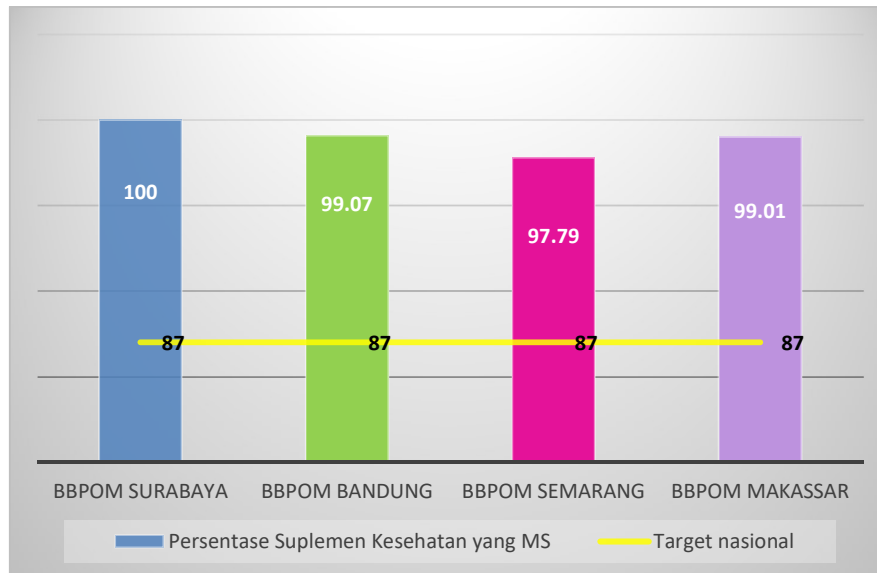
c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dengan target 2019 dalam Renstra OTK baru

Tabel 18. Realisasi Kinerja Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat tahun 2018 dengan target 2019

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat di Provinsi Jawa Timur	87%	100%	114.94%	Memuaskan

Realisasi kinerja persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat di Provinsi Jawa Timur tahun 2018 sudah **melebihi target Renstra 2019**, capaiannya adalah 114,94% dengan kriteria “memuaskan”.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dengan Balai lain yang sejenis/setara



Gambar 15. Perbandingan realisasi persentase obat tradisional yang MS tahun 2018 dengan Balai lain

Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa realisasi indikator persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat di BBPOM di Surabaya dan 3 balai lain yang setara berada **diatas target nasional 87%**. BBPOM di Surabaya mempunyai realisasi yang paling tinggi dibandingkan 3 balai lainnya yang setara.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dari 230 sampel suplemen kesehatan yang diperiksa semuanya memenuhi syarat. Realisasi persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat pada tahun 2015,2016, 2017 dan 2018 adalah 100%. Penyebab tidak adanya perubahan realisasi tahun 2018 dari tahun sebelumnya antara lain belum adanya pengembangan parameter kritis pengujian produk suplemen kesehatan. Apabila dibandingkan dengan target capaian tahun 2019 (akhir periode Renstra 2015-2019) maka diprediksi akan terpenuhi atau melebihi target (83%) yang direncanakan.

Hal lain yang perlu dikembangkan terkait dengan pengawasan adalah :

- pengembangan metode analisis untuk jenis sediaan jelly/gummy, dan sediaan lepas lambat (sustained release) kepada Pusat Riset Obat dan Makanan dan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional

- Kaji ulang terhadap kriteria parameter kritis pengujian suplemen kesehatan pada Pedoman Prioritas Sampling

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat antara lain :

- Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi suplemen kesehatan sesuai dengan pedoman inspeksi yang diterbitkan oleh Badan POM.
- Penyebaran informasi melalui penyuluhan, leaflet, brosur, pameran, talk show, media masa baik cetak maupun elektronik terhadap penggunaan dan pemilihan kosmetika yang aman dan bermutu kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih berhati-hati dalam memilih supleme kesehatan.
- Peningkatan kompetensi petugas sampling dan pengujian melalui pelatihan internal akan berpegaruh dalam peningkatan kualitas sampling suplemen kesehatan dan identifikasi sampel suplemen kesehatan yang diambil.
- Hal lain yang perlu dikembangkan terkait dengan pengawasan adalah:
- Pengajuan pengembangan metode analisis untuk jenis sediaan jelly/gummy, dan sediaan lepas lambat (sustained release) kepada Pusat Riset Obat dan Makanan dan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional.
- Kaji ulang terhadap kriteria parameter kritis pengujian suplemen kesehatan pada Pedoman Prioritas Sampling.
- Adanya peraturan perundangan yang lebih tegas terkait pengawasan produk Suplemen Kesehatan.

g. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja periode 2015-2017, telah dilakukan proses reuiu indikator kinerja utama (IKU) persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat. Perubahan yang dilakukan adalah perubahan dalam alur pemeriksaan suplemen kesehatan yang dimulai dari sampling hingga pengujian. Sampling dilakukan tidak hanya sebatas jenis suplemen kesehatan yang diuji petik dalam pengawasan, tetapi mencakup keseluruhan jenis suplemen kesehatan yang beredar dan menjadi kewenangan pengawasan BBPOM di Surabaya. Ruang lingkup indikator tersebut tidak hanya mencakup hasil pengujian saja, tetapi juga mencakup produk yang tidak memiliki nomor izin edar (NIE)/ produk indikator termasuk palsu, tidak memenuhi ketentuan label/penandaan, produk kedaluwarsa, dan produk rusak.

6. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Jawa Timur

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2018

Tabel 19. Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase makanan yang memenuhi syarat di Provinsi Jawa Timur	89,6%	92.15%	102.84%	Memuaskan

Persentase makanan yang memenuhi syarat di Provinsi Jawa Timur diperoleh dengan rumus :

$$\text{Persentase Makanan yang memenuhi syarat} = (\text{Makanan yang MS pada tahun berjalan pada tahun berjalan dibagi Jumlah seluruh sampel Makanan yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan (n)}) \times 100\%$$

Capaian persentase makanan yang memenuhi syarat di Provinsi Jawa Timur tahun 2018 sudah **melebihi target** yang ditetapkan yaitu 102,84% dengan kriteria “memuaskan”.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2018 dengan tahun 2017/2016

Perbandingan realisasi dan capaian persentase makanan yang memenuhi syarat di Provinsi Jawa Timur tahun 2018 dengan tahun 2017/2016 **tidak bisa dilakukan** karena adanya perubahan dalam alur pemeriksaan makanan yang dimulai dari sampling hingga pengujian. Sampling dilakukan tidak hanya sebatas jenis makanan yang diuji petik dalam pengawasan, tetapi mencakup keseluruhan jenis makanan yang beredar di Provinsi Jawa Timur. Ruang lingkup indikator tersebut tidak hanya mencakup hasil pengujian saja, tetapi juga mencakup produk yang tidak memiliki nomor izin edar (NIE)/ produk ilegal termasuk palsu, produk kedaluwarsa, dan produk rusak.

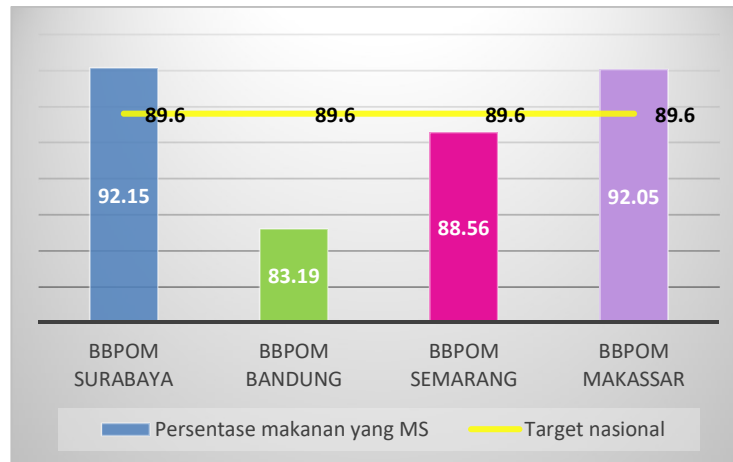
c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dengan target 2019 dalam Renstra OTK baru

Tabel 20. Realisasi Kinerja Persentase makanan yang Memenuhi Syarat tahun 2018 dengan target 2019

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase makanan yang memenuhi syarat di Provinsi Jawa Timur	89.6%	92.15%	129.78%	Tidak dapat disimpulkan

Realisasi kinerja persentase makanan yang memenuhi syarat di Provinsi Jawa Timur tahun 2018 sudah **melebihi target Renstra 2019**, capaiannya adalah 129,78% dengan kriteria “tidak dapat disimpulkan”, karena diatas 125%

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dengan Balai lain yang sejenis/setara



Gambar 16. Perbandingan realisasi persentase makanan yang MS tahun 2018 dengan Balai lain

Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa realisasi indikator persentase makanan yang memenuhi syarat di BBPOM di Surabaya dan BBPOM di Makassar **dias target nasional** sedangkan BBPOM di Bandung dan BBPOM di Semarang berada dibawah target nasional.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian persentase makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2018 berhasil memenuhi target yang telah ditetapkan. Dari 1350 sampel yang diperiksa, sebanyak 103 sampel TMS pengujian laboratorium, 70 sampel merupakan produk Jawa Timur dan 3 sampel tanpa ijin edar. TMS pengujian laboratorium antara lain sebanyak 14,5% pada jenang, 16,5% pada minyak kelapa sawit, dan 18,4% pada garam. Jenis makanan yang disampling sesuai kategori pada Pedoman Sampling yang ditetapkan oleh Badan POM meliputi produk susu dan analognya; lemak, minyak dan emulsi minyak; es untuk dimakan; buah dan sayur; kembang gula/permen dan coklat; sereal; produk bakeri; daging dan produk olahannya; ikan dan produk olahannya; telur dan produk olahannya; pemanis, madu; garam, rempah, sup, saos, salad; produk pangan untuk keperluan gizi khusus, minuman; makanan ringan siap santap pangan campuran (komposit); makanan spesifik daerah, pangan jajanan anak sekolah, pangan DNA dan kemasan pangan. Tingginya persentase makanan yang memenuhi syarat disebabkan oleh perbedaan pengukuran dengan komoditi lainnya sesuai pedoman. Pada sampel makanan, penandaan label makanan tidak termasuk dalam pengukuran. Bila penandaan label sampel makanan dimasukkan dalam

pengukuran maka realisasi persentase makanan yang memenuhi syarat hanya 61,63% dan tidak mencapai target.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Keberhasilan capaian target indikator tahun 2018 antara lain disebabkan oleh :

- Intervensi pemenuhan persyaratan pengawasan *pre-market* dan *post-market* terhadap sarana produksi pangan dengan registrasi MD berakibat pada meningkatnya tingkat kepatuhan produsen dalam memenuhi persyaratan CPPB (Cara Produksi Pangan yang Baik), sehingga mutu pangan yang dihasilkan meningkat dan produk pangan yang dihasilkan memenuhi persyaratan aman, bermutu dan bermanfaat.
- Penerapan sanksi administrasi maupun *projustitia* pada sarana produksi dan distribusi yang melakukan pelanggaran di bidang makanan.
- Peningkatan kompetensi personel pengujian sehingga dapat menguji lebih banyak parameter uji.
- Sosialisasi kepada masyarakat melalui Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman dilakukan pada saat Car Free Day di Surabaya di lokasi CFD Darmo dan di lokasi CFD Kembang Jepun dengan melibatkan 500 undangan dari lintas sektor dan pengunjung Car Free Day.
- KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) mengenai Keamanan Pangan dan Kemasan Pangan Yang Digunakan kepada 1000 orang penduduk Kabupaten Jember, 3000 orang penduduk Kabupaten Tulungagung, 2500 orang penduduk Kabupaten Blitar, 2000 penduduk Kabupaten Lumajang, 1000 orang penduduk Kabupaten Kediri

g. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja periode 2015-2017, telah dilakukan proses reuiu indikator kinerja utama (IKU) persentase makanan yang memenuhi syarat. Perubahan yang dilakukan adalah perubahan dalam alur pemeriksaan makanan yang dimulai dari sampling hingga pengujian. Sampling dilakukan tidak hanya sebatas jenis makanan yang diuji petik dalam pengawasan, tetapi mencakup keseluruhan jenis makanan yang beredar dan menjadi kewenangan pengawasan BBPOM di Surabaya. Ruang lingkup indikator tersebut tidak hanya mencakup hasil pengujian saja, tetapi juga mencakup produk yang tidak memiliki nomor izin edar (NIE)/ produk ilegal termasuk palsu, produk kedaluwarsa, dan produk rusak.

Dari pencapaian 6 target indikator pada sasaran strategis 1, maka dapat dihitung nilai pencapaian sarannya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya.

$$NPS = \frac{NPI\ 1 + NPI\ 2 + NPI\ 3 + NPI\ 4 + NPI\ 5 + NPI\ 6}{6}$$

$$NPS = \frac{91,71\% + 98,32\% + 110,40\% + 107,43\% + 121,95\% + 102,84\%}{6}$$

$$NPS = 105,44\%$$

Dengan Nilai NPS di atas 100%, maka BBPOM di Surabaya berhasil mencapai sasaran mewujudkan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Jawa Timur



Sasaran Strategis 2
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2

Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2018

Tabel 21. Realisasi Indeks Kepatuhan (Compliance Index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	60	75.5	125.83	Tidak dapat disimpulkan

Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan dihitung menggunakan metodologi statistik dan Analytical hierarchy process (AHP) untuk pembobotan indikator kinerja pembentuk indeks. Indeks ini dihitung berdasarkan capaian kinerja BPOM pada tahun n-1.

Kepatuhan merupakan suatu bentuk keberterimaan dalam melaksanakan berbagai aktivitas yang bersifat profit/non profit sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku terkait dengan Obat dan Makanan. Pelaku usaha obat dan makanan yang dihitung mencakup

produsen, distributor, 53ndicato, eksportir, pemilik sarana produksi dan distribusi, pedagang besar dan kecil yang memproduksi dan atau memperjualbelikan obat dan makanan.

Variabel penyusun indeks antara lain:

1. Hasil pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (GMP)
2. Hasil pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (GDP)
3. Hasil pemeriksaan sarana pelayanan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor yang memenuhi ketentuan

Capaian Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu 125,83% dengan kriteria “tidak dapat disimpulkan” karena di atas 125%. Namun demikian, dapat diketahui bahwa pembinaan yang dilakukan BBPOM di Surabaya kepada pelaku usaha telah berhasil meningkatkan kepatuhan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Surabaya

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2018 dengan tahun 2017/2016

Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya merupakan indikator yang baru diukur tahun 2018 berdasarkan Revisi Renstra 2015-2019 OTK baru, sehingga realisasi dan capaian tahun 2018 **belum bisa dibandingkan** dengan tahun sebelumnya.

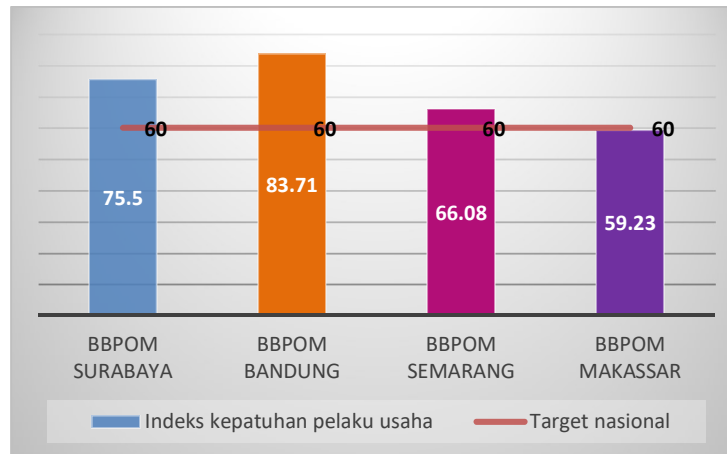
c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dengan target 2019 dalam Renstra OTK baru

Tabel 22. Realisasi Kinerja Indeks Kepatuhan (Compliance Index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya tahun 2018 dengan target 2019

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	61	75.5	123.77%	Memuaskan

Realisasi kinerja Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya di Provinsi Jawa Timur tahun 2018 sudah **melebihi target Renstra 2019**, capaiannya adalah 123,77% dengan kriteria “memuaskan”. Perlu ada reviu target di tahun 2019, karena realisasi sudah jauh melebihi target.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dengan Balai lain yang sejenis/setara



Gambar 17. Perbandingan Indeks kepatuhan (Compliance Index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya tahun 2018 dengan Balai lain

Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa realisasi Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya, BBPOM di Bandung, dan BBPOM di Semarang **didas target nasional** sedangkan realisasi BBPOM di Semarang di bawah target nasional.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang obat dan makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya adalah 75,5 dan mendapat peringkat 5 tertinggi di seluruh Indonesia. Hal ini didukung oleh hasil pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya. Pada tahun 2018, sarana produksi yang memenuhi ketentuan sebanyak 60,19% dan sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan sebesar 75,12%. Realisasi ini juga merupakan realisasi yang tertinggi diantara 3 Balai lain yang setara.

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha adalah :

- Pembinaan berupa layanan on site persetujuan denah dilakukan agar pelaku usaha dapat memahami pengaturan tempat produksi dan peraturan lain terkait obat dan makanan sebagai upaya penjaminan mutu produk.
- Layanan informasi bagi pelaku usaha yang akan mendaftarkan produk pangan, terutama untuk Industri Mikro, Kecil dan Menengah meliputi persyaratan registrasi, pemenuhan CPPPB termasuk penataan ruang dan pendampingan pelaku usaha.
- Membina hubungan baik dengan perkumpulan pengusaha seperti GP Farmasi, GP Jamu, Perkosmi dll sehingga lebih mudah untuk menyampaikan pembinaan kepada para pelaku usaha

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk menunjang nilai indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang obat dan makanan adalah :

- Pembinaan kepada pelaku usaha (regulatory assistance) telah dilakukan kepada 15 pelaku usaha obat tradisional, 15 pelaku usaha kosmetik, 305 pengusaha pangan pada saat petugas BBPOM di Surabaya melakukan audit dalam rangka rekomendasi pemenuhan aspek COTB untuk penerbitan surat ijin UKOT agar memenuhi persyaratan yang berlaku, pemenuhan aspek CPKB, rekomendasi pendaftaran produk pangan maupun dalam rangka rekomendasi ekspor agar memenuhi persyaratan yang berlaku.
- Pembinaan penerapan CPOTB secara bertahap kepada UMKM di Bidang Obat Tradisional telah dilakukan terhadap 24 pengusaha Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT). Melalui pendampingan secara berkesinambungan, diharapkan UKOT dapat menerapkan CPOTB khususnya aspek Higiene Sanitasi dan Dokumentasi. Melalui pembinaan yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kab/ Kota setempat, sebanyak 22 UKOT di wilayah Jawa Timur telah mendapatkan Surat Keterangan Pemenuhan Aspek (SKPA) dengan rincian 20 UKOT mendapatkan SKPA Tahap I dan 2 UKOT mendapatkan SKPA Tahap II.
- Pembinaan penerapan CPKB secara bertahap kepada UMKM di Bidang Kosmetik oleh petugas BBPOM di Surabaya telah dilakukan terhadap 7 industri kosmetik di Jawa Timur. Melalui pendampingan secara berkesinambungan, diharapkan 55ndicato kosmetik tersebut dapat menerapkan aspek – aspek CPKB secara bertahap. Dari 7 industri kosmetik yang telah melalui pendampingan, 6 sarana telah mendapatkan rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dengan rincian 3 sarana memenuhi aspek CPKB Tahap II dan 3 sarana memenuhi aspek CPKB Tahap III.

g. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Pada tahun 2018 telah dilakukan reuiu Renstra 2015-2019 seiring dengan terbentuknya OTK baru di BBPOM di Surabaya. Pada Renstra sebelumnya belum ada indikator yang tepat untuk mengukur kepatuhan pelaku usaha sesuai dengan misi kedua BBPOM di Surabaya yaitu “Mendorong kapasitas dan komitmen pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan”. Setelah dilakukan reuiu pada Renstra, didapatkan indikator baru yaitu indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan yang dianggap dapat mengukur kinerja BBPOM di Surabaya dalam meningkatkan jaminan keamanan Obat dan Makanan.



Sasaran Strategis 3
Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman
di wilayah kerja BBPOM di Surabaya

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3

Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Surabaya

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2018

Tabel 23. Realisasi Indeks Kepatuhan (Compliance Index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	60	76.68	127,80%	Tidak dapat disimpulkan

Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Surabaya adalah nilai indeks yang diperoleh dari hasil survei terhadap pelaksanaan KIE yang telah dilakukan BBPOM di Surabaya.

Survei yang dilakukan bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat.

Capaian Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Surabaya sudah **melebihi target** yang ditetapkan yaitu 127,80% dengan kriteria “tidak dapat disimpulkan” karena di atas 125%. Namun demikian, dapat diketahui bahwa pelaksanaan KIE BBPOM di Surabaya **telah berhasil** meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Surabaya.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2018 dengan tahun 2017/2016

Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Surabaya merupakan indikator yang baru diukur tahun 2018 berdasarkan Revisi Renstra 2015-2019 OTK baru, sehingga realisasi dan capaian tahun 2018 **belum bisa dibandingkan** dengan tahun sebelumnya.

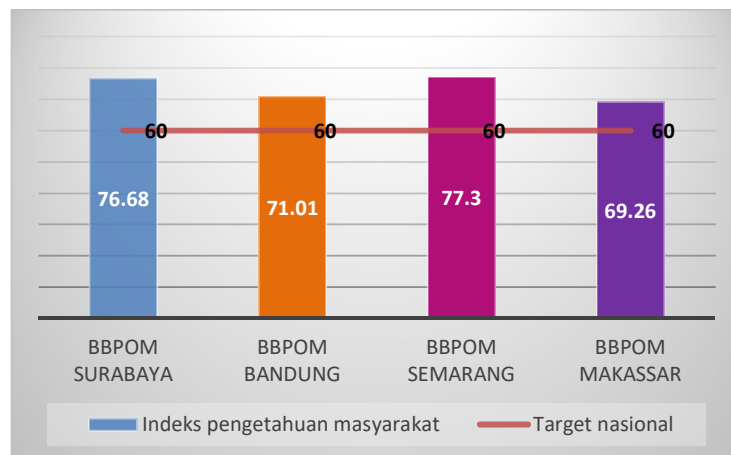
c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dengan target 2019 dalam Renstra OTK baru

Tabel 24. Realisasi Kinerja Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Surabaya tahun 2018 dengan target 2019

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	61	76.68	125.70%	Tidak dapat disimpulkan

Realisasi kinerja Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Surabaya di Provinsi Jawa Timur tahun 2018 sudah **melebihi target Renstra 2019**, capaiannya adalah 125,70% dengan kriteria “tidak dapat disimpulkan”. Perlu ada revaluasi target di tahun 2019, karena realisasi sudah jauh melebihi target.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dengan Balai lain yang sejenis/setara



Gambar 18. Perbandingan Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Surabaya tahun 2018 dengan Balai lain

Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa realisasi Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Surabaya dan 3 balai yang setara **didasar target nasional**. Realisasi kinerja BBPOM di Semarang paling tinggi diantara balai yang diperbandingkan.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Beberapa hal yang telah dilakukan oleh BBPOM di Surabaya hingga mendapatkan nilai Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman sebesar 76,68, antara lain :

- Dilakukan Kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi tentang Pemberantasan Obat Ilegal, Keamanan Obat Tradisional, Keamanan Produk Kosmetik, Keamanan Produk Pangan dan

Kemasan Pangan secara bersama-sama tokoh masyarakat dan lintas sektor terkait di wilayah Jawa Timur

- Dilakukan Kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi tentang Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman melalui Kegiatan *Car Free Day* yang terpusat di beberapa lokasi di Surabaya
 - Dilakukan kegiatan penyebaran informasi mengenai Obat, Obat Tradisional, Pangan, Suplemen Makanan, Kosmetik dan Bahan Berbahaya melalui penyampaian Iklan Layanan Masyarakat di radio, spanduk, *billboard*, *videotron*, *SMS Blast*, Media Sosial Instagram dan *Intagram Sponcored*, dan *talkshow* di media elektronik.
 - Dilakukan penyebaran informasi dengan menayangkan video edukasi dan pemberian media edukasi dalam bentuk *leaflet*, brosur tentang Obat, Obat Tradisional, Pangan, Suplemen Makanan, Kosmetik dan Bahan Berbahaya disetiap pertemuan yang dilakukan oleh BBPOM Surabaya dan di ruang tunggu konsultasi bagi konsumen yang melakukan konsultasi maupun pengaduan langsung
 - Dilakukan pertemuan dalam rangka kegiatan pengawalan Program Gerakan Keamanan Pangan Desa dengan penambahan komunitas yang baru dari setiap desa yang telah dilakukan intervensi di tahun sebelumnya.
 - Kegiatan penyebaran informasi mengenai Obat, Obat Tradisional, Pangan, Suplemen Makanan, Kosmetik dan Bahan Berbahaya dilakukan di semua komunitas dengan batasan umur mulai dari usia Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi dengan kegiatan Mobil Laboratorium Keliling, komunitas yang diberdayakan Ibu PKK, perangkat desa, penjual/kelompok ritel pangan/ PKL (Pegadang Kreasi Lapangan), Industri Pangan Rumah Tangga melalui program Gerakan Keamanan Pangan Desa, komunitas sekolah SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA melalui program Intervensi Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), komunitas Pramuka melalui program Pramuka SAPA (Sadar Pangan Aman) dalam kegiatan Kampung Kelir, dan komunitas Pasar Aman dari Bahan Berbahaya
 - Dilakukan pengembangan pelayanan publik meliputi layanan informasi dan pengaduan masyarakat bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menggunakan fasilitas di Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Banyuwangi. Kerjasama ini telah dilandasi dengan penandatanganan MoU antara Kepala Badan POM dengan Bupati Banyuwangi pada tahun 2018
- f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja
- Beberapa kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator nilai Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan adalah kegiatan layanan publik. Dari target layanan public sebanyak 18.000 layanan diperoleh realisasi sebesar 18.128 layanan atau 100,71%. Kegiatan tersebut antara lain :

Tabel 25. Perbandingan Jumlah dan Jenis Layanan Publik

NO	JENIS LAYANAN	JUMLAH 2015	JUMLAH 2016	JUMLAH 2017	JUMLAH 2018
1.	Layanan permintaan informasi dan pengaduan konsumen melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK)	1380	1.344	1.948	2.611
2.	Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	13	17	19	61
3.	Penyuluhan kepada masyarakat (bimtek, penyebaran informasi, talk show di TV, iklan di media cetak dan elektronik, permintaan narasumber)	365	422	358	468
4.	Pelayanan penerbitan Surat Keterangan Impor (SKI)	7.340	8.919	10.204	9.247
5.	Pelayanan penerbitan Surat Keterangan Ekspor (SKE)	1.719	3.899	4.865	4.852
6.	Pelayanan pengujian sampel pihak III (PNBP)	210	239	298	261
7.	Layanan audit sarana dalam rangka sertifikasi, permohonan ijin edar, labelisasi Halal, permohonan SKI/SKE, dan ijin produksi	346	472	663	517
8.	Penyebaran informasi di Loka Kediri	-	-	-	55
9.	Penyebaran informasi di Loka Kediri	-	-	-	56
Jumlah		11.373	15.312	18.355	18.128

Dari tabel jenis layanan yang dilakukan di BBPOM Surabaya pada tahun 2018 terdapat penurunan jumlah layanan dibanding tahun 2017. Penurunan terdapat pada layanan SKI dan SKE dan audit sarana kosmetik. Penurunan permohonan penerbitan Surat Rekomendasi Impor (SKI) sebagai dampak dari pemberlakuan Peraturan BPOM Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia mulai tanggal 21 Desember 2017. Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut maka barang impor dengan HS code yang sama dengan komoditi yang diawasi Badan POM namun untuk tujuan penggunaan bukan untuk Obat dan Makanan, tidak diterbitkan SKI. Menurunnya permohonan audit sarana dalam rangka ijin produksi kosmetika terjadi karena berlakunya Permenkes Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan maka Ijin Produksi Kosmetika berubah menjadi Sertifikat Produksi Kosmetika yang pada proses penerbitannya tidak melalui tahapan pemeriksaan sarana oleh Balai Besar/ Balai POM setempat. Kegiatan penyebaran informasi obat dan makanan pada seluruh komunitas dilakukan melalui :

- Penyebaran brosur, banner, poster, pemasangan billboard, pameran dan videotron di tempat-tempat strategis dan penayangan Iklan Layanan Masyarakat melalui media televisi dan radio, penyebaran informasi tentang obat dan makanan melalui SMS Blast dan media sosial Instagram dan Iklan *Sponsored* serta upaya mendorong peran aktif masyarakat dalam mencari informasi dan pengetahuan tentang obat dan makanan.

- Kegiatan penyebaran informasi mengenai Obat Tradisional, dan Kosmetik melalui penyampaian Iklan Layanan Masyarakat di radio di Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Trenggalek
- Penyuluhan dan penyebaran informasi tentang KIE Pemberantasan Obat ilegal kepada masyarakat sebanyak 500 orang penduduk Kabupaten Tulungagung, 500 orang Kabupaten Ponorogo, 1500 orang Kabupaten Pacitan, dan 500 orang Kabupaten Banyuwangi
- Kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) terkait Keamanan obat Tradisional telah dilakukan di Kabupaten Banyuwangi 1000 orang, Kabupaten Sidoarjo 1000 orang dan Kota Surabaya 1000 orang. Diharapkan masyarakat dapat berperan aktif melaporkan apabila menemukan peredaran obat tradisional ilegal dan mengandung BKO.
- Kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) tentang Keamanan Produk kosmetik yang dihadiri oleh 1500 orang di Kabupaten Bojonegoro, dan 1478 orang di Kabupaten Tuban .
- Sosialisasi kepada masyarakat melalui Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman dilakukan pada saat Car Free Day di Surabaya di lokasi CFD Darmo dan di lokasi CFD Kembang Jepun dengan melibatkan 500 undangan dari lintas sektor dan pengunjung Car Free Day.
- KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) mengenai Keamanan Pangan dan Kemasan Pangan Yang Digunakan kepada 1000 orang penduduk Kabupaten Jember , 3000 orang penduduk Kabupaten Tulungagung, 2500 orang penduduk Kabupaten Blitar, 2000 penduduk Kabupaten Lumajang, 1000 orang penduduk Kabupaten Kediri
- Program Intervensi Keamanan Pangan Jajanan di 10 Kabupaten Kota di Jawa Timur. Dengan target 25 sekolah yang akan mendapatkan Piagam Bintang Keamanan Pangan Sekolah di Jawa Timur. Dalam pelaksanaannya Balai Besar POM di Surabaya mampu melakukan program tersebut dan bisa mewujudkan 32 sekolah yang mendapat Piagam Bintang Keamanan Pangan Sekolah.
- hubungan koordinasi yang baik dengan lintas sector dan antusias masyarakat desa termasuk perangkat desa yang diintervensi. Dukungan masyarakat ditunjukkan dengan diterapkannya prinsip-prinsip Keamanan Pangan di desa yang diakui oleh BPOM dengan memberikan penghargaan sebagai Juara II Nasional Lomba Desa Pangan Aman untuk Desa Wates Kota Mojoketro yang telah diintervensi oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya sejak tahun 2015
- Setiap tahun BBPOM di Surabaya mempunyai target pemberdayaan 5 desa baru dan pengawasan desa-desa yang sudah diintervensi di tahun tahun sebelumnya. Desa yang telah diintervensi antara lain :

- Tahun 2014 : Desa di Kota Surabaya (Sidotopo, Kertajaya, Krembangan Selatan, Jambangan, Sememi, dan Ujung)
 - Tahun 2015 : Desa di Kabupaten Malang (Glanggang, Karangpandan, Pakisaji, Karangduren, Ngadilangukung, Panarukan, Sengguruh, Panggungrejo)
 - Tahun 2016 : Desa di Kabupaten Mojokerto (Kraggan, Purwotengah, Pulorejo, Wates, Kedundung)
 - Tahun 2017 : Desa di Kabupaten Lumajang (Pasirian, Condro, Jambekumbu, Kandangtepus, Burno)
 - Tahun 2018 : Desa di Kabupaten Jombang (Desa Mojotrisno, Desa Woonosalam, desa Ngoro, Desa Candimulyo, dan Desa Cukir)
 - Tahun 2019 : Desa di Kabupaten Tulungagung (Kelurahan Sembung, Desa Serut, Desa Soko, Desa Karangsono dan Desa Sambijajar)
- Sebagai upaya peningkatan keamanan, mutu dan gizi Pangan Jajajann Anak Sekolah di lingkungan sekolah dan pemberdayaan komunitas sekolah untuk memperkuat sistem manajemen keamanan pangan sekolah, Balai Besar POM melaksanakan Program Intervensi Keamanan Pangan Jajanan di 10 Kabupaten Kota di Jawa Timur. Dengan target 25 sekolah yang akan mendapatkan Piagam Bintang Keamanan Pangan Sekolah di Jawa Timur. Kegiatan Intervensi Pangan Jajanan Anak Sekolah dimulai dari tahapan Bimtek PJAS dengan target awal sebanyak 1319 sekolah, BBPOM di Surabaya dapat melakukan bimtek terhadap 1382 sekolah dikarenakan antusiasme sekolah yang sangat tinggi terhadap program tersebut. Pencapaian akhir dari program tersebut Balai Besar POM di Surabaya mampu melakukan program tersebut dan bisa mewujudkan 32 sekolah dari target awal 25 sekolah yang mendapat Piagam Bintang Keamanan Pangan Sekolah
 - Balai Besar POM di Surabaya juga melakukan kegiatan intervensi Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya baik melalui kegiatan penyuluhan pasar, bimtek petugas pasar dan monitoring evaluasi dari sampel yang dijual di pasar tersebut yang diduga mengandung bahan berbahaya. Pembentukan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya terdiri dari Pasar PON di Kabupaten Blitar, Pasar Tambahrejo di Kota Surabaya, Pasar Minulyo di Kabupaten Pacitan , Pasar Madyopuro di Kota Malang, Pasar Ngemplak di Tulungagung, Pasar Batu di Kota Batu, Pasar Sugihwaras di Kabupaten Bojonegoro, Pasar Sukapura di Kabupaten Probolinggo, Pasar Senduro di Kabupaten Lumajang
- g. **Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya**
Pada tahun 2018 telah dilakukan reuiu Renstra 2015-2019 seiring dengan terbentuknya OTK baru di BBPOM di Surabaya. Pada Renstra sebelumnya indikator untuk mengukur peningkatan

pengetahuan masyarakat adalah jumlah layanan publik yang dilakukan. Indikator ini masih belum menggambarkan tingkat pengetahuan masyarakat sehingga dilakukan reviu Renstra dan didapatkan indikator baru yaitu Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Surabaya yang dianggap dapat mengukur kinerja BBPOM di Surabaya dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya.



Sasaran Strategis 4
Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Jawa Timur

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4

I. Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Jawa Timur

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2018

Tabel 26. Realisasi Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di provinsi Jawa Timur tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Jawa Timur	100	100	100%	Memuaskan

Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Jawa Timur diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar} = (\text{Jumlah sampel yang diuji dengan parameter uji yang tercantum dalam standar dibagi sampel yang harus diuji}) \times 100\%$$

Standar yang dipakai adalah parameter uji kritis (wajib) yang tercantum dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan.

Capaian persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Jawa Timur sudah **mencapai target** yang ditetapkan yaitu 100% dengan kriteria “memuaskan”. Sehingga dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan pengujian laboratorium BBPOM di Surabaya **telah berhasil** memenuhi standar yang ditetapkan Badan POM.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2018 dengan tahun 2017/2016

Tabel 27. Realisasi Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2018

INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2015	REALIASI 2016	REALISASI 2017	REALISASI 2018
Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Jawa Timur	100%	100%	100%	100%

Realisasi persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Jawa Timur sejak tahun 2015 hingga tahun 2018 adalah 100%, hal ini menunjukkan bahwa BBPOM di Surabaya **berhasil mempertahankan** kualitas pengujian laboratorium untuk selalu sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Badan POM.

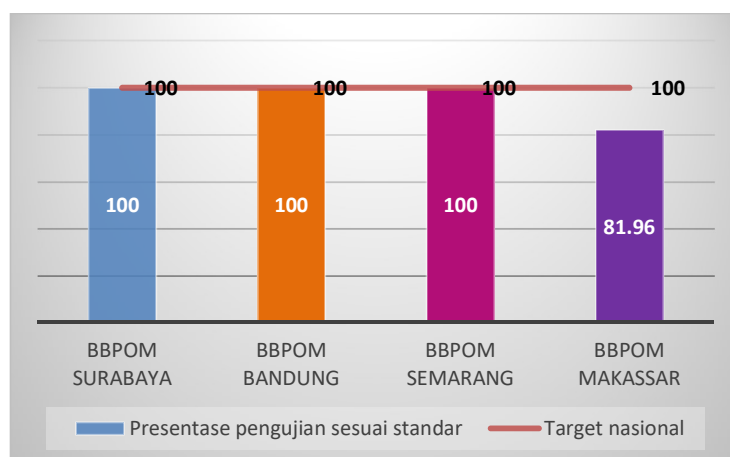
c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dengan target 2019 dalam Renstra OTK baru

Tabel 28. Perbandingan Realisasi Kinerja Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Jawa Timur tahun 2018 dengan target 2019

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Jawa Timur	100	100	100	Memuaskan

Realisasi kinerja Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Jawa Timur tahun 2018 sudah **mencapai target Renstra 2019**, capaiannya adalah 100% dengan kriteria “memuaskan”.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dengan Balai lain yang sejenis/setara



Gambar 19. Perbandingan persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa realisasi persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Jawa Timur sudah **mencapai target nasional**.

- e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian persentase pemenuhan pengujian sesuai standar pada tahun 2018 berhasil mencapai target 100%. Dari 4.503 sampel yang diujikan di laboratorium semua telah dapat diuji dengan 25.529 parameter uji kimia dan 6.590 parameter uji mikrobiologi.

Tabel 29. Pengujian sampel obat dan makanan tahun 2018

No	KOMODITI	TARGET SAMPEL	TARGET SAMPEL	TARGET PARAMETER UJI	REALISASI PARAMETER UJI	CAPAIAN
KIMIA						
1	Pangan	1347	1347	8486	8486	100
2	Kosmetik	1374	1374	8256	8256	100
3	Obat Tradisional	688	688	4371	4371	100
4	Suplemen Kesehatan	230	230	1184	1184	100
5	Obat	864	864	3232	3232	100
MIKROBIOLOGI						
1	Pangan	1081	1081	2159	2159	100
2	Kosmetik	88	88	2575	2575	100
3	Obat Tradisional	220	220	1630	1630	100
4	Suplemen Kesehatan	49	49	142	142	100
5	Obat	160	160	84	84	100
JUMLAH						100

BBPOM Surabaya berhasil mempertahankan pemenuhan parameter pengujian sesuai standar yang telah ditetapkan Badan POM dibuktikan dengan pencapaian 100% sejak tahun 2015. Hal ini disebabkan karena BBPOM Surabaya selalu berupaya untuk menerapkan sistem manajemen mutu sesuai ISO 17025:2017, meningkatkan kompetensi personil, pemenuhan peralatan dan sarana prasarana laboratorium sesuai dengan standar minimum peralatan laboratorium yang telah ditetapkan.

- f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Program Kegiatan yang dilakukan oleh BBPOM Surabaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja adalah :

- mengikuti pelatihan internal, eksternal dan kegiatan magang untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi dari personil uji, pelatihan internal yang diselenggarakan oleh BBPOM di Surabaya dan pelatihan eksternal diselenggarakan oleh PPOMN Badan POM RI diikuti oleh sebanyak 62 orang.

- mengikuti Program Uji Profisiensi/Uji Kolaborasi yang merupakan suatu program evaluasi kinerja laboratorium kalibrasi/pengujian terhadap kriteria yang telah ditetapkan sesuai kompetensinya, baik dari provider internal oleh P3OMN Badan POM RI maupun dari eksternal oleh KAN-BSN sebanyak 12 kali dan uji Kolaborasi 1 kali
 - melakukan Verifikasi Metode Analisa yang bertujuan untuk membuktikan bahwa metode analisa yang digunakan menghasilkan uji yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan sebanyak 47 metode
 - program Kalibrasi Alat laboratorium yang dilakukan secara berkala setiap tahun yang bertujuan untuk menjamin peralatan memberikan hasil pengukuran sesuai dengan standar Nasional maupun Internasional dan untuk menjaga kondisi peralatan yang digunakan tetap sesuai dengan spesefikasinya.
 - Penerapan Sistem Mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015, yang merupakan pengakuan pihak ketiga terhadap kompetensi laboratorium dalam melakukan kegiatan pengujian
 - Pemanfaatan Alat laboratorium dan Sarana Prasarana laboratorium secara maksimal.
- g. **Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya**

Tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya adalah, telah dilakukan:

1. Pengadaan alat laboratorium (ICP-MS untuk Laboratorium Pangan dan Air) dan sarana prasarana laboratorium dengan memperhatikan standard minimum peralatan laboratorium.
2. Meningkatkan penerapan sistem manajemen mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015 secara konsisten.

Kendala operasional laboratorium tahun 2018, adalah terbatasnya anggaran pemeliharaan alat laboratorium sehingga perlu adanya penataan ulang program pemeliharaan alat bekerjasama dengan pihak 3 (vendor) sehingga ada jaminan alat dapat bekerja sesuai fungsinya.

2. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2018

Tabel 30. Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	60	60.19	100,32%	Memuaskan

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan : (Jumlah Sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dibagi target jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa) x 100%

Sarana Produksi yang diperiksa meliputi sarana produksi obat, bahan baku obat, produk biologi dan sarana khusus (misalnya: unit transfusi darah, fasilitas radiofarmaka, laboratorium sel punca dan rumah sakit), IOT, UKOT, UMOT, Industri Kosmetik golongan A dan B, MD dan IRTP/UMKM. Makna dari memenuhi ketentuan adalah tidak ada temuan kritikal atau lebih dari 5 temuan major atau level B (produksi pangan) pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindaklanjutnya berupa perbaikan.

Capaian persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya sudah **mencapai target** yang ditetapkan yaitu 100,32% dengan kriteria “memuaskan”. Sehingga dapat dinyatakan bahwa sebanyak 60,19% sarana produksi obat dan makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya **telah berhasil** memenuhi persyaratan produksi yang ditetapkan Badan POM.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2018 dengan tahun 2017/2016

Penetapan definisi operasional baru sesuai Reviu Renstra 2015-2019 tentang kriteria memenuhi ketentuan pada pemeriksaan sarana produksi obat dan makanan menyebabkan realisasi tahun 2018 tidak terbandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun sebelumnya jumlah sarana tidak memenuhi ketentuan cukup banyak dan menurun secara signifikan pada tahun 2018 karena perubahan definisi operasional.

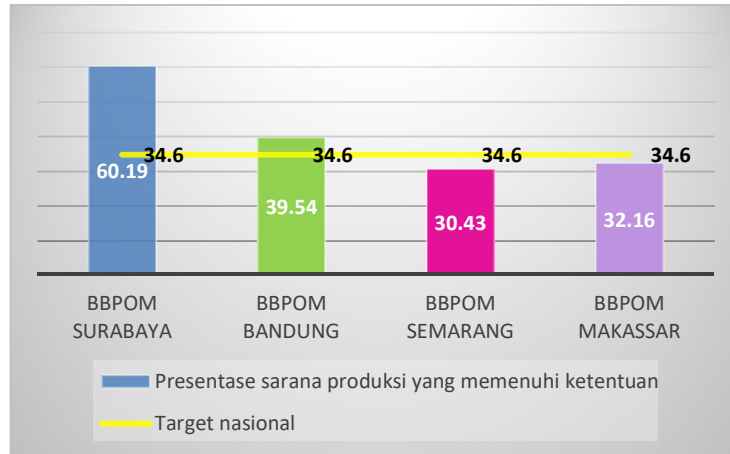
c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dengan target 2019 dalam Renstra OTK baru

Tabel 31. Perbandingan Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya tahun 2018 dengan target 2019

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	65%	60,19%	92,60%	Cukup

Realisasi kinerja Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya tahun 2018 **belum mencapai target Renstra 2019**, capaiannya yaitu 92,60 % dengan kriteria “cukup” .

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dengan Balai lain yang sejenis/setara



Gambar 20. Perbandingan Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya tahun 2018 dengan Balai lain

Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa realisasi persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya **sudah melebihi target nasional**. BBPOM di Surabaya memiliki realisasi tertinggi dibandingkan 3 balai lainnya yang setara.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan sebesar 60,19% berhasil mencapai target yang ditentukan. Hasil pemeriksaan sarana produksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 32. Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan

No	SARANA PRODUKSI	JUMLAH SARANA YANG DIPERIKSA	HASIL PEMERIKSAAN	
			MK	TMK
1.	Industri Farmasi	25	23	2
2.	UTD PMI	5	5	0
3.	Industri Obat Tradisional	62	52	10
4.	Industri Kecil Otrad	62	52	10
5.	Industri Kosmetik	76	67	9
6.	Industri Pangan	367	213	154
7.	IRTP	83	12	71
TOTAL		618	372	246

Keberhasilan pencapaian target indikator persentase sarana produksi yang memenuhi ketentuan disebabkan oleh:

- Intervensi berkelanjutan pada sarana produksi obat tradisional, kosmetik dan pangan terhadap penerapan cara produksi yang baik.
- Pembelakuan CPKB bertahap mendorong sarana produksi kosmetik secara konsisten menerapkan cara produksi kosmetik yang baik untuk mendapatkan sertifikat CPKB.
- Penyuluhan dan peningkatan kompetensi serta pengetahuan secara berkelanjutan kepada pengusaha obat tradisional, kosmetik dan pangan terhadap standar yang ditetapkan .
- Adanya program *reward* (penghargaan) dari Badan POM kepada sarana pangan resiko tinggi (produk makanan kaleng, produk susu, produk olahan daging) yang memiliki sistem manajemen Resiko yang telah terqualifikasi yaitu dengan pemberian Piagam PMR (Program Manajemen Resiko). Reward yang diterima oleh sarana berupa tidak menjadi target inspeksi rutin dan sampling selama periode waktu tertentu.

Beberapa kendala dalam pemeriksaan sarana produksi obat dan makanan adalah terbatasnya tenaga pengawas di BBPOM di Surabaya sehingga kemampuan pengawasan terhadap seluruh sarana produksi di Provinsi Jawa Timur dalam satu tahun hanya mencapai 63% dari seluruh sarana produksi yang jumlahnya 981 sarana.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan pengawasan sarana produksi obat dan makanan yang dilaksanakan adalah pemeriksaan sarana industri farmasi, industri kecil obat tradisional (IKOT), industri obat tradisional (IOT), industri kosmetik, industri pangan, dan industri rumah tangga pangan (IRTP). Beberapa kegiatan lain yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja antara lain :

- Pelatihan peningkatan kompetensi petugas BBPOM di Surabaya, antara lain pelatihan inspektur CPOB junior, pelatihan inspektur CPOB senior, Bimbingan Teknis Pengawasan Peredaran Obat tradisional dan Suplemen Makanan. Dengan meningkatnya kompetensi petugas BBPOM di Surabaya, maka hasil pemeriksaan sarana produksi juga lebih berkualitas.
- Pembinaan kepada pelaku usaha (regulatory assistance), penerapan sanksi (proses projustitia maupun administratif) sesuai ketentuan yang berlaku terhadap sarana produksi obat dan makanan yang melakukan pelanggaran.
- Desk CAPA (corrective action preventive action) atas hasil pemeriksaan akan membantu pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan

g. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Indikator persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya merupakan hasil reuiu Renstra 2015-2019 OTK baru, indikator

sebelumnya yang mengukur efektifitas pengawasan obat dan makanan di level kegiatan adalah presentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan. Berdasarkan hasil rekomendasi, maka indikator ini diubah menjadi presentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan supaya lebih menggambarkan kinerja BBPOM di Surabaya.

3. Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2018

Tabel 33. Realisasi Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	75%	75.12%	100.16%	Memuaskan

Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan : (Jumlah Sarana distribusi obat diperiksa yang memenuhi ketentuan dibagi jumlah sarana distribusi obat yang diperiksa) x 100%

Sarana distribusi obat yang diperiksa meliputi sarana distribusi (PBF dan instalasi farmasi kabupaten/kota) dan sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Makna dari memenuhi ketentuan adalah tidak ada tindak lanjut temuan berupa sanksi peringatan keras, penghentian sementara kegiatan dan rekomendasi pencabutan izin.

Capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya sudah **mencapai target** yang ditetapkan yaitu 100,16% dengan kriteria “memuaskan”. Sehingga dapat dinyatakan bahwa sebanyak 75,12% sarana distribusi obat di wilayah kerja BBPOM di Surabaya **telah berhasil** memenuhi persyaratan produksi yang ditetapkan Badan POM.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2018 dengan tahun 2017/2016

Penetapan definisi operasional baru sesuai Reviu Renstra 2015-2019 tentang kriteria memenuhi ketentuan pada pemeriksaan sarana distribusi obat menyebabkan realisasi tahun 2018 tidak dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun sebelumnya jumlah sarana tidak

memenuhi ketentuan cukup banyak dan menurun secara signifikan pada tahun 2018 karena perubahan definisi operasional.

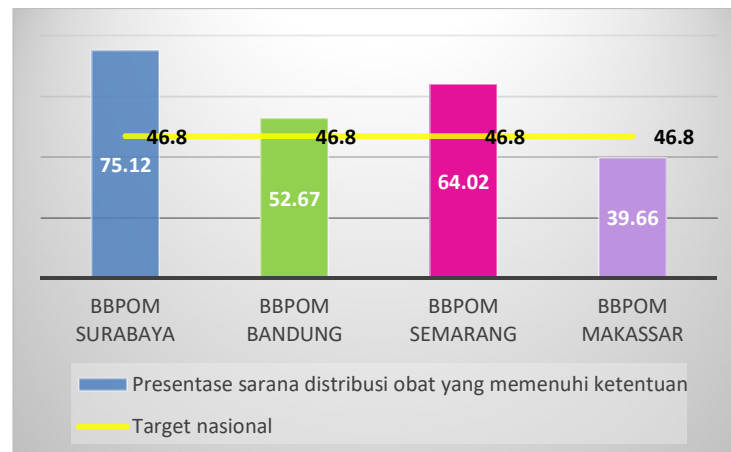
c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dengan target 2019 dalam Renstra OTK baru

Tabel 34. Perbandingan Realisasi Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya tahun 2018 dengan target 2019

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	77%	75,12%	97,55%	Cukup

Realisasi kinerja persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya tahun 2018 **belum mencapai target Renstra 2019**, capaiannya yaitu 97,55 % dengan kriteria “cukup”.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dengan Balai lain yang sejenis/setara



Gambar 21. Perbandingan Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya tahun 2018 dengan Balai lain

Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa realisasi persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya, BBPOM di Bandung, dan BBPOM di Semarang **sudah melebihi target nasional**. BBPOM di Surabaya memiliki realisasi tertinggi dibandingkan 3 balai lainnya yang setara, sedangkan BBPOM di Makassar memiliki realisasi terendah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sarana distribusi obat di wilayah kerja BBPOM di Surabaya lebih banyak yang memenuhi ketentuan atau patuh terhadap ketentuan yang berlaku dibandingkan Balai lainnya yang setara.

- e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

BBPOM di Surabaya berhasil mencapai target sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan.

Hasil pemeriksaan sarana distribusi obat adalah sebagai berikut :

Tabel 35. Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan

SARANA	BBPOM di Surabaya		LOKA KEDIRI		LOKA JEMBER		TOTAL		
	MK	TMK	MK	TMK	MK	TMK	MK	TMK	TOTAL
Apotek	94	19	10	7	9	15	113	41	154
Apotek-napza	10	-	8	1	3	1	21	2	23
GFK	33	-	2	-	3	-	38	0	38
Klinik	7	3	-	-	2	-	9	3	12
Klinik-napza	1	-	-	1	-	-	1	1	2
PBBF	-	1	-	-	-	-	0	1	1
PBF	114	71	-	-	2	1	116	72	188
PBF-napza	9	1	-	-	-	-	9	1	10
Puskesmas	48	-	2	-	6	-	56	0	56
RS	62	19	4	-	3	6	69	25	94
RS – napza607	5	-	4	-	1	-	10	0	10
Toko obat	13	5	-	-	1	-	14	5	19
TOTAL	396	119	30	9	30	23	456	151	607

Beberapa hal yang menunjang keberhasilan pencapaian target persentase distribusi obat yang memenuhi syarat adalah :

- Mulai diberlakukannya aturan yang mengharuskan PBF mempunyai sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), sehingga pihak sarana berupaya untuk memenuhi persyaratan CDOB yang ditetapkan secara maksimal.
 - Pembinaan kepada pelaku usaha (regulatory assistance), penerapan sanksi (proses projustitia maupun administratif) sesuai ketentuan yang berlaku terhadap sarana distribusi obat yang melakukan pelanggaran antara lain menjual produk obat yang tidak memenuhi ketentuan, serta menjual produk obat dan makanan yang sudah ditarik dari peredaran.
- f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja
- Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan antara lain :

- Pelatihan peningkatan kompetensi petugas BBPOM di Surabaya, antara lain Pelatihan CDOB bagi petugas Balai. Dengan meningkatnya kompetensi petugas BBPOM di Surabaya, maka hasil pemeriksaan sarana produksi juga lebih berkualitas.
- Pembinaan kepada pelaku usaha (regulatory assistance), penerapan sanksi (proses projustitia maupun administratif) sesuai ketentuan yang berlaku terhadap sarana distribusi obat yang melakukan pelanggaran.

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian adalah:

- Terbatasnya tenaga pengawas di BBPOM di Surabaya sehingga hanya bisa mengawasi 24,19% dari seluruh sarana distribusi yang ada di Jawa Timur yang jumlahnya 6.200 sarana
- g. **Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya**

Indikator persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya merupakan hasil reuvi Renstra 2015-2019 OTK baru, indikator sebelumnya yang mengukur efektifitas pengawasan obat dan makanan di level kegiatan adalah presentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan. Berdasarkan hasil rekomendasi, maka indikator ini diubah menjadi pesentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan supaya lebih menggambarkan kinerja BBPOM di Surabaya.

4. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Jawa Timur

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2018

Tabel 36. Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu Di Provinsi Jawa Timur tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Jawa Timur	82%	90.75%	110.67%	Memuaskan

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Jawa Timur diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Jawa Timur : (keputusan penilaian sertifikasi pada tahun berjalan dan carry over tahun sebelumnya yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah permohonan penilaian sertifikasi pada tahun berjalan) x 100%

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup surat hasil pemeriksaan atau surat rekomendasi atau surat pemberhentian proses penilaian sarana produksi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Pangan Olahan dalam pendaftaran produk, pemeriksaan PBF dalam rangka sertifikasi CDOB, penerbitan SKI/SKE obat, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Pangan Olahan.

Capaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Jawa Timur sudah **mencapai target** yang ditetapkan yaitu 110,67% dengan kriteria “memuaskan”. Sehingga dapat dinyatakan bahwa sebanyak 90,75% pengajuan sertifikasi pada BBPOM di Surabaya **telah berhasil** diselesaikan tepat waktu.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2018 dengan tahun 2017/2016

Tabel 37. Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu Di Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2018

INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2017	REALISASI 2018
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Jawa Timur	88,38%	90,75%

Berdasarkan tabel di atas realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Jawa Timur tahun 2018 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan peningkatan kinerja dalam hal penilaian sertifikasi di Balai Besar POM di Surabaya

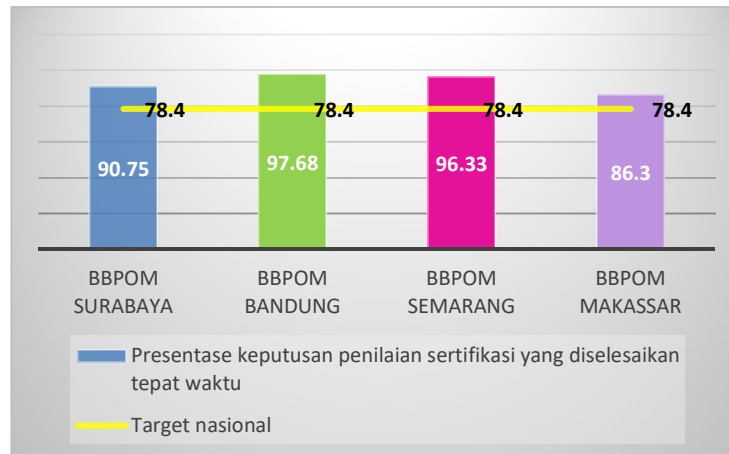
c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dengan target 2019 dalam Renstra OTK baru

Tabel 38. Perbandingan Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu di Provinsi Jawa Timur tahun 2018 dengan target 2019

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Jawa Timur	85%	90,75%	106,76%	Memuaskan

Realisasi kinerja persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Jawa Timur tahun 2018 **belum mencapai target Renstra 2019**, capaiannya yaitu 106,76 % dengan kriteria “cukup”.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dengan Balai lain yang sejenis/setara



Gambar 22. Perbandingan Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Jawa Timur tahun 2018 dengan Balai lain

Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Jawa Timur dan balai lain yang setara **sudah melebihi target nasional.**

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu merupakan jaminan kepastian pelayanan yang diberikan oleh Balai Besar POM di Surabaya kepada pelaku usaha. Dalam memberikan keputusan penilaian sertifikasi yang meliputi surat rekomendasi dan surat hasil pemeriksaan produksi/ distribusi dalam rangka pendaftaran produk Obat dan Makanan maupun ijin produksi, BBPOM di Surabaya telah menetapkan batas waktu dari mulai dilakukannya proses penilaian hingga penerbitan surat rekomendasi/ surat hasil pemeriksaan tersebut, yaitu 14 hari kerja. Sedangkan dalam rangka penerbitan Surat Keterangan Impor (SKI)/ Surat Keterangan Ekspor (SKE) Obat dan Makanan telah ditetapkan *Service Level Arrangement (SLA)* maksimal 1 hari kerja untuk SKI dan 2 hari kerja untuk SKE.

Pemenuhan batas waktu dalam memberikan keputusan penilaian sertifikasi dapat terhambat dengan keterbatasan sumber daya manusia. Dengan semakin banyaknya permohonan penilaian sertifikasi yang masuk tidak diimbangi dengan penambahan jumlah SDM yang memadai menyebabkan keputusan penilaian sertifikasi diterbitkan melebihi batas waktu yang telah ditetapkan.

Namun dengan peningkatan kemampuan dan kompetensi serta efisiensi SDM yang tersedia, pencapaian realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 dapat melebihi target yang telah ditetapkan.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Beberapa kegiatan di tahun 2018 yang menunjang keberhasilan pencapaian target persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu adalah :

- Telah dilaksanakan pelatihan internal sertifikasi pada petugas sertifikasi dan bimbingan teknis/ sosialisasi terkait penilaian sertifikasi kepada pelaku usaha
- Telah dilakukan layanan penerbitan SKI/SKE, dan audit sarana dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 39. Layanan Sertifikasi tahun 2018

NO	JENIS LAYANAN	JUMLAH 2016	JUMLAH 2017	JUMLAH 2018
1.	Pelayanan penerbitan Surat Keterangan Impor (SKI)	8.919	10.204	9.247
2.	Pelayanan penerbitan Surat Keterangan Ekspor (SKE)	3.899	4.865	4.852
3.	Layanan audit sarana dalam rangka sertifikasi, permohonan ijin edar, labelisasi Halal, permohonan SKI/SKE, dan ijin produksi Obat dan Makanan	472	663	525
Jumlah		13.290	15.732	14.624

Penurunan permohonan penerbitan Surat Rekomendasi Impor (SKI) sebagai dampak dari pemberlakuan Peraturan BPOM Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia mulai tanggal 21 Desember 2017. Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut maka barang impor dengan HS code yang sama dengan komoditi yang diawasi Badan POM namun untuk tujuan penggunaan bukan untuk Obat dan Makanan, tidak diterbitkan SKI.

Menurunnya permohonan audit sarana dalam rangka ijin produksi kosmetika sebesar 76% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan ini terjadi karena sebagian besar industri kosmetik di Jawa Timur telah melakukan perpanjangan ijin produksi kosmetik pada tahun 2017. Selain itu, dengan berlakunya Permenkes Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan maka Ijin Produksi Kosmetika berubah menjadi Sertifikat Produksi Kosmetika yang pada proses penerbitannya tidak melalui

tahapan pemeriksaan sarana oleh Balai Besar/ Balai POM setempat. Hal ini juga menjadi salah satu penyebab penurunan permohonan audit sarana produksi kosmetik.

g. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Pada tahun 2018 telah dilakukan reuiu Renstra 2015-2019 seiring dengan terbentuknya OTK baru di BBPOM di Surabaya. Pada Renstra sebelumnya belum ada indikator yang tepat untuk mengukur kinerja pelaksanaan sertifikasi obat dan makanan dalam rangka pelayanan prima terhadap masyarakat. Setelah dilakukan reuiu pada Renstra, didapatkan indikator baru yaitu persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu yang dianggap dapat mengukur kinerja BBPOM di Surabaya dalam meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis resiko.

5. Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2018

Tabel 40. Realisasi Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	36.1%	37.78%	104.65%	Memuaskan

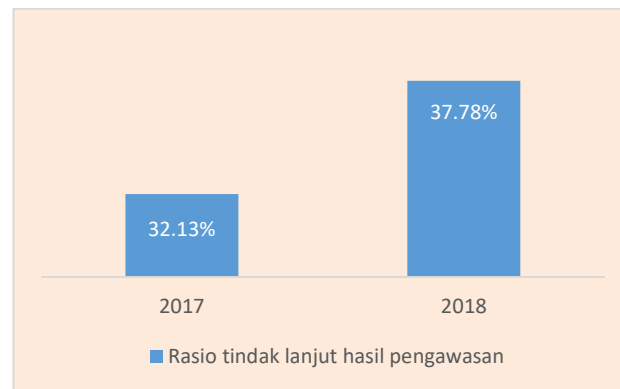
Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan} = (\text{Jumlah tindak lanjut/feedback dari pelaku usaha dan instansi terkait dibagi Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai kepada pelaku usaha dan instansi terkait}) \times 100\%$$

Yang dimaksud tindak lanjut adalah feedback/respon dari pelaku usaha atau instansi terkait terhadap rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai atas keputusan Kepala Balai/perintah dari Pusat. Rekomendasi adalah hasil pengawasan dihitung berdasarkan pelanggaran berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE, tindak lanjut kasus, misalnya hasil pemeriksaan sarana (pemeriksaan sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, dan pengaduan konsumen.

Capaian Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya **berhasil mencapai target** yang ditetapkan yaitu 104,65% dengan kriteria “memuaskan”. Sehingga dapat dinyatakan bahwa sebanyak 37,78% rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan Balai **telah berhasil** mendapat tindak lanjut/feedback dari pelaku usaha dan instansi terkait.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2018 dengan tahun 2017



Gambar 23. Realisasi Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya tahun 2017 dan 2018

Berdasarkan tabel di atas realisasi Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya meningkat dari tahun 2017 hingga tahun 2018, hal ini menunjukkan peningkatan respon baik dari sarana produksi dan distribusi obat dan makanan yang diperiksa maupun dari lintas sector terkait terhadap tindak lanjut pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM di Surabaya

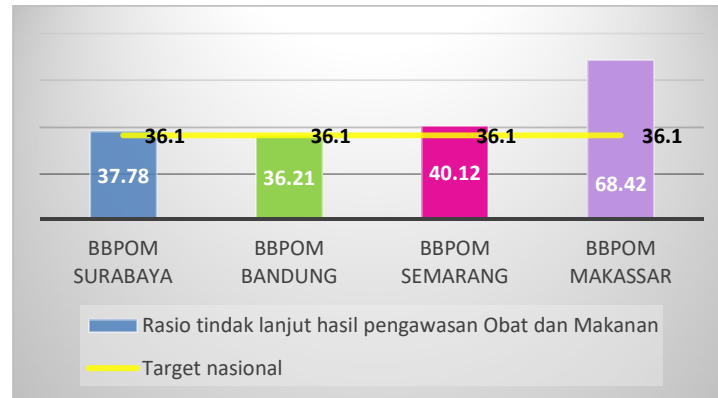
c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dengan target 2019 dalam Renstra OTK baru

Tabel 41. Perbandingan Realisasi Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya dengan target 2019

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	46,95%	37,78%	80,46%	Cukup

Realisasi Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya **belum mencapai target Renstra 2019**, capaiannya yaitu 80,46% dengan kriteria “cukup”.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dengan Balai lain yang sejenis/setara



Gambar 24. Perbandingan Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya tahun 2018 dengan Balai lain

Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa realisasi Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya dan balai lain yang setara **melebihi target nasional**.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Perhitungan rasio tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya dimulai pada tahun 2018. Data tahun 2018 menunjukkan angka tindak lanjut baik dari sarana diperiksa maupun dari instansi terkait cukup banyak dengan rasio melebihi target yang ditetapkan. Pola tindak lanjut pengawasan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan pada tahun 2018 telah diseragamkan dengan tindak lanjut langsung ke sarana diperiksa. Dengan demikian surat tindak lanjut dari instansi terkait semakin menurun jumlahnya.

Hal-hal yang mempengaruhi capaian rasio tindak lanjut pengawasan Obat dan Makanan adalah:

- Kerjasama yang baik dan adanya forum komunikasi yang terjalin erat dengan lintas sektor berakibat respon timbal balik yang sangat memadai terhadap hasil pemeriksaan dan temuan pengawasan BBPOM di Surabaya.
- Kesadaran sarana produksi dan distribusi untuk terus menerus melakukan perbaikan sebagai hasil pembinaan dari BBPOM di Surabaya

- Intervensi Badan POM dengan memberikan penyuluhan, KIE dan pelatihan teknis terkait pemenuhan standar mendorong pelaku usaha lebih responsif terhadap hasil pemeriksaan/tema BBPOM di Surabaya

f. **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja** Beberapa kegiatan pada tahun 2018 yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan adalah :

- Telah dilaksanakannya pertemuan Pengembangan dan Pemantapan Jejaring Pengawasan Obat Dan Makanan di Daerah yang mengundang seluruh dinas kesehatan di 38 kab/kota di Provinsi Jawa Timur yang memperkuat koordinasi dalam upaya peningkatan pengawasan Obat dan Makanan
- Telah dilaksanakannya evaluasi CAPA (Corrective Action Preventif Action) yang merupakan respon perbaikan hasil pemeriksaan dari sarana yang diperiksa.
- Telah dilakukan sosialisasi Inpres nomor 3 tahun 2017, tentang peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan yang mengharuskan BBPOM di Surabaya untuk berkoordinasi secara intens dengan Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Pemerintah Daerah mencakup Bupati, Walikota dan Gubernur.
- Sebanyak 38 Kabupaten/ Kota telah memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan
- Kerjasama lintas sektor dalam pengawasan makanan, antara lain Tim Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Makanan Ilegal (TKP2MI) dalam rangka hari raya, Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RADPG), Tim Pengawasan Barang Beredar Provinsi Jawa Timur, Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD), Tim Terpadu Pengawasan Bahan Berbahaya dalam Pangan Provinsi dan Kabupaten, Tim Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Ekspor Impor di Jawa Timur berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/181/KPTS/013/2016 tanggal 8 Maret 2016.
- Peningkatan kompetensi petugas dibidang pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan

Beberapa hal yang menjadi kendala dalam meningkatkan rasio tindak lanjut dari sarana maupun lintas sektor terkait adalah :

- Kesadaran yang masih cukup rendah dari pemilik sarana distribusi untuk memberikan respon berupa surat tindak lanjut perbaikan dari hasil pemeriksaan sarana yang telah dilakukan petugas BBPOM di Surabaya

- Beberapa sarana yang telah diperiksa sudah melakukan perbaikan namun tidak dilaporkan secara tertulis kepada petugas BBPOM di Surabaya sehingga tidak dapat diukur sebagai kinerja BBPOM di Surabaya
 - Belum ada peraturan yang mewajibkan setiap sarana distribusi obat dan makanan yang memiliki temuan saat diperiksa untuk membuat laporan perbaikan secara tertulis kepada petugas BBPOM di Surabaya
- g. **Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya**

Pada tahun 2018 telah dilakukan reviu Renstra 2015-2019 seiring dengan terbentuknya OTK baru di BBPOM di Surabaya. Pada Renstra sebelumnya belum ada indikator yang tepat untuk mengukur efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Setelah dilakukan reviu pada Renstra, didapatkan indikator baru yaitu rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan yang dianggap dapat mengukur kinerja BBPOM di Surabaya dalam meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis resiko.

Dari pencapaian 5 target indikator pada sasaran strategis 4, maka dapat dihitung nilai pencapaian sarannya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya.

$$NPS = \frac{NPI\ 1 + NPI\ 2 + NPI\ 3 + NPI\ 4 + NPI\ 5}{5}$$

$$NPS = \frac{100\% + 100,32\% + 100,16\% + 110,67\% + 104,65\%}{5}$$

$$NPS = 103,16\%$$

BBPOM di Surabaya berhasil meningkatkan efektifitas pengawasan obat dan makanan berbasis resiko di Provinsi Jawa Timur



Sasaran Strategis 5
Meningkatnya efektifitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan
di wilayah kerja BBPOM di Surabaya

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5

Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Surabaya

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2018

Tabel 42. Realisasi perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Surabaya tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	50%	60.47%	120.93%	Memuaskan

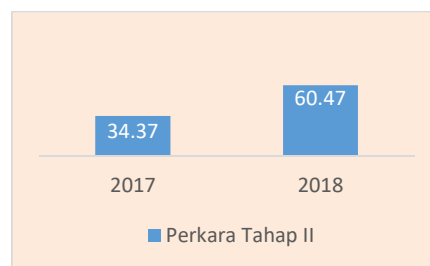
Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Surabaya diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II : (jumlah perkara tahap II tahun n dan tahun sebelumnya dibagi Total perkara ditahun n dan target perkara tahap II tahun sebelumnya) x 100%

Perkara yang dimaksud adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus, sedangkan tahap II adalah perkara yang telah diselesaikan hingga tahap penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Tinggi.

Capaian persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Surabaya **mencapai target** yang ditetapkan yaitu 120,93% dengan kriteria “memuaskan”. Sehingga dapat dinyatakan bahwa BBPOM di Surabaya **telah berhasil** menyelesaikan perkara hingga tahap II sebanyak 60,47%.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2018 dengan tahun 2017



Gambar 25. Realisasi Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Surabaya tahun 2017 dan 2018

Berdasarkan tabel di atas realisasi persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Surabaya meningkat dari tahun 2017 hingga tahun 2018. Keberhasilan pencapaian ini disebabkan karena kerjasama dan koordinasi yang baik dengan Kepolisian Daerah Jawa Timur cq. Direktorat Reserse Kriminal Umum dan Direktorat Reserse Narkoba dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Kinerja yang baik dari PPNS BBPOM di Surabaya mendapat sehingga apresiasi berupa **perhargaan dari Polda Jatim** sebagai PPNS terbaik di Jawa Timur.

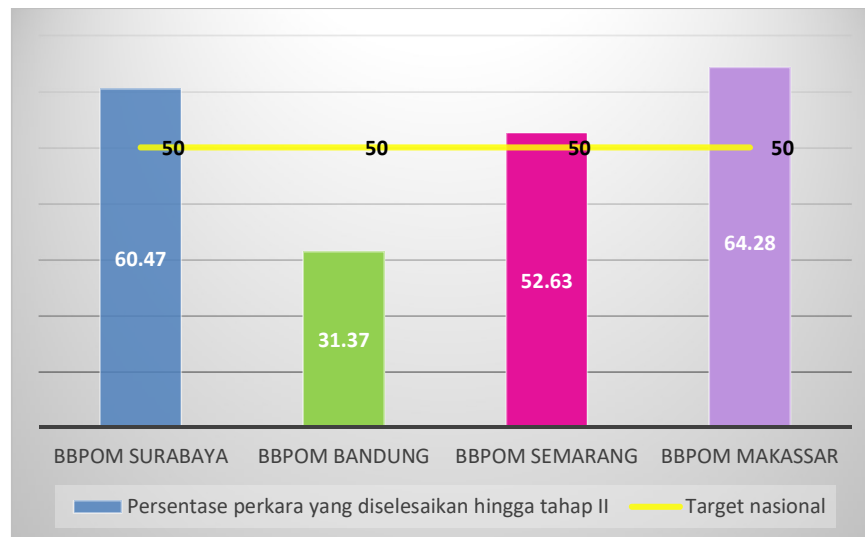
c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dengan target 2019 dalam Renstra OTK baru

Tabel 43. Perbandingan Realisasi persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Surabaya tahun 2018 dengan target 2019

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	50%	60,47%	120,93%	Memuaskan

Realisasi kinerja persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Surabaya **mencapai target Renstra 2019**, capaiannya yaitu 120,93 % dengan kriteria “memuaskan”.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dengan Balai lain yang sejenis/setara



Gambar 26. Perbandingan Presentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Surabaya tahun 2018 dengan Balai lain

Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa realisasi persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Surabaya, BBPOM di Semarang, dan BBPOM di Makassar melebihi target nasional, sedangkan realisasi BBPOM di Bandung di bawah target nasional.

- e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tabel 44. Jumlah Perkara Tahap II

URAIAN	PERKARA TAHAP II			JUMLAH
	2016	2017	2018	
Target penyelesaian tahap II	1	20	22	43
Penyelesaian tahap II	1	20	5	26

Keberhasilan BBPOM di Surabaya mencapai target persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Surabaya dan peningkatan kinerja dari tahun 2017 disebabkan beberapa faktor pendukung, antara lain :

- Komitmen dan dukungan pimpinan untuk penyelesaian perkara hingga tahap II.
- Kerjasama yang baik antara tim internal PPNS Balai Besar POM di Surabaya.
- Kerjasama dan koordinasi yang baik antara PPNS Balai Besar POM di Surabaya dengan Korwas PPNS Kepolisian Daerah Jawa Timur.
- Kerjasama dan koordinasi yang baik antara PPNS Balai Besar POM di Surabaya dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
- Tersangka bersikap kooperatif terhadap PPNS Balai Besar POM di Surabaya selama rangkaian proses penyidikan sampai dengan pelimpahan tahap II ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

- f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan yang dilakukan tahun 2018 untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator perkara yang diselesaikan hingga tahap II adalah dilaksanakannya investigasi sebanyak 25 kasus. Dari hasil investigasi tersebut ditindaklanjuti sebagai bahan kegiatan penyidikan hingga dihasilkan 22 perkara yang di *projustitia*. Jenis pelanggaran dari 22 perkara tersebut antara lain :

Tabel 45. Hasil Penyidikan obat dan Makanan tahun 2018

No	JENIS KOMODITI YANG DILANGGAR	JUMLAH PERKARA
1.	Kosmetik TIE	4
2.	Kosmetik TIE, Obat Tradisional TIE, dan Pangan TIE	1
3.	Pangan TIE dan Mikro	1
4.	Obat Tradisional TIE dan BKO	6
5.	KosmetikTIE dan Bahan Berbahaya	1
6.	Obat bebas dan bebas terbatas	1
7.	Obat Tradisional TIE	3
8.	Obat Tradisional TIE dan BKO, Pangan TIE	1

No	JENIS KOMODITI YANG DILANGGAR	JUMLAH PERKARA
9.	Obat Tadisional TIE, obat keras, Pangan TIE	2
10.	Obat TIE / obat keras	1
11.	Kosmetik TIE, OT TIE dan BKO, Pangan TIE	1
TOTAL		22

Dari target kegiatan penyidikan tahun 2018 sebanyak 21 perkara, dapat dicapai sebanyak 22 perkara (105 %) yang terdiri dari 17 perkara penyidikan, 2 perkara hasil operasi Opsion, dan 3 perkara hasil operasi Pangea. Operasi Pangea merupakan operasi yang dilakukan bekerjasama dengan Ditjen Bea dan Cukai untuk melakukan pengawasan produk obat dan makanan ilegal yang masuk ke wilayah Indonesia baik dilakukan di wilayah pelabuhan laut Tanjung Perak maupun di Bandar Udara Juanda.

Adanya tambahan 1 perkara di akhir tahun, tidak lepas dari kerjasama yang baik antara Tim PPNS Balai Besar POM di Surabaya dengan Tim Deputi Penindakan Badan POM RI yang mendapatkan informasi dari intelijen terkait peredaran obat ilegal berupa Tablet “LL” di wilayah Kota Probolinggo di periode akhir tahun 2018. Berdasarkan pengujian laboratorium, temuan Tablet “LL” tersebut positif mengandung *Trihexyphenidil*. Saat ini sedang dalam penelusuran terhadap pemasok Tablet “LL” tersebut. Kendala pelaksanaan proses penyidikan perkara tindak pidana obat dan makanan selama tahun 2018 antara lain adanya upaya hukum praperadilan dari pihak yang diduga melakukan tindak pidana obat dan makanan. Untuk menghindari terjadinya upaya hukum praperadilan maka telah dilaksanakan Coaching Clinic dengan narasumber dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, penataan ulang administrasi penyidikan

Agar dapat terus meningkatkan capaian penyelesaian perkara hingga Tahap II sebaiknya perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- Meningkatkan kemampuan SDM melalui pelatihan dalam bidang investigasi awal dan penyidikan yang dilakukan secara rutin
- Meningkatkan intensitas koordinasi lintas sektor antar instansi antara lain dengan Kepolisian Daerah Jawa Timur, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Ditjen Bea dan Cukai, Dinas Prindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan dan instansi lainnya.
- Pelaksanaan kegiatan investigasi awal yang lebih intensif dan dilaksanakan sejak di awal tahun.
- Upaya pemenuhan fasilitas dan sarana prasarana pendukung kegiatan penyidikan dan investigasi awal.

g. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Pada tahun 2018 telah dilakukan reviu Renstra 2015-2019 seiring dengan terbentuknya OTK baru di BBPOM di Surabaya. Kegiatan penyidikan obat dan makanan yang semula menjadi tugas pokok dan fungsi dari seksi penyidikan setingkat eselon 4 berubah menjadi tugas pokok dan fungsi Bidang Penindakan setingkat eselon 3. Hal ini disebabkan karena perlunya peningkatan efektivitas penyidikan tindak pidana yang diharapkan dapat memberantas segala tindak kejahatan obat dan makanan sehingga masyarakat dapat terlindungi. Pada Renstra sebelumnya indikator penyidikan tindak pidana adalah “jumlah perkara di bidang obat dan makanan”. Setelah dilakukan reviu pada Renstra, didapatkan indikator baru yang lebih menggambarkan efektivitas pengawasan obat dan makanan yaitu “Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Surabaya”.



Sasaran Strategis 6
Terwujudnya RB BBPOM di Surabaya sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6

Nilai AKIP BBPOM di Surabaya

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2018

Tabel 46. Realisasi Nilai AKIP BBPOM di Surabaya tahun 2018

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Nilai AKIP BBPOM di Surabaya	78	77.91	99.88	Cukup

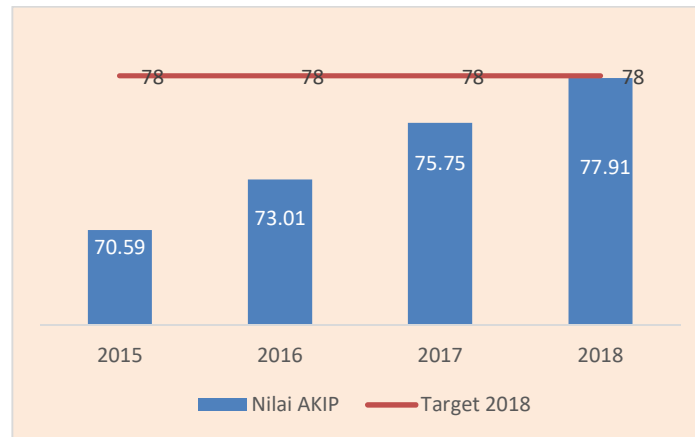
Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja BB/BPOM di Surabaya adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BPOM atas implemmentasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh BBPOM di Surabaya dengan rentang nilai sebagai berikut :

Tabel 47. Kategori Penilaian SAKIP

No.	Nilai Pemenuhan Terhadap Kinerja	Kategori	Keterangan
1.	> 90	AA	Sangat memuaskan
2.	> 80 s.d. 90	A	Memuaskan
3.	> 70 s.d. 80	BB	Sangat baik
4.	> 60 s.d. 70	B	Baik
5.	> 50 s.d. 60	CC	Cukup baik
6.	> 30 s.d. 50	C	Agak kurang
7.	< 30	D	Kurang

Capaian Nilai AKIP BBPOM di Surabaya **belum mencapai target** yang ditetapkan yaitu 99,88% dengan kriteria “cukup”.

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2018 dengan tahun 2017/2016



Gambar 27. Realisasi nilai AKIP BBPOM di Surabaya tahun 2015-2018

Berdasarkan grafik di atas realisasi nilai AKIP BBPOM di Surabaya meningkat dari tahun 2015 hingga tahun 2018. Hal ini mencerminkan adanya upaya BBPOM di Surabaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

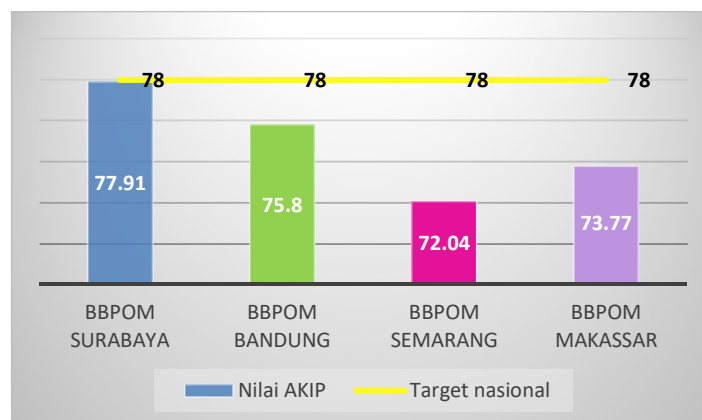
c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dengan target 2019 dalam Renstra OTK baru

Tabel 48. Perbandingan Realisasi nilai AKIP BBPOM di Surabaya tahun 2018 dengan target 2019

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Nilai AKIP BBPOM di Surabaya	81	77.91	96.18%	Cukup

Realisasi kinerja nilai AKIP BBPOM di Surabaya **mencapai target Renstra 2019**, capaiannya yaitu 96,18% dengan kriteria “cukup”.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dengan Balai lain yang sejenis/setara



Gambar 28. Perbandingan nilai AKIP BBPOM di Surabaya tahun 2018 dengan Balai lain

Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa realisasi nilai AKIP BBPOM di Surabaya dan 3 balai lain yang setara **belum mencapai target nasional**. Namun demikian, BBPOM di Surabaya telah berhasil mendapat **nilai AKIP tertinggi secara nasional** di tahun 2017 dan 2018.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Hal – hal yang mendukung naiknya nilai SAKIP dari tahun sebelumnya antara lain :

- Pemanfaatan aplikasi *e-preformance* yang telah dikembangkan yang berdasarkan Balance Score Card dan pengukuran kinerja cascading dari pejabat eselon 2 di BBPOM di Surabaya hingga pejabat eselon 3 dan 4. Pengukuran ini telah diintegrasikan dengan aplikasi e-SKP yang merupakan pengukuran kinerja individu.
- konsistensi penerapan sistem mutu sesuai ISO 9001:2015 ditandai dengan keberhasilan BBPOM di Surabaya memperbarui sertifikat ISO 9001:2015 dengan SOTK lama menjadi sertifikat ISO 9001:2015 sesuai SOTK baru melalui audit resertifikasi oleh TUV SUD pada tahun 2018
- BBPOM Surabaya telah melakukan reuiu Renstra 2015-2019 sesuai SOTK baru dengan metode Balance Score Card, memakai 4 perspektif (customer, stakeholder, internal proses, dan learning & growth) menghasilkan 6 sasaran strategis dan 15 indikator kinerja utama.
- Menyusun SKP secara cascading dari eselon 2, eselon 3, eselon 4 hingga ke individu
- Evaluasi kinerja secara rutin dilakukan dengan membahas pencapaian indikator secara berkala, kendala dan solusinya.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Pencapaian sasaran indikator Nilai AKIP BBPOM di Surabaya didukung oleh beberapa kegiatan sebagai berikut :

1) Pengukuran tingkat kepuasan masyarakat

Tingkat Kepuasan Masyarakat merupakan tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan dan gambaran tentang kinerja pelayanan publik BBPOM di Surabaya. Survei dilaksanakan oleh Inspektorat BPOM mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 16 tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Hasil survei tingkat kepuasan masyarakat digunakan sebagai bahan pertimbangan penetapan kebijakan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di masa depan. Hasil pengukuran tingkat kepuasan masyarakat tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 49. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

No	UNSUR	TAHUN 2018
1.	Persyaratan pelayanan	88.30
2.	Prosedur pelayanan	87.10
3.	Waktu pelayanan	84.95
4.	Biaya/tarif pelayanan	72.88
5.	Kesesuaian produk pelayanan	87.40
6.	Kompetensi petugas	88.86
7.	Perilaku petugas	90.31
8.	Penanganan pengaduan	95.12
9.	Sarana dan prasarana	88.44
Rata-rata		87.04

Unsur biaya/tarif pelayanan mendapat nilai terendah 72,88 dengan kategori cukup. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan tarif layanan SKI/SKE sesuai Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 2017 perihal Jenis dan Tarif atas Jenis PNPB yang berlaku pada Badan POM. Tingkat kepuasan masyarakat meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang nilainya 86,60. Upaya yang telah dilakukan untuk menaikkan nilai tingkat kepuasan masyarakat adalah dengan menambah sarana/prasarana yang menunjang kelancaran pelayanan seperti menyediakan media informasi elektronik berupa web site balai di alamat bbpomsurabaya.com yang menayangkan tracking layanan pengujian pihak ketiga dan audit sertifikasi, konsultasi on-line melalui Whatsapp, instagram, facebook.

2) Pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar.

Pemenuhan standar sarana dan prasarana kerja dihitung berdasarkan PerKa BPOM No 20 tahun 2015 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kantor di Lingkungan BPOM dan Keputusan Kepala BPOM No. HK.04.01.1.22.04.18.2167 Tahun 2018 tentang Standar Minimal Peralatan Laboratorium Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM yang telah ditetapkan untuk masing-masing balai. Realisasi pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar adalah 83,85% dengan capaian 101,02% **melebihi dari target** 83%.

Untuk pemenuhan sarana dan prasarana tahun 2017 dilakukan pengadaan alat laboratorium sebanyak 26 unit, pengadaan meubelair, dan pengadaan alat pengolah data berupa computer, printer, proyektor, dll

3) Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu.

Dokumen yang telah dilaporkan tepat waktu pada tahun 2018 sebanyak 10 dokumen (111%) **melebihi target** 9 dokumen meliputi dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2018, dokumen RKAKL/DIPA tahun 2019, Laporan Kinerja tahun 2017, Laporan triwulanan I, Laporan Triwulanan II, Laporan Triwulanan III, Laporan Tahunan tahun 2017, Laporan Keuangan tahun

2017, Laporan Keuangan Semester I tahun 2018, dan Reviu Renstra 2015-2019. Keberhasilan capaian jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu dipengaruhi oleh :

- Komitmen yang tinggi oleh pimpinan dan staf BBPOM di Surabaya
- Perencanaan program dan kegiatan yang melibatkan semua bidang hingga terwujud perencanaan yang lebih akurat
- Ketersediaan data dan informasi yang memadai dengan adanya tim evaluasi dan monitoring yang anggotanya terdiri dari perwakilan dari masing-masing bidang
- Kualitas dan kuantitas SDM terkait perencanaan, penganggaran, keuangan, dan evaluasi sudah sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan.

g. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Pada tahun 2018, Badan POM telah mengembangkan aplikasi *e-performance* yang berdasarkan Balance Score Card dan pengukuran kinerja cascading dari pejabat eselon 2 di BBPOM di Surabaya hingga pejabat eselon 3 dan 4. Pengukuran ini telah diintegrasikan dengan aplikasi e-SKP yang merupakan pengukuran kinerja individu. Pengembangan aplikasi *e-performance* ini jauh lebih baik dari versi tahun 2017 yang hanya mengukur kinerja pejabat eselon 2. Diharapkan perkembangan ini dapat menaikkan nilai SAKIP di tahun berikutnya.

3.2. Realisasi Anggaran

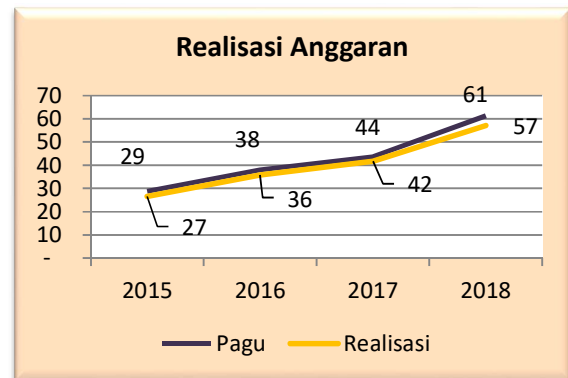
Pada tahun 2018 BBPOM di Surabaya memperoleh anggaran sesuai DIPA awal yang diterbitkan tanggal 5 Desember 2017 sebesar Rp. 62.144.247.000,-. Anggaran tersebut meningkat sebesar 42% jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2017. Pada tanggal 14 Agustus 2018 terjadi pengurangan pagu DIPA menjadi Rp. 61.356.765.000,- karena adanya pengurangan anggaran pembentukan 2 Loka Kab/Kota yang awalnya berisi pembiayaan operasional selama 12 bulan, menjadi 6 bulan menyesuaikan turunya Peraturan Kepala Badan POM tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM pada tanggal 8 Juni 2018. Namun, pengurangan anggaran ini tidak mempengaruhi kinerja pencapaian sasaran BBPOM di Surabaya. Realisasi anggaran pada tahun 2018 sebesar Rp. 57.229.782.957,- atau 93,27%. Realisasi ini menurun sebesar 2,14 persen dibandingkan tahun 2017.

Pengelolaan anggaran BBPOM di Surabaya senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

Upaya yang telah dilakukan BBPOM di Surabaya dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah :

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala
- Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan

Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen penetapan kinerja/perjanjian kinerja adalah sebagai berikut :



Gambar 29. Perbandingan Realisasi Anggaran

Tabel 50. Realisasi anggaran per sasaran strategis

Sasaran Strategis	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	% Capaian
1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Jawa Timur	11.436.426.000	11.176.349.324	97,73%
2. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	645.089.000	592.778.650	91,89%
3. Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	12.645.670.000	11.993.866.433	84,85%
4. Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Jawa Timur	4.786.014.000	4.479.030.076	93,59%
5. Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	2.013.038.000	1.875.210.910	93,15%
6. Terwujudnya RB BBPOM di Surabaya sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019	10.000.414.000	7.744.942.442	77,45%

Rendahnya capaian anggaran di sasaran 6 “Terwujudnya RB BBPOM di Surabaya sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019” dikarenakan terhambatnya pencairan kekurangan tunjangan kinerja yang naik menjadi 80% sesuai Perpres yang terbit tanggal 28 Desember 2018, akibatnya anggaran untuk tunjangan kinerja tidak dapat dilakukan revisi DIPA karena sudah melewati batas akhir revisi DIPA. Namun hal ini tidak mempengaruhi pencapaian indikator di sasaran 6, terbukti dengan pencapaian nilai AKIP BBPOM di Surabaya paling tinggi secara nasional.

Hal-hal yang perlu dilakukan untuk mengefektifkan anggaran dalam pencapaian sasaran strategis adalah dengan menghapuskan kegiatan-kegiatan yang tidak berdampak langsung pada pencapaian sasaran, dan memfokuskan anggaran untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang menunjang peningkatan realisasi indikator pada sasaran strategis.

3.3. Analisis Efisiensi Kegiatan

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan *input*, yang lebih sedikit tetapi menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau penggunaan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau persentase capaian *output* sama/lebih tinggi daripada persentase *input* yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input (dalam laporan ini, capaian input yaitu realisasi anggaran), sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = 100\% = 1$$

Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Jika $IE > SE$, maka kegiatan dianggap efisien
 Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat efisiensi kegiatan yang dilaksanakan BBPOM di Surabaya tahun 2018 sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini :

Tabel 51. Tingkat Efisiensi Kegiatan

NO.	KEGIATAN	TE	KATEGORI
1.	Pengujian Laboratorium Sampel Obat dan Makanan	0,03	EFISIEN
2.	Audit sarana dalam rangka Sertifikasi, Labelisasi Halal, dan Surveilans	0,09	EFISIEN
3.	Layanan Informasi Obat dan Makanan	0,05	EFISIEN
4.	Komunitas yang diberdayakan	0,18	EFISIEN
5.	Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	0,08	EFISIEN
6.	Dukungan Teknis dan Manajemen Laboratorium	0,05	EFISIEN
7.	Pengawasan Sarana Produksi Obat, Obat Tradisional, Kosmetika, NAPZA, Prekursor, Makanan dan Bahan Berbahaya	0,08	EFISIEN
8.	Pengawasan Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetika, NAPZA, Prekursor, Makanan dan Bahan Berbahaya	0,10	EFISIEN
9.	Penyidikan obat dan makanan	0,12	EFISIEN
10.	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	0,50	EFISIEN
11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kerja	0,04	EFISIEN

Pada tahun 2018 BBPOM di Surabaya melaksanakan 11 (sebelas) kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 6 sasaran strategis yang **semua kegiatan termasuk kategori efisien**. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara 0,03 sampai 0,50. Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi mempunyai TE tertinggi karena output yang diperoleh paling tinggi dibandingkan kegiatan lain. Capaian *output* mencapai 111,11% dengan *input* hanya sebesar 73,97%. Tingginya efisiensi pada Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi, karena adanya anggaran kenaikan tunjangan kinerja 80% yang tidak dapat dicairkan, namun tidak berpengaruh pada pencapaian output.

Berdasarkan data tabel diatas dapat disimpulkan bahwa walaupun dengan sumber daya (dana) terbatas, BBPOM di Surabaya mampu menghasilkan kinerja yang optimal untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis melalui pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif.

Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya.

Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara *output* dan *input*, dalam bentuk anggaran. Ke depan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan *input* yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai. Pengukuran efisiensi kegiatan secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 6.

Nilai efisiensi sasaran diperoleh dari nilai rata-rata efisien kegiatan, sebagai berikut :

Tabel 52. Tingkat Efisiensi Kegiatan per Sasaran Strategis

	Sasaran Strategis	TE rata-rata	Kategori
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Jawa Timur	0.03	Efisien
2.	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	0.09	Efisien
3.	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	0.10	Efisien
4.	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Jawa Timur	0.08	Efisien
5.	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	0.12	Efisien
6.	Terwujudnya RB BBPOM di Surabaya sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019	0.27	Efisien

Berdasarkan perhitungan efisiensi sasaran, dapat diketahui bahwa efisiensi paling tinggi terdapat pada sasaran strategis keenam yaitu “Terwujudnya RB BBPOM di Surabaya sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019”, sedangkan efisiensi paling rendah terdapat pada sasaran pertama yaitu “Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Jawa Timur”, walaupun demikian capaian *output* masih bisa dipertahankan sesuai target.

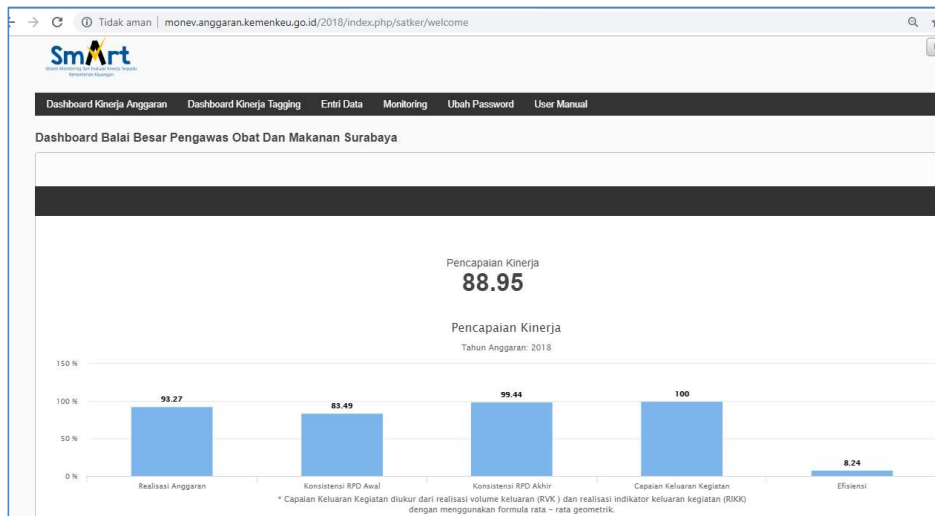
Berdasarkan besarnya anggaran untuk kegiatan pengawasan obat dan makanan (selain gaji) di BBPOM di Surabaya dapat diperoleh hasil sebagai berikut :

- Proporsi anggaran tertinggi adalah untuk pencapaian sasaran ke 3 yaitu “Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Surabaya”. Anggaran yang direalisasikan untuk sasaran ke 3 sebesar Rp. 11.993.866.433,- atau 31,68% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk penyuluhan berupa KIE kepada 18.978 penduduk yang tersebar di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, pemberdayaan masyarakat di 34 Desa, dan pemberdayaan 10 pasar. Tingginya anggaran yang direalisasikan untuk kegiatan tersebut sebanding dengan hasil pencapaian indikator Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Surabaya sebesar 76,68 yang merupakan peringkat ke-3 secara nasional.
- Proporsi anggaran terbesar kedua adalah untuk pencapaian sasaran pertama “Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Jawa Timur”. Anggaran yang direalisasikan untuk

sasaran pertama sebesar 11.176.349.324 atau 29,52% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini banyak dipergunakan untuk sampling dan pelaksanaan pengujian obat dan makanan beserta sarana penunjangnya. 2 indikator mendapat belum mencapai target dari 6 indikator yang diukur di sasaran pertama, sedangkan 4 indikatornya mendapat nilai memuaskan. Perlu dilakukan pengkajian lebih dalam untuk efisiensi dan efektifitas anggaran terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan supaya lebih fokus pada target pencapaian sasaran pertama.

3. Proporsi anggaran terbesar ketiga adalah untuk pencapaian sasaran keenam yaitu “Terwujudnya RB BBPOM di Surabaya sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019”. Anggaran yang direalisasikan untuk sasaran keenam sebesar Rp. 7.744.942.442,- atau 20,46% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini banyak dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan internal organisasi Balai dan Loka. Meskipun indikator pada sasaran keenam belum mencapai target, namun nilai AKIP BBPOM di Surabaya merupakan nilai tertinggi secara nasional, sehingga sebanding dengan anggaran yang digunakan.
4. Proporsi anggaran terbesar keempat adalah untuk pencapaian sasaran keempat “Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Jawa Timur”. Anggaran yang direalisasikan untuk sasaran keempat sebesar Rp. 4.786.014.000,- atau 11,83% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini digunakan untuk beberapa kegiatan meliputi jaminan mutu hasil pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan beserta tindaklanjutnya terhadap sarana dan lintas sektor terkait, serta sertifikasi obat dan makanan. Semua target indikator dapat tercapai menandakan kegiatan sudah efektif dan efisien.
5. Proporsi anggaran yang kecil adalah untuk pencapaian sasaran kelima “Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya”. Anggaran yang direalisasikan untuk sasaran kelima sebesar Rp. 1.875.210.910,- atau 4,95% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini digunakan untuk proses investigasi dan penyidikan perkara obat dan makanan. Baik target output kegiatan maupun target indikator sasaran kelima sudah tercapai dan melebihi target, menandakan kegiatan sudah efektif dan efisien.
6. Proporsi anggaran terkecil adalah untuk pencapaian sasaran ke 2 yaitu “Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya”. Anggaran yang direalisasikan untuk sasaran ke 2 sebesar Rp. 592.778.650,- atau sebesar 1,57% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk pembinaan kepada pelaku usaha di Provinsi Jawa Timur. Namun demikian pencapaian sasaran ke 2 juga dipengaruhi oleh pencapaian sasaran ke 4, dimana didalam sasaran ke 4 juga terdapat kegiatan pengawasan terhadap pelaku usaha sarana produksi dan distribusi. Walaupun anggaran

yang diperlukan tidak terlalu besar namun menghasilkan indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya yang cukup memuaskan sebesar 75,5 yang merupakan peringkat ke-5 secara nasional.



Gambar 30. Nilai kinerja berdasarkan aplikasi monev

Berdasarkan aplikasi *monev.anggaran.kemenkeu.go.id* diperoleh nilai kinerja BBPOM di Surabaya tahun 2018 sebesar 88,95 atau kategori Baik, menurun dari capaian tahun lalu sebanyak 0,81 poin yaitu 89,76. Hal ini dikarenakan output Penguatan kelembagaan pengawasan obat dan makanan di Kabupaten/Kota memiliki realisasi keuangan yang rendah, hanya 57,86%, karena tidak terserapnya anggaran kenaikan tunjangan kinerja 80%. Namun output 2 kab/kota tetap tercapai. Nilai kinerja pada aplikasi monev ini diperoleh dari perhitungan secara otomatis pada aplikasi monev yang merupakan hasil dari penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dan implementasi, pencapaian keluaran, efisiensi dan pencapaian hasil. Lalu dilakukan pembobotan dari aspek implementasi dan aspek manfaat sehingga menghasilkan nilai tersebut sesuai gambar. Semua perhitungan tersebut dilakukan sesuai PMK No. 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Tahun 2018 merupakan tahun keempat dari Rencana Strategis 2015-2019. Pada tahun 2018 telah dilaksanakan reuiu Renstra dengan mengubah 3 sasaran strategis dengan 8 indikator kinerja menjadi 6 sasaran strategis dan 16 indikator kinerja, namun khusus untuk tahun 2018 hanya digunakan 15 indikator kinerja. Untuk menunjang pencapaian 6 sasaran strategis tersebut, telah dilakukan 11 kegiatan utama.

1. BBPOM di Surabaya telah berhasil mencapai target 3 sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan kriteria MEMUASKAN, 1 sasaran strategis dengan kriteria CUKUP, dan 2 sasaran strategis dengan kriteria TIDAK DAPAT DISIMPULKAN
2. Hasil capaian tiap sasaran strategis adalah sebagai berikut :
 - Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis pertama sebesar 105,44% dengan kriteria MEMUASKAN, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Surabaya dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Jawa Timur
 - Capaian indikator sasaran strategis kedua sebesar 125,83% dengan kriteria TIDAK DAPAT DISIMPULKAN namun demikian realisasi indikator pada sasaran ini berada pada peringkat ke-5 secara nasional, sehingga hal ini tetap dapat menunjukkan keberhasilan BBPOM di Surabaya dalam meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya
 - Capaian indikator sasaran strategis ketiga sebesar 127,80% dengan kriteria TIDAK DAPAT DISIMPULKAN namun demikian realisasi indikator pada sasaran ini berada pada peringkat ke-3 secara nasional, sehingga hal ini tetap dapat menunjukkan keberhasilan BBPOM di Surabaya dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Surabaya
 - Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis keempat sebesar 103,16% dengan kriteria MEMUASKAN, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Surabaya dalam meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Jawa Timur
 - Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis kelima sebesar 120,93% dengan kriteria MEMUASKAN, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Surabaya dalam meningkatkan efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya

- Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis kelima sebesar 99,88% dengan kriteria CUKUP, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Surabaya dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019
3. Dari 11 kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran, tidak ada kegiatan yang tidak efisien. Tingkat efisiensi (TE) berkisar antara 0,03 (Pengujian Laboratorium Sampel Obat dan Makanan) hingga 0,50 (kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi)
 4. Berdasarkan analisis tingkat efisiensi kegiatan di atas, maka seluruh pelaksanaan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2018 di Provinsi Jawa Timur dinyatakan efisien.

4.2. Saran

1. Perlu dilakukan kaji ulang terhadap target Indikator Kinerja Utama Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya supaya capaiannya tidak melebihi 125%
2. Perlu dilakukan kaji ulang terhadap target Indikator Kinerja Utama Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Surabaya supaya capaiannya tidak melebihi 125%
3. Untuk menaikkan nilai Indeks Pengawasan Obat dan Makanan, maka perlu meningkatkan nilai survey kepuasan masyarakat, meningkatkan intensitas pembinaan kepada pelaku usaha, dan penyajian data yang lebih akurat.

LAMPIRAN

LAMPIRAN I RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA TAHUN 2015 - 2019

1. IKHTISAR RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR POM DI SURABAYA TAHUN 2015 – 2019

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BALAI BESAR POM DI SURABAYA TAHUN 2015-2017 (OTK Lama) REVISI RENSTRA BALAI BESAR POM DI SURABAYA 2015-2019

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target			Alokasi (dalam Miliar Rupiah)			Unit Organisasi Pelaksana
			2015	2016	2017	2015	2016	2017	
Balai Besar POM di Surabaya									
	SS 1	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan				5,838	6,864	7,179	BBPOM di Surabaya
	1.1.	Persentase obat yang memenuhi syarat	Provinsi Jawa Timur	92,00	92,50	93,00			
	1.2.	Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	Provinsi Jawa Timur	80,00	81,00	82,00			
	1.3.	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	Provinsi Jawa Timur	89,00	90,00	91,00			
	1.4.	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	Provinsi Jawa Timur	79,00	80,00	81,00			
	1.5.	Persentase makanan yang memenuhi syarat	Provinsi Jawa Timur	82,30	82,80	83,30			
	SS 2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat				3,830	4,596	5,185	BBPOM di Surabaya

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target			Alokasi (dalam Miliar Rupiah)			Unit Organisasi Pelaksana
				2015	2016	2017	2015	2016	2017	
	2.1.	Tingkat Kepuasan Masyarakat	Provinsi Jawa Timur	75,00	75,25	75,50				
	2.2.	Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	Provinsi Jawa Timur	38	38	38				
	SS 3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BBPOM di Surabaya					6,723	8,068	9,275	BBPOM di Surabaya
	3.1.	Nilai SAKIP BBPOM di Surabaya	Provinsi Jawa Timur	B	A	A				
Program Pengawasan Obat dan Makanan										
	SP 1	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan					6	7	7	BBPOM di Surabaya
	1.1.	Persentase obat yang memenuhi syarat	Provinsi Jawa Timur	92,00	92,50	93,00				
	1.2.	Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	Provinsi Jawa Timur	80,00	81,00	82,00				
	1.3.	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	Provinsi Jawa Timur	89,00	90,00	91,00				
	1.4.	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	Provinsi Jawa Timur	79,00	80,00	81,00				
	1.5.	Persentase makanan yang memenuhi syarat	Provinsi Jawa Timur	82,30	82,80	83,30				

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target			Alokasi (dalam Miliar Rupiah)			Unit Organisasi Pelaksana
				2015	2016	2017	2015	2016	2017	
	SP 2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat					4	5	5	BBPOM di Surabaya
	2.1.	Tingkat Kepuasan Masyarakat	Provinsi Jawa Timur	75,00	75,25	75,50				
	2.2.	Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	Provinsi Jawa Timur	38	38	38				
	SP 3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BBPOM di Surabaya					7	8	9	BBPOM di Surabaya
	3.1.	Nilai SAKIP BBPOM di Surabaya	Provinsi Jawa Timur	B	A	A				
	Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Surabaya						16	20	22	BBPOM di Surabaya
	Meningkatnya kinerja pengawasan obat dan makanan di seluruh Indonesia									
	1	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	Provinsi Jawa Timur	4.500	4.500	4.500				
	2	Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	Provinsi Jawa Timur	100	100	100				

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target			Alokasi (dalam Miliar Rupiah)			Unit Organisasi Pelaksana
				2015	2016	2017	2015	2016	2017	
	3	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	Provinsi Jawa Timur	58,00	63,00	63,00				
	4	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	Provinsi Jawa Timur	24,00	24,00	25,00				
	5	Jumlah Perkara di bidang penyidikan obat dan makanan	Provinsi Jawa Timur	19	20	20				
	6	Jumlah layanan publik BB/BPOM	Provinsi Jawa Timur	10.150	10.252	10.354				
	7	Jumlah Komunitas yang diberdayakan	Provinsi Jawa Timur	19	24	29				
	8	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Provinsi Jawa Timur	72	74	76				
	9	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	Provinsi Jawa Timur	10	9	10				

**MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BALAI BESAR POM DI SURABAYA TAHUN 2018-2019 (OTK Baru)
REVISI RENSTRA BALAI BESAR POM DI SURABAYA 2015-2019**

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target		Alokasi (dalam Miliar Rupiah)		Unit Organisasi Pelaksana	
			2018	2019	2018	2019		
Balai Besar POM di Surabaya								
	SS 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Surabaya				62,10	62,10	BBPOM di Surabaya
	1.1.	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	Provinsi Jawa Timur	70,00	71,00			
	1.2.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Provinsi Jawa Timur	93,50	94,00			
	1.3.	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	Provinsi Jawa Timur	83,00	60,00			
	1.4.	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	Provinsi Jawa Timur	92,00	80,00			
	1.5.	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	Provinsi Jawa Timur	82,00	87,00			
	1.6.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Provinsi Jawa Timur	89,60	71,00			
	SS 2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Surabaya						BBPOM di Surabaya
	2.1.	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	Provinsi Jawa Timur	60,00	61,00			
	2.2.	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman	Provinsi Jawa Timur	—	66,00			
	SS3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Surabaya						BBPOM di Surabaya
	3.1.	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	Provinsi Jawa Timur	60,00	61,00			
	SS 4	Meningkatnya efektivitas pengawasan						BBPOM di Surabaya

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target		Alokasi (dalam Miliar Rupiah)		Unit Organisasi Pelaksana
				2018	2019	2018	2019	
		Obat dan Makanan berbasis risiko di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Surabaya						
	4,1	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar	Provinsi Jawa Timur	100,00	100,00			
	4,2	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Provinsi Jawa Timur	60,00	65,00			
	4,3	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	Provinsi Jawa Timur	75,00	77,00			
	4,4	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Provinsi Jawa Timur	82,00	85,00			
	4,5	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan	Provinsi Jawa Timur	36,10	46,95			
	SS 5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Surabaya						BBPOM di Surabaya
	5.1.	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II	Provinsi Jawa Timur	50,00	50,00			
	SS 6	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Balai Besar POM di Surabaya sesuai dengan <i>roadmap</i> Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019						BBPOM di Surabaya
	6,1	Nilai AKIP Balai Besar POM di Surabaya	Provinsi Jawa Timur	78,00	81,00			
Program Pengawasan Obat dan Makanan								
Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Surabaya						62,10	62,10	BBPOM di Surabaya
	Meningkatnya kinerja pengawasan obat dan makanan di seluruh Indonesia							
	1	Jumlah perkara di bidang obat dan makanan	Provinsi Jawa Timur	21,00	—			
	2	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	Provinsi Jawa Timur	4507,00	—			

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target		Alokasi (dalam Miliar Rupiah)		Unit Organisasi Pelaksana
				2018	2019	2018	2019	
	3	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan	Provinsi Jawa Timur	63,00	—			
	4	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan	Provinsi Jawa Timur	25,00	—			
	5	Jumlah layanan publik BB/BPOM	Provinsi Jawa Timur	18000,00	—			
	6	Jumlah komunitas yang diberdayakan	Provinsi Jawa Timur	44,00	—			
	7	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	Provinsi Jawa Timur	83,00	—			
	8	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Provinsi Jawa Timur	9,00	—			
	9	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Provinsi Jawa Timur	93,50	94,00			
	10	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	Provinsi Jawa Timur	83,00	60,00			
	11	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	Provinsi Jawa Timur	82,00	80,00			
	12	Persentase kosmetik yang memenuhi syarat	Provinsi Jawa Timur	92,00	80,00			
	13	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Provinsi Jawa Timur	89,60	71,00			
	14	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar	Provinsi Jawa Timur	100,00	100,00			
	15	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Provinsi Jawa Timur	60,00	65,00			
	16	Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan	Provinsi Jawa Timur	75,00	77,00			
	17	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Provinsi Jawa Timur	82,00	85,00			
	18	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan	Provinsi Jawa Timur	36,10	46,95			

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target		Alokasi (dalam Miliar Rupiah)		Unit Organisasi Pelaksana
				2018	2019	2018	2019	
	19	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II	Provinsi Jawa Timur	50,00	50,00			
	20	Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan	Provinsi Jawa Timur	60,00	61,00			
	21	Nilai AKIP Balai Besar POM di Surabaya	Provinsi Jawa Timur	78,00	81,00			

2. PERJANJIAN KINERJA



**BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI SURABAYA**

Jl. Karanggenengan No.20 Surabaya 60206
Telp. (031) 5020575, 5022815, 5048833 | Fax. (031) 5015486
e-mail : bpbm_surabaya@pom.go.id ; ufik_ety@rbho.co.id | website : www.pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yang beranda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. I Mado Bagus Gerametta, Apt.
Jabatan : Kepala Balai Besar POM di Surabaya
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P
Jabatan : Kepala BPOM
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 21 September 2018

<p>Phak Kedua</p>  <p>Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P</p>	<p>Phak Pertama</p>  <p>Drs. I Mado Bagus Gerametta, Apt.</p>
---	---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
BBPOM DI SURABAYA**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
RENJA 2018 (OTK Lama)			
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	4507
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	83
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	24
4	Meningkatnya hasil tindakan lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	21
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	83
6	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	0
7	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	Jumlah layanan publik BBPOM	10000
		Jumlah komunitas yang dibentangkan	44
PETA STRATEGI (OTK Baru)			
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Jawa Timur	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	70
		Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Jawa Timur	93,5
		Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Jawa Timur	83
		Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Jawa Timur	92
		Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Jawa Timur	82
		Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Jawa Timur	89,8
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	60
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	60

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Jawa Timur	Persentase penurunan pengujian sesuai standar di Provinsi Jawa Timur	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	80
		Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	75
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Jawa Timur	82
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	38,1
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	90
6	Terwujudnya RB BBPOM di Surabaya sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	Nilai AKIP BBPOM di Surabaya	78

Program Pengawasan Obat dan Makanan
Kegiatan
1. Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Anggaran
Rp. 81.356.766.000,-
Rp. 81.356.766.000,-

Pihak Ketua

Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P.

Jakarta, 21 September 2018
Pihak Pertama

Dr. I Made Bagus Gerametta, Apt.

**RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA**

No	Sebaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	TARGET				
				est. 913	est. 961	est. 991	est. 912	est. 912
REKOR 2018 (OTK LAMA)								
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	4507	458	1755	3304	4507	
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	63	13,5	29,2	47,6	63	
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	34	6	11,5	17	34	
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidik terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	21	2	8	10	21	
5	Pengadaan Sarana dan Peralatan yang terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana dan peralatan sesuai standar	63	82,6	82,6	82,6	63	
6	Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaksanakan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang diselesaikan tepat waktu	9	5	7	8	9	
7	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	Jumlah layanan publik BB-POM Jumlah komunikasi yang diberdayakan	18000 44	4232 -	8669 -	13408 37	18000 44	
PETA STRATEGI (OTK Baru)								
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Jawa Timur	1	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM	70	-	-	-	70
		2	Persentase Obat yang memenuhi syarat di Provinsi Jawa Timur	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5
		3	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat di Provinsi Jawa Timur	63	63	63	63	63
		4	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat di Provinsi Jawa Timur	92	92	92	92	92
		5	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat di Provinsi Jawa Timur	82	82	82	82	82
		6	Persentase Makanan yang memenuhi syarat di Provinsi Jawa Timur	89,6	89,6	89,6	89,6	89,6
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM Surabaya	1	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang obat dan makanan di wilayah kerja BBPOM Surabaya	60	-	-	-	60
		2	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM Surabaya	60	-	-	-	60
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Jawa Timur	1	Persentase pemenuhan penguji sesuai standar di Provinsi Jawa Timur	100	100	100	100	100
		2	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM	60	60	60	60	60
		3	Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM Surabaya	75	75	75	75	75
		4	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BBPOM	62	62	62	62	62
		5	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja	36,1	36,1	36,1	36,1	36,1
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM Surabaya	1	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM Surabaya	50	50	50	50	50

No	Sesuai Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	TARGET			
				sd. D1	sd. D2	sd. D3	sd. D12
6	Terwujudnya Reformasi Birokrasi BBPOM di Surabaya sesuai dengan road map Reformasi Birokrasi BPPM 2015-2019	1 Nilai AKIP BBPOM di Surabaya	75	-	-	-	75

Pihak Kedua

 Dir. Perry K. Lukito, M.C.P.


 Jakarta, 21 September 2018
 Pihak Pertama

 Dir. Mado Hagus, Geraneta, Apt.

**RENCANA KINERJA TAHUN 2018
BBPOM DI SURABAYA**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
RENJA 2018 (OTK Lama)			
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	4507
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	63
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	24
4	Meningkatnya hasil tindaklanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	21
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	83
6	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	9
7	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	Jumlah layanan publik BB/BPOM	18000
		Jumlah komunitas yang diberdayakan	44
PETA STRATEGI (OTK Baru)			
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Jawa Timur	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	70
		Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Jawa Timur	93,5
		Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Jawa Timur	83
		Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Jawa Timur	92
		Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Jawa Timur	82
		Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Jawa Timur	89,6
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	60

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	60
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Jawa Timur	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Jawa Timur	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	60
		Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	75
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Jawa Timur	82
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	36,1
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	50
6	Terwujudnya RB BBPOM di Surabaya sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019	Nilai AKIP BBPOM di Surabaya	78

3. PENGUKURAN KINERJA

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018 BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
RENJA 2018 (OTK Lama)					
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	4507	4516	100.20
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	63	63	100
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	24	24.19	100.81
4	Meningkatnya hasil tindaklanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	21	22	104.76
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	83	83.85	101.02
6	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	9	10	111.11
7	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	Jumlah layanan publik BB/BPOM	18000	18128	100.71
		Jumlah komunitas yang diberdayakan	44	44	100.00
PETA STRATEGI (OTK Baru)					
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Jawa Timur	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	70	64.2	91.71
		Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi Jawa Timur	93.5	91.93	98.32
		Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi Jawa Timur	83	91.63	110.40
		Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi Jawa Timur	92	98.84	107.43

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
		Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Jawa Timur	82	100.00	121.95
		Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi Jawa Timur	89.6	92.15	102.84
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	60	75.5	125.83
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	60	76.68	127.80
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Jawa Timur	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi Jawa Timur	100	100	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	60	60.19	100.32
		Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	75	75.12	100.16
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Jawa Timur	82	90.75	110.67
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	36.1	37.78	104.65
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	50	60.47	120.93
6	Terwujudnya RB BBPOM di Surabaya sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	Nilai AKIP BBPOM di Surabaya	78	77.91	99.88

4. PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2018 BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA

NO	SASARAN KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Jawa Timur	Pengujian Laboratorium Sampel Obat dan Makanan	Input : Dana	Rp	11.436.426.000	11.176.349.324	97,73
			Output : Jumlah sample yang diperiksa	sampel	4507	4516	100,20
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	Audit sarana dalam rangka Sertifikasi, Labelisasi Halal, dan Surveilans	Input : Dana	Rp	645.089.000	592.778.650	91,89
			Output : Jumlah sarana yang diaudit dan dibina	sarana	525	525	100,00
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	Layanan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	Input : Dana	Rp	7.418.967.000	7.108.415.084	95,81
			Output : Jumlah layanan publik BBPOM	layanan	18000	18128	100,71
		Komunitas yang diberdayakan	Input : Dana	Rp	1.558.192.000	1.315.715.820	84,44
			Output : Jumlah komunitas yang diberdayakan	komunitas	44	44	100,00
		Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	Input : Dana	Rp	3.668.511.000	3.569.735.529	97,31
			Output : Jumlah sekolah yang diintervensi	sekolah	1319	1382	104,78
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di	Dukungan Teknis dan Manajemen Laboratorium	Input : Dana	Rp	2.475.247.000	2.351.947.024	95,02
			Output : Jumlah dokumen	dokumen	12	12	100,00
		Pengawasan Sarana Produksi Obat, Obat	Input : Dana	Rp	806.084.000	748.882.166	92,90

NO	SASARAN KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
	Provinsi Jawa Timur	Tradisional, Kosmetika, NAPZA, Prekursor, Makanan dan Bahan Berbahaya	Output : Jumlah sarana produksi obat dan makanan yang diperiksa	sarana	618	618	100,00
		Pengawasan Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetika, NAPZA, Prekursor, Makanan dan Bahan Berbahaya	Input : Dana	Rp	1.504.683.000	1.378.200.886	91,59
			Output : Jumlah sarana distribusi obat dan makanan yang diperiksa	sarana	1488	1500	100,81
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	Penyidikan obat dan makanan	Input : Dana	Rp	2.013.038.000	1.875.210.910	93,15
			Output : Jumlah perkara di bidang obat dan makanan	perkara	21	22	104,76
6	Terwujudnya RB BBPOM di Surabaya sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Input : Dana	Rp	8.430.431.000	6.236.106.194	73,97
			Output : Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	dokumen	9	10	111,11
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kerja	Input : Dana	Rp	1.569.983.000	1.508.836.248	96,11
			Output : Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan	sarana	1	1	100,00

5. PENGUKURAN TINGKAT EFISIENSI KINERJA

PENGUKURAN TINGKAT EFISIENSI KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA TAHUN 2018

NO	SASARAN KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	RATA-RATA % CAPAIAN TARGET		IE	SE	KATEGORI	TE
			INPUT	OUTPUT				
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi Jawa Timur	Pengujian Laboratorium Sampel Obat dan Makanan	97,73	100,20	1,03	1	EFISIEN	0,03
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	Audit sarana dalam rangka Sertifikasi, Labelisasi Halal, dan Surveilans	91,89	100,00	1,09	1	EFISIEN	0,09
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Surabaya	Layanan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	95,81	100,71	1,05	1	EFISIEN	0,05
		Komunitas yang diberdayakan	84,44	100,00	1,18	1	EFISIEN	0,18
		Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	97,31	104,78	1,08	1	EFISIEN	0,08
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi Jawa Timur	Dukungan Teknis dan Manajemen Laboratorium	95,02	100,00	1,05	1	EFISIEN	0,05
		Pengawasan Sarana Produksi Obat, Obat Tradisional, Kosmetika, NAPZA, Prekursor, Makanan dan Bahan Berbahaya	92,90	100,00	1,08	1	EFISIEN	0,08
		Pengawasan Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetika, NAPZA, Prekursor, Makanan dan Bahan Berbahaya	91,59	100,81	1,10	1	EFISIEN	0,10
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja	Penyidikan obat dan makanan	93,15	104,76	1,12	1	EFISIEN	0,12

NO	SASARAN KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	RATA-RATA % CAPAIAN TARGET		IE	SE	KATEGORI	TE
			INPUT	OUTPUT				
	BBPOM di Surabaya							
6	Terwujudnya RB BBPOM di Surabaya sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	73,97	111	1,50	1	EFISIEN	0,50
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kerja	96,11	100,00	1,04	1	EFISIEN	0,04

**LAMPIRAN 2
REKAPITULASI HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGUJIAN LABORATORIUM**

**REKAPITULASI HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
BALAI BESAR POM DI SURABAYA
PERIODE 2018**

Ket :

1. Pada kolom uraian TMS agar dirinci per parameter uji sesuai jumlah TMS Mutu, Contoh : OT mengandung BKO (14 sampel), OT TMS mutu lainnya (20 sampel) , dst
2. Jumlah target sampel tidak termasuk sisa sampel tahun lalu (hanya sampel yang dibeli dari DIPA tahun yang bersangkutan)
3. Uraian TMS untuk sampel OT, Kosmetik, dan Pangan tidak hanya terbatas pada sampel OT yang mengandung BKO, sampel kosmetik yang mengandung Bahan Berbahaya, dan pangan mengandung bahan berbahaya, tapi juga TMS yang lain

PENGUJIAN LABORATORIUM

Komoditi	Uraian	Bulan												
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
Obat & Rokok	Jumlah Target Sampel Dari DIPA	863	863	863	863	863	863	863	863	863	863	863	863	
	Jumlah Sampel Total	60	150	245	327	397	464	514	606	648	758	828	867	
	Jumlah Sampel Selesai Uji	12	60	170	245	320	369	426	484	521	601	680	868	
	MS	MS	12	59	168	242	317	366	420	476	511	591	667	851
		TMS	-	1	2	3	3	3	6	8	10	10	13	17
	Uraian TMS	TMS mutu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TMS label	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TMS mutu + label		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kosmetik	Jumlah Target Sampel Dari DIPA	1.376	1.376	1.376	1.376	1.376	1.376	1.376	1.376	1.376	1.376	1.376	1.376	
	Jumlah Sampel Total	46	207	366	541	661	786	916	1.029	1.079	1.280	1.348	1.376	
	Jumlah Sampel Selesai Uji	4	94	216	370	542	616	776	905	979	1.113	1.244	1.376	
	MS	MS	4	94	215	367	538	610	770	899	973	1.106	1.237	1.356
		TMS	-	-	1	3	4	6	6	6	6	7	7	20

Komoditi	Uraian		Bulan											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
	Uraian TMS	TMS mutu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TMS label	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TMS mutu + label	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obat Tradisional	Jumlah Target Sampel Dari DIPA		688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	
	Jumlah Sampel Total		34	119	214	303	375	423	489	547	596	652	677	688
	Jumlah Sampel Selesai Uji		-	42	136	214	303	367	427	489	550	635	648	688
	Hasil Pengujian	MS	-	42	136	213	302	366	424	481	542	626	637	677
		TMS	-	-	-	1	1	1	3	8	8	9	11	11
	Hasil Pengujian	Mengandung BKO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TMS mutu lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TMS label	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TMS mutu + label	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Suplemen Makanan	Jumlah Target Sampel Dari DIPA		230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Jumlah Sampel Total		-	39	57	76	101	128	140	169	185	210	220	230	
Jumlah Sampel Selesai Uji		-	11	40	57	76	101	128	140	164	169	184	230	
Hasil Pengujian		MS	-	11	40	57	76	101	128	140	164	169	184	230
		TMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hasil Pengujian		TMS mutu lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TMS label	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TMS mutu + label	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Panga	Jumlah Target Sampel Dari DIPA		1.325	1.325	1.325	1.325	1.325	1.325	1.325	1.325	1.325	1.325	1.325	

Komoditi	Uraian	Bulan												
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
	Jumlah Sampel Total	-	78	258	306	457	613	687	708	825	995	1.109	1.178	
	Jumlah Sampel Selesai Uji	-	-	138	257	306	449	545	684	697	824	1.000	1.178	
PJJAS	MS	-	-	138	235	283	423	511	645	658	768	929	1.099	
		TMS	-	-	-	22	23	26	34	39	39	56	71	79
	Hasil Pengujian Uraian TMS	Mengandung bahan berbahaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Mengandung Rhodamin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Mengandung Formalin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Mengandung Metanil Yellow	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Mengandung boraks	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TMS mutu lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TMS label	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TMS mutu + label	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Target Sampel Dari DIPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jumlah Sampel Total	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	
Jumlah Sampel Selesai Uji	-	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	
MS	-	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
	TMS	-	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
Hasil Pengujian Uraian TMS	Mengandung bahan berbahaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Komoditi	Uraian	Bulan											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Garam	Mengandung Rhodamin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mengandung Rhodamin dan TMS MPN Coli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mengandung Rhodamin, TMS ALT dan MPN Coli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mengandung Formalin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mengandung Metani I Yellow	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mengandung boraks	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mengandung Boraks dan Formalin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TMS mutu lainnya	-	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	TMS label	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TMS mutu + label	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Target Sampel Dari DIPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jumlah Sampel Total	-	-	-	-	-	-	-	-	132	150	150	150	150

Komoditi	Uraian	Bulan													
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember		
	Jumlah Sampel Selesai Uji	-	-	-	-	-	-	-	-	150	150	150	150		
	Hasil Pengujian	MS	-	-	-	-	-	-	-	-	131	131	131	131	
		TMS	-	-	-	-	-	-	-	-	19	19	19	19	
		Uraian TMS	TMS mutu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			TMS label	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			TMS mutu + label	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bahan Berbahaya	Jumlah Target Sampel Dari DIPA	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25		
	Jumlah Sampel Total	-	-	-	-	3	3	3	3	3	3	3	3		
	Jumlah Sampel Selesai Uji	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	3	3		
	Hasil Pengujian	MS	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	3	3	
		TMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Uraian TMS	Mengandung bahan berbahaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Mengandung Rhodamin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Mengandung Formalin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Migrasi Formalin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Mengandung Metani I Yellow	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Mengandung boraks	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		TMS mutu lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Komoditi	Uraian	Bulan														
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember			
	TMS label	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	TMS mutu + label	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Laboratorium Keliling	Jumlah Target Sampel Dari DIPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Jumlah Sampel Total	-	107	152	276	414	661	798	798	893	1.290	1.330	1.479			
	Jumlah Sampel Selesai Uji	-	107	152	276	414	661	798	798	893	1.290	1.330	1.479			
	Hasil Pengujian	MS	-	96	141	254	379	597	718	718	806	1.195	1.235	1.380		
		TMS	-	11	11	22	35	64	80	80	87	95	95	99		
		Uraian TMS	Mengandung bahan berbahaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Mengandung Rhodamin	-	-	-	5	8	12	14	14	17	18	18	19	
			Mengandung Formalin	-	3	3	3	7	14	21	21	21	25	25	26	
			Mengandung Metanil Yellow	-	-	-	-	-	3	3	3	3	3	3	3	
			Mengandung boraks	-	8	8	14	20	35	42	42	46	49	49	51	
			TMS mutu lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			TMS label	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			TMS mutu + label	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Total	Jumlah Target Sampel Dari DIPA	4.507	4.507	4.507	4.507	4.507	4.507	4.507	4.507	4.507	4.507	4.507	4.507
				Jumlah Sampel Total	156	609	1.156	1.569	2.010	2.433	2.765	3.210	3.502	4.064	4.351	4.508
Jumlah Sampel Selesai Uji	16	223		716	1.159	1.563	1.918	2.318	2.719	3.080	3.511	3.925	4.509			

Komoditi	Uraian	Bulan											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Hasil Pengujian Uraian TMS	MS	16	217	708	1.125	1.527	1.877	2.264	2.653	2.993	3.405	3.799	4.358
	TMS	-	6	8	34	36	41	54	66	87	106	126	151
	TMS Mutu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pangan mengandung bahan berbahaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pangan mengandung Rhodamin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mengandung Rhodamin dan TMS MPN Coli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pangan mengandung Formalin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pangan mengandung Metanil Yellow	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pangan mengandung boraks	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mengandung Boraks dan Formalin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Komoditi	Uraian	Bulan											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
	TMS mutu lainnya	-	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	Mengandung BKO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TMS label	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TMS mutu + label	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

LAMPIRAN 3
REKAPITULASI HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGAWASAN IKLAN DAN LABEL / PENANDAAN
BALAI BESAR PERNGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA
PERIODE : TAHUN 2018

Komoditi	Jumlah Iklan dan Label Yang Diawasi		Jumlah Per Bulan											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
OBAT	Iklan	MK	0	3	4	0	1	8	15	9	8	9	1	13
		TMK	1	9	8	7	9	3	12	11	9	18	4	1
	Label	MK	59	87	91	75	65	55	45	80	42	69	18	128
		TMK	1	3	4	6	5	8	5	12	-	9	0	-
PKRT	Iklan	MK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TMK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Label	MK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		TMK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O. TRAD	Iklan	MK	2	11	12	20	20	22	24	29	22	17	3	13
		TMK	0	29	43	6	11	38	78	68	56	67	17	16
	Label	MK	42	76	91	73	56	46	50	60	48	30	20	72
		TMK	0	1	2	9	7	2	4	-	7	10	0	0
SUPLEMEN MAKANAN	Iklan	MK	1	3	4	13	16	12	8	30	24	10	8	10
		TMK	0	9	8	10	15	1	12	40	14	25	6	3
	Label	MK	19	20	11	12	13	14	9	23	16	9	10	74
		TMK	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
KOSMETIK	Iklan	MK	56	58	85	114	109	120	97	104	91	7	11	17

Komoditi	Jumlah Iklan dan Label Yang Diawasi		Jumlah Per Bulan											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
				TMK	0	8	8	0	8	13	5	6	4	41
	Label	MK	60	125	168	120	189	75	71	88	92	99	15	194
		TMK	0	14	5	16	7	6	5	16	5	1	5	0
PANGAN	Iklan	MK	0	6	6	3	5	5	22	13	3	9	3	3
		TMK	0	8	1	4	1	1	7	6	2	2	2	1
	Label	MK	0	99	60	54	162	63	56	162	83	46	112	18
		TMK	15	27	70	14	45	6	25	80	48	20	43	-
ROKOK	Iklan	MK	0	44	40	24	31	48	65	51	46	28	13	14
		TMK	1	4	1	8	9	1	29	16	6	43	40	1
	Label	MK	4	2	-	14	-	-	-	1	-	-	0	-
		TMK	20	12	15	0	15	16	15	15	15	16	27	26

LAMPIRAN 4
MONITORING EVALUASI SURAT KETERANGAN IMPOR
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA
TAHUN 2018

No	Nama Komoditi		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	ANALISIS LABORATORIUM	Jumlah SKI bulan ini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		Jumlah Item Bulan ini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		Jumlah Kumulatif SKI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
		Jumlah Kumulatif Item	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
2	BAHAN BAKU KOSMETIK	Jumlah SKI bulan ini	1	18	44	33	43	9	40	3	24	16	40	23
		Jumlah Item Bulan ini	1	239	174	240	242	168	284	23	451	234	130	229
		Jumlah Kumulatif SKI	1	19	63	96	139	148	188	191	215	231	271	294
		Jumlah Kumulatif Item	1	240	414	654	896	1.064	1.348	1.371	1.822	2.056	2.186	2.415
3	BAHAN BAKU PEMBANDING	Jumlah SKI bulan ini	-	1	-	2	1	-	1	3	4	2	-	2
		Jumlah Item Bulan ini	-	2	-	2	1	-	1	3	7	3	-	5
		Jumlah Kumulatif SKI	-	1	1	3	4	4	5	8	12	14	14	16
		Jumlah Kumulatif Item	-	2	2	4	5	5	6	9	16	19	19	24
4	BAHAN KIMIA	Jumlah SKI bulan ini	50	13	23	20	30	17	34	16	18	16	22	10
		Jumlah Item Bulan ini	84	16	29	24	35	18	36	21	18	17	24	11
		Jumlah Kumulatif SKI	50	63	86	106	136	153	187	203	221	237	259	269
		Jumlah Kumulatif Item	84	100	129	153	188	206	242	263	281	298	322	333
5	BAHAN KIMIA HS CODE KOS	Jumlah SKI bulan ini	-	-	-	-	-	-	4	7	3	4	3	3
		Jumlah Item Bulan ini	-	-	-	-	-	-	4	19	3	4	5	4
		Jumlah Kumulatif SKI	-	-	-	-	-	-	4	11	14	18	21	24
		Jumlah Kumulatif Item	-	-	-	-	-	-	4	23	26	30	35	39
6	BAHAN KIMIA HS CODE OTSK	Jumlah SKI bulan ini	32	35	39	27	27	16	28	21	19	16	17	14
		Jumlah Item Bulan ini	39	43	44	52	42	26	34	23	23	19	21	14
		Jumlah Kumulatif SKI	32	67	106	133	160	176	204	225	244	260	277	291
		Jumlah Kumulatif Item	39	82	126	178	220	246	280	303	326	345	366	380

No	Nama Komoditi		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
7	BAHAN NON PANGAN	Jumlah SKI bulan ini	122	22	13	3	14	5	14	17	3	15	12	7
		Jumlah Item Bulan ini	224	35	20	4	18	9	23	21	6	17	18	10
		Jumlah Kumulatif SKI	122	144	157	160	174	179	193	210	213	228	240	247
		Jumlah Kumulatif Item	224	259	279	283	301	310	333	354	360	377	395	405
8	BAHAN OBAT	Jumlah SKI bulan ini	35	34	51	31	46	15	39	37	24	31	32	19
		Jumlah Item Bulan ini	55	47	64	45	61	21	57	61	33	46	44	19
		Jumlah Kumulatif SKI	35	69	120	151	197	212	251	288	312	343	375	394
		Jumlah Kumulatif Item	55	102	166	211	272	293	350	411	444	490	534	553
9	BAHAN OBAT TRADISIONAL	Jumlah SKI bulan ini	4	3	6	1	4	-	3	3	3	5	8	2
		Jumlah Item Bulan ini	5	5	9	1	4	-	4	4	4	5	9	2
		Jumlah Kumulatif SKI	4	7	13	14	18	18	21	24	27	32	40	42
		Jumlah Kumulatif Item	5	10	19	20	24	24	28	32	36	41	50	52
10	BAHAN PANGAN	Jumlah SKI bulan ini	346	322	312	382	356	217	368	391	340	378	384	267
		Jumlah Item Bulan ini	577	465	432	603	523	322	544	640	568	544	539	385
		Jumlah Kumulatif SKI	346	668	980	1.362	1.718	1.935	2.303	2.694	3.034	3.412	3.796	4.063
		Jumlah Kumulatif Item	577	1.042	1.474	2.077	2.600	2.922	3.466	4.106	4.674	5.218	5.757	6.142
11	BAHAN SUPLEMEN KESEHATAN	Jumlah SKI bulan ini	3	2	1	2	3	-	1	-	3	2	1	-
		Jumlah Item Bulan ini	3	2	1	2	4	-	1	-	4	2	1	-
		Jumlah Kumulatif SKI	3	5	6	8	11	11	12	12	15	17	18	18
		Jumlah Kumulatif Item	3	5	6	8	12	12	13	13	17	19	20	20
12	BAHAN TAMBAHAN OBAT	Jumlah SKI bulan ini	1	1	2	1	-	3	2	3	-	2	1	1
		Jumlah Item Bulan ini	1	3	2	1	-	3	2	3	-	2	1	1
		Jumlah Kumulatif SKI	1	2	4	5	5	8	10	13	13	15	16	17
		Jumlah Kumulatif Item	1	4	6	7	7	10	12	15	15	17	18	19
13	BAHAN TAMBAHAN PANGAN	Jumlah SKI bulan ini	65	58	54	65	60	38	74	65	62	73	68	50
		Jumlah Item Bulan ini	112	68	86	77	75	47	98	84	85	98	83	69
		Jumlah Kumulatif SKI	65	123	177	242	302	340	414	479	541	614	682	732

No	Nama Komoditi	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
	Jumlah Kumulatif Item	112	180	266	343	418	465	563	647	732	830	913	982	
14	KOSMETIK A	Jumlah SKI bulan ini	60	40	39	36	78	17	62	57	35	52	46	48
		Jumlah Item Bulan ini	577	328	474	297	727	144	464	399	204	525	398	410
		Jumlah Kumulatif SKI	60	100	139	175	253	270	332	389	424	476	522	570
		Jumlah Kumulatif Item	577	905	1.379	1.676	2.403	2.547	3.011	3.410	3.614	4.139	4.537	4.947
15	OBAT	Jumlah SKI bulan ini	20	25	28	23	17	17	33	21	21	30	20	15
		Jumlah Item Bulan ini	34	33	41	37	29	32	45	32	36	49	30	26
		Jumlah Kumulatif SKI	20	45	73	96	113	130	163	184	205	235	255	270
		Jumlah Kumulatif Item	34	67	108	145	174	206	251	283	319	368	398	424
16	OBAT KUASI	Jumlah SKI bulan ini	1	3	1	4	1	-	2	1	2	1	1	1
		Jumlah Item Bulan ini	1	5	1	4	2	-	4	1	3	2	2	1
		Jumlah Kumulatif SKI	1	4	5	9	10	10	12	13	15	16	17	18
		Jumlah Kumulatif Item	1	6	7	11	13	13	17	18	21	23	25	26
17	OBAT TRADISIONAL	Jumlah SKI bulan ini	1	-	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-
		Jumlah Item Bulan ini	1	-	1	-	6	-	-	12	-	-	-	-
		Jumlah Kumulatif SKI	1	1	2	2	3	3	3	5	5	5	5	5
		Jumlah Kumulatif Item	1	1	2	2	8	8	8	20	20	20	20	20
18	PRODUK PANGAN	Jumlah SKI bulan ini	157	109	140	177	155	112	177	188	119	203	180	165
		Jumlah Item Bulan ini	580	268	390	459	471	217	481	508	322	567	609	499
		Jumlah Kumulatif SKI	157	266	406	583	738	850	1.027	1.215	1.334	1.537	1.717	1.882
		Jumlah Kumulatif Item	580	848	1.238	1.697	2.168	2.385	2.866	3.374	3.696	4.263	4.872	5.371
19	SUPLEMEN KESEHATAN	Jumlah SKI bulan ini	8	7	11	7	8	5	12	7	4	11	10	4
		Jumlah Item Bulan ini	11	7	12	7	8	5	12	7	4	12	10	4
		Jumlah Kumulatif SKI	8	15	26	33	41	46	58	65	69	80	90	94
		Jumlah Kumulatif Item	11	18	30	37	45	50	62	69	73	85	95	99
20	VAKSIN	Jumlah SKI bulan ini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah Item Bulan ini	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Nama Komoditi	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
	Jumlah Kumulatif SKI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Kumulatif Item	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL BULAN INI	Jumlah SKI	906	693	765	814	844	471	894	842	684	858	845	631
	Jumlah Item	2.305	1.566	1.780	1.855	2.248	1.012	2.094	1.861	1.771	2.147	1.919	1.685
TOTAL KUMULATIF	Jumlah SKI	906	1.599	2.364	3.178	4.022	4.493	5.387	5.323	6.913	7.771	8.616	9.247
	Jumlah Item	2.305	3.871	5.651	7.506	9.754	10.766	12.860	14.721	16.492	18.639	20.558	22.243
Jumlah SLA		6,08	5,61	5,80	5,99	6,57	4,01	5,19	5,23	5,20	5,08	5,43	

LAMPIRAN 5
REKAPITULASI HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SURABAYA
PERIODE TAHUN 2018

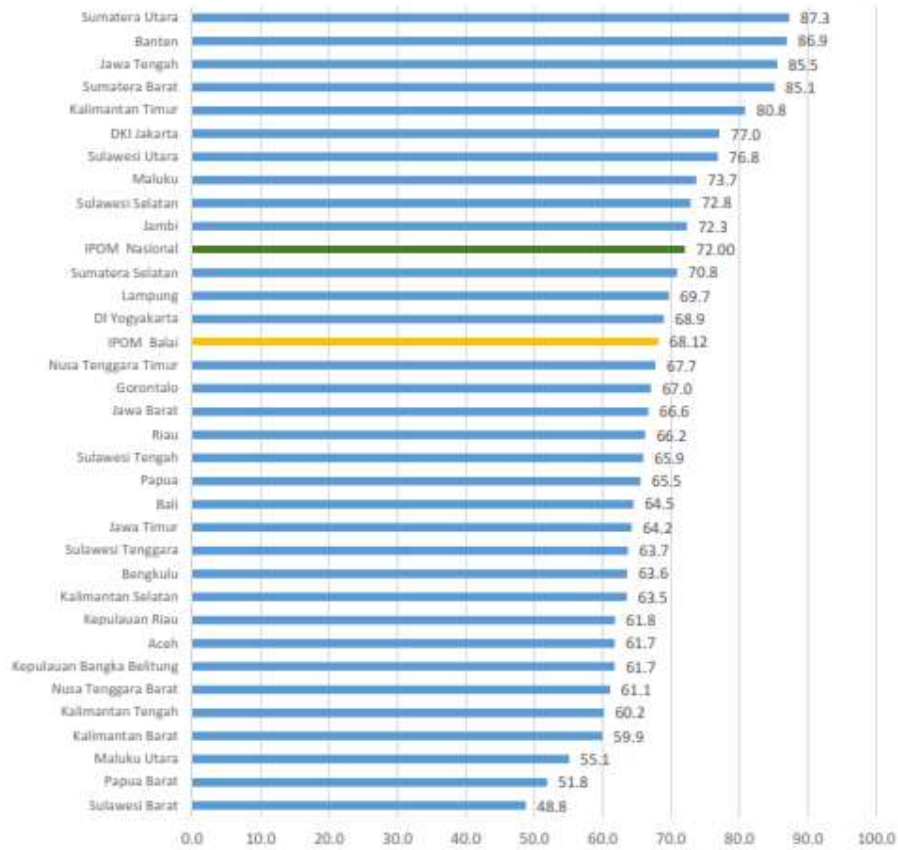
5. 1 LAYANAN INFORMASI

No	Jenis Layanan	Frekuensi/Jumlah											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Talkshow	2	4	8	10	11	12	12	13	13	13	13	13
2	Pameran	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3
3	Penyuluhan :												
	Operasional Lab. Keliling	6	7	19	20	34	36	39	39	45	101	102	102
	Pembinaan KLB	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	10
	Penyebaran Informasi	1	2	2	2	2	2	9	9	9	9	9	10
	KIE	0	0	15	16	18	18	18	22	22	26	27	36
4	Bimtek												
	Bimtek PJAS		0	0	0	0	0	2	10	10	11	11	11
5	Toxico Vigilan	0	7	15	30	30	35	35	35	35	35	35	35
6	Toxico Vigilan												
	Iklan Layanan Masyarakat		0	0	0	0	0	0	1	1	9	11	11
	Billboard	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
	SMS Blast	0	0	0	0	4	19	19	19	32	32	32	32
	Spanduk, brosur, Roll banner	0	0	0	0	0	9	9	9	12	12	12	12
7	Layanan informasi	298	540	792	1062	1289	1402	1692	1942	2108	2233	2371	2611
8	Tindak lanjut pengaduan	2	5	9	12	20	25	34	41	45	53	59	61
9	Sebagai narasumber	5	15	36	55	69	74	95	111	135	155	182	192
	Total	317	585	901	1212	1482	1638	1971	2259	2475	2698	2874	3140

5.2. LAYANAN INFORMASI

Sarana yang digunakan	BULAN											
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
E-mail	0	5	1	3	4	0	3	0	1	0	0	0
Fax	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langsung	227	148	189	175	133	84	178	182	121	90	117	181
Surat	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Telepon	68	78	50	66	57	5	48	35	29	15	21	37
WhatsApp	0	11	12	26	33	24	58	32	15	20	0	0
Medsos	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
JUMLAH	298	242	252	270	227	113	290	250	166	125	138	218

INDEKS POM 2017



Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Skala Provinsi/Balai Tahun 2017

No	Balai Besar/Balai POM	IKPU2017
1	Bandung	83.71
2	DKI Jakarta	81.41
3	Ambon	77.27
4	Banjarmasin	75.67
5	Surabaya	75.50
6	Manado	74.95
7	DI Yogyakarta	72.84
8	Jambi	70.87
9	Pekanbaru	70.72
10	Batam	69.67
11	Padang	69.12
12	Medan	68.46
13	Kupang	68.11
14	Samarinda	67.72
15	Semarang	66.08
IKPU Nasional		65.25
16	Denpasar	62.92
17	Kendari	60.62
18	Bengkulu	59.69
19	Makassar	59.23
20	Banda Aceh	59.13
21	Jayapura	59.07
22	Palangkaraya	59.00
23	Palu	58.21
24	Palembang	57.66
25	Pontianak	56.19
26	Serang	53.24
27	Bandar Lampung	50.67
28	Mataram	49.73
29	Sofifi	46.21
30	Pangkal Pinang	38.08
31	Gorontalo	35.12
32	Manokwari	30.66
33	Mamuju	25.76

Keterangan :

Baik : >66,67 – 100

Cukup : >33,33 – 66,67

Kurang : 0 – 33,33

LAMPIRAN 2
INDEKS PENGETAHUAN OBAT DAN MAKANAN BERDASARKAN PROVINSI TAHUN 2018
BASIS: SELURUH RESPONDEN (N=1.200)

No.	Provinsi	Indeks Pengetahuan	Komoditas				
			Obat	Obat Tradisional	Kosmetik	Suplemen	Pangan
1.	Gorontalo	81,97	75,45	78,67	83,62	98,00	90,13
2.	Jawa Tengah	77,30	82,74	72,08	66,27	75,93	77,55
3.	Jawa Timur	76,68	71,44	87,64	68,09	82,45	87,43
4.	Bali	75,99	86,33	71,47	60,02	69,80	67,96
5.	Bengkulu	74,07	68,61	68,63	78,95	79,97	89,29
6.	Kalimantan Barat	72,86	74,76	75,93	69,28	67,77	72,25
7.	Jambi	71,77	75,35	70,67	66,18	64,53	74,88
8.	Jawa Barat	71,01	75,18	75,13	62,47	66,73	65,22
9.	Sumatera Selatan	69,26	65,41	76,53	61,57	76,90	75,67
10.	Sulawesi Tenggara	66,94	73,23	64,73	50,69	74,57	55,33
11.	Sulawesi Utara	66,66	73,43	52,33	58,04	74,77	58,17
12.	Banten	66,49	66,80	65,11	60,58	72,42	66,92
13.	Lampung	66,40	65,02	67,23	67,32	65,83	70,46
14.	DI Yogyakarta	65,92	71,11	55,07	58,93	57,80	77,63
15.	Kep Riau	65,73	69,43	66,53	47,21	62,07	77,67
16.	Nangroe Aceh	65,20	70,26	51,30	61,08	68,93	62,79
17.	Kalimantan Timur	64,60	69,08	52,90	53,58	70,17	68,08
18.	Sulawesi Barat	63,18	69,04	33,93	60,29	74,80	65,38
19.	Sumatera Barat	62,68	67,45	63,47	45,85	65,50	60,17
20.	NTB	62,65	65,60	66,00	55,81	58,57	60,33
21.	Sulawesi Tengah	62,23	69,28	59,23	51,18	64,97	48,17
22.	Kalimantan Utara	60,98	61,29	63,13	69,50	49,60	60,63
23.	Sulawesi Selatan	60,71	55,18	64,33	62,83	65,77	69,38
24.	Kep. Bangka Belitung	59,77	70,99	48,73	37,47	59,07	57,42
25.	Sumatera Utara	59,36	68,43	57,87	41,45	55,60	52,06
26.	DKI Jakarta	57,55	64,28	61,16	44,93	50,80	50,31
27.	Riau	55,89	59,18	55,67	51,46	55,90	48,50
28.	Kalimantan Tengah	55,45	59,91	50,07	44,36	62,57	49,25
29.	Kalimantan Selatan	55,23	58,25	59,60	49,34	49,17	52,67
30.	Papua Barat	53,48	57,05	49,20	47,16	55,20	50,29
31.	NTT	52,61	60,20	48,50	39,13	50,73	46,54
32.	Papua	52,44	59,47	39,80	47,65	46,83	53,17
33.	Maluku	51,82	55,93	55,67	45,89	45,40	46,00
34.	Maluku Utara	48,71	67,08	47,13	31,04	23,97	30,25
TOTAL		63,93	68,65	63,00	56,70	64,75	64,20

SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA)

SKI

No	Nama Komoditi	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sep	Okt	Nov	Des	JUMLAH
TOTAL	Jumlah TMK	164	122	129	121	188	33	111	111	75	74	102	69	1,299
	Jumlah SKI	906	693	765	814	844	471	894	842	684	858	845	631	9,247
	TMK (%)	18.10	17.60	16.86	14.86	22.27	7.01	12.42	13.18	10.96	8.62	12.07	10.94	14.05
Lama SLA Rata-rata (Jam)		6.08	5.61	5.80	5.99	6.57	4.01	5.19	5.23	5.20	5.08	5.43	5.80	

SKE

No	Nama Komoditi	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sep	Okt	Nov	Des	JUMLAH	
1	SKE Manual	% TMK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		TMK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0
		Jumlah SKE	341	284	318	388	470	234	468	477	321	20	-	-	3,321
2	SKE Online	% TMK	-	-	-	-	-	50	0	0	9	-	0.86	0.21	0.85
		TMK	-	-	-	-	-	2	0	0	6	0	4	1	13
		Jumlah SKE	-	-	-	-	-	4	3	13	69	508	463	471	1,531
TOTAL	Jumlah TMK	0	0	0	0	0	2	0	0	6	-	4	1	13	
	Jumlah SKE	341	284	318	388	470	238	471	490	390	528	463	471	4,852	
	TMK (%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.00	0.00	1.54	0.00	0.86	0.21	0.27	

AUDIT

No	Nama Komoditi	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sep	Okt	Nov	Des	JUMLAH
1	OVER TIMELINE HASIL PEMERIKSAAN	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	6
2	AUDIT/PEMERIKSAAN	35	35	30	26	43	17	21	29	15	33	46	40	370

SERTIFIKASI (SKI + SKE + AUDIT)

No	Nama Komoditi	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sep	Okt	Nov	Des	JUMLAH
TOTAL	Jumlah TMK	165	123	130	121	188	35	112	111	81	74	107	71	1,318
	Jumlah SKI + SKE + AUDIT	1282	1012	1113	1228	1357	726	1386	1361	1089	1,419	1,354	1,142	14,469
	TMK (%)	12.87	12.15	11.68	9.85	13.85	4.82	8.08	8.16	7.44	5.21	7.90	6.22	9.11

Lampiran 2

A. Matriks Tindakanlanjutan hasil pengawasan yang dilakukan oleh BPOM (Pusat dan Balai)

No	Tahun	Tindakanlanjutan hasil pengawasan yang dilakukan oleh BPOM*						Jumlah Feedback**					
		Obat	Obat Tradisional	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan	Total	Obat	Obat Tradisional	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan	Total
1	2018	78	110		88	92	368	43	38		28	45	154

Keterangan

- * = Tindakanlanjutan hasil pengawasan yang dilakukan oleh BPOM (Pusat dan Balai), yang meliputi hasil pemeriksaan sarana produksi dan sarana distribusi, hasil pengawasan iklan dan label, hasil pengujian produk, penanganan kasus, pengaduan konsumen
- ** = Feedback berupa laporan dari sarana terhadap tindakanlanjutan yang diterbitkan BPOM

B. Matriks Rekomendasi yang dikeluarkan oleh BPOM (Pusat dan Balai) yang diberikan kepada instansi terkait

No	Tahun	Rekomendasi yang dikeluarkan oleh BPOM yang diberikan kepada instansi terkait*						Jumlah Feedback**					
		Obat	Obat Tradisional	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan	Total	Obat	Obat Tradisional	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan	Total
1	2018	389	15		6	32	442	113	10		4	25	152

Keterangan

- * = Rekomendasi yang dikeluarkan oleh BPOM (Pusat dan Balai) yang diberikan kepada instansi terkait misalnya tindakanlanjutan pencabutan ijin atas pemeriksaan sarana produksi atau sarana distribusi obat, pengujian IRTP, iklan OT dan SK ke KPID, hasil pengawasan promosi atau penjualan Obat dan Makanan ilegal secara online oleh Dit. Pengamanan
- ** = Feedback berupa respon instansi terkait terhadap rekomendasi



HASIL EVALUASI AKIP BALAI

No	Nama Unit	Komponen Evaluasi Tahun 2018											
		Perencanaan Kinerja (30%)		Pengukuran Kinerja (25%)		Pelaporan Kinerja (15%)		Evaluasi Internal (10%)		Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi (20%)		Total Nilai	
		%	Angka	%	Angka	%	Angka	%	Angka	%	Angka	%	Angka
1	Balai Besar POM di Surabaya	90,90%	27,27	70,00%	17,50	79,14%	11,87	68,50%	6,85	72,08%	14,42	77,91%	77,91
2	Balai Besar POM di Bandung	85,79%	25,74	65,00%	16,25	88,93%	13,34	71,42%	7,14	66,67%	13,33	75,80%	75,80
3	Balai Besar POM di Mataram	85,71%	25,71	63,75%	15,94	83,29%	12,49	59,93%	5,99	78,13%	15,63	75,78%	75,76
4	Balai Besar POM di Kupang	90,08%	27,02	67,50%	16,88	80,93%	12,14	66,16%	6,62	63,96%	12,79	75,44%	75,45
5	Balai Besar POM di Palangkaraya	89,13%	26,74	67,50%	16,88	76,14%	11,42	58,27%	5,83	69,79%	13,96	74,82%	74,83
6	Balai Besar POM di Samarinda	89,06%	26,72	67,50%	16,88	83,29%	12,49	61,02%	6,10	62,08%	12,42	74,60%	74,61
7	Balai Besar POM di Bandar Lampung	80,06%	24,02	66,75%	17,19	83,29%	12,49	68,50%	6,85	68,54%	13,71	74,26%	74,26
8	Balai Besar POM di Makassar	85,53%	25,66	60,00%	15,00	86,86%	13,03	70,58%	7,06	65,10%	13,02	73,77%	73,77
9	Balai Besar POM di Medan	85,67%	25,70	67,50%	16,88	74,29%	11,14	60,75%	6,08	69,27%	13,85	73,65%	73,65
10	Balai Besar POM di Yogyakarta	87,59%	26,28	61,25%	15,31	75,79%	11,37	79,33%	7,93	63,44%	12,69	73,58%	73,58
11	Balai POM di Pangkalpinang	84,37%	25,31	66,25%	16,56	74,62%	11,20	65,76%	6,58	69,58%	13,92	73,56%	73,57
12	Balai POM di Bengkulu	82,88%	24,86	65,00%	16,25	70,71%	10,61	67,68%	6,77	73,75%	14,75	73,24%	73,24
13	Balai POM di Ambon	86,02%	25,81	61,25%	15,31	74,29%	11,14	70,35%	7,04	69,58%	13,92	73,21%	73,22
14	Balai Besar POM di Manado	87,06%	26,12	52,50%	13,13	85,07%	12,76	76,83%	7,68	67,19%	13,44	73,12%	73,13
15	Balai POM di Palu	82,58%	24,78	62,50%	15,63	84,50%	12,68	67,00%	6,70	66,67%	13,33	73,11%	73,11
16	Balai POM di Gorontalo	79,59%	23,88	55,00%	13,75	89,18%	13,38	64,77%	6,48	77,50%	15,50	72,98%	72,98

HASIL EVALUASI AKIP BALAI

No	Nama Unit	Komponen Evaluasi Tahun 2018												Total Nilai	
		Perencanaan Kinerja (30%)		Pengukuran Kinerja (25%)		Pelaporan Kinerja (15%)		Evaluasi Internal (10%)		Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi (20%)					
		%	Angka	%	Angka	%	Angka	%	Angka	%	Angka	%	Angka		
17	Balai Besar POM di Jakarta	85,23%	25,57	65,00%	16,25	71,89%	10,78	65,77%	6,58	67,71%	13,54	72,72%	72,72		
18	Balai POM di Batam	82,88%	24,86	62,50%	15,63	78,75%	11,81	62,85%	6,29	70,21%	14,04	72,63%	72,63		
19	Balai Besar POM di Pekanbaru	83,71%	25,11	66,25%	16,56	73,71%	11,06	60,60%	6,06	68,33%	13,67	72,46%	72,46		
20	Balai POM di Serang	86,54%	25,96	58,75%	14,69	75,79%	11,37	79,33%	7,93	61,46%	12,29	72,24%	72,24		
21	Balai POM di Jambi	80,32%	24,10	75,00%	18,75	92,21%	13,83	32,67%	3,27	60,83%	12,17	72,11%	72,11		
22	Balai Besar POM di Pontianak	87,38%	26,21	60,00%	15,00	82,71%	12,41	72,68%	7,27	55,83%	11,17	72,05%	72,06		
23	Balai Besar POM di Semarang	87,51%	25,95	56,25%	14,06	76,71%	11,51	76,43%	7,64	64,38%	12,88	72,34%	72,04		
24	Balai Besar POM di Padang	85,55%	25,66	66,25%	16,56	75,46%	11,32	49,52%	4,95	67,71%	13,54	72,04%	72,03		
25	Balai Besar POM di Banjarmasin	81,89%	24,57	62,50%	15,63	77,57%	11,64	59,93%	5,99	70,20%	14,04	71,86%	71,87		
26	Balai Besar POM di Palembang	85,40%	25,62	60,00%	15,00	82,71%	12,41	47,03%	4,70	70,31%	14,06	71,79%	71,79		
27	Balai Besar POM di Jayapura	82,38%	24,71	63,75%	15,94	74,89%	11,23	67,43%	6,74	63,65%	12,73	71,36%	71,35		
28	Balai POM di Kendari	82,57%	24,77	65,00%	16,25	76,71%	11,51	53,68%	5,37	66,25%	13,25	71,15%	71,15		
29	Balai POM di Manokwari	83,17%	24,95	58,75%	14,69	73,43%	11,01	60,60%	6,06	71,04%	14,21	70,92%	70,92		
30	Balai Besar POM di Denpasar	80,58%	24,17	55,00%	13,75	83,86%	12,58	52,87%	5,29	75,42%	15,08	70,87%	70,87		
31	Balai Besar POM di Banda Aceh	87,77%	26,33	63,75%	15,94	70,36%	10,55	74,35%	7,44	52,31%	10,46	70,72%	70,72		
32	Balai POM di Mamuju	82,01%	24,61	57,50%	14,38	67,50%	10,13	56,18%	5,62	70,31%	14,06	68,78%	68,80		
33	Balai POM di Sofifi	85,23%	25,57	51,25%	12,81	66,43%	9,96	66,18%	6,62	28,33%	5,67	60,63%	60,63		

**Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya**

NO	SASARAN STRATEGIS	KPI		TARGET TAHUN 2018	TARGET				REALISASI			
		URAIAN	SATUAN		sd. B3	sd. B6	sd. B9	sd. B12	sd. B3	sd. B6	sd. B9	sd. B12
1	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	%	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	98.8	99.19	95.97	91.93
		Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	%	83	83	83	83	83	100	100	98.55	91.63
		Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	%	92	92	92	92	92	99.5	99.03	99.39	98.84
		Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	%	82	82	82	82	82	100	100	100	100.0
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	%	83.8	83.8	83.8	83.8	83.8	96.8	95.35	92.72	92.15
2	Meningkatnya kapasitas dan komitmen pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat	nilai	87	-	-	-	87	-	-	-	87.04
		Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	kabupaten/kota	38	38	38	38	38	38	38	38	38
3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	Nilai SAKIP Balai Besar POM di Surabaya dari Badan POM	nilai	78	-	-	-	78	-	-	-	77.91
Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan												
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk Obat dan Makanan yang beredar	Sampel Obat, Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang diuji dengan parameter kritis	sampel	3157	305	1157	2192	3157	562	1453	2214	3166
		Sampel Makanan yang diuji dengan parameter kritis	sampel	1350	153	598	902	1350	154	473	866	1350
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	%	63	13.5	26.2	47.5	63	13.7	26.91	47.71	63
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	cakupan pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, suplemen kesehatan dan Makanan yang diperiksa	%	14.4	3.5	7	10	14.4	2.6	7.79	10.81	14.40
		Pengawasan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian (saryanfar)	%	9.6	2.5	4.5	7	9.6	2.8	4.90	8.6	9.79

NO	SASARAN STRATEGIS	KPI		TARGET TAHUN 2018	TARGET				REALISASI			
		URAIAN	SATUAN		sd. B3	sd. B6	sd. B9	sd. B12	sd. B3	sd. B6	sd. B9	sd. B12
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan	Perkara di bidang obat dan makanan	perkara	21	2	8	15	21	4	9	14	22
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat					23.51	47.61	74.48		24.17	47.41	73.8	100.71
1	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	Layanan publik BBPOM	layanan	18000	4232	8569	13406	18000	4350	8533	13284	18128
		Komunitas yang diberdayakan	komunitas	44	-	-	37	44	29	29	29	44
		Sekolah yang diintervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	sekolah	1319	-	-	-	1319	-	-	-	-
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai Besar POM												
1	Pengadaan sarana dan prasarana yang terkait pengawasan Obat dan Makanan	Sarana prasarana sesuai standar	%	83	82.6	82.6	82.6	83	82.6	82.6	82.6	83.85
2	Penyusunan perencanaan, penganggaran, keuangan dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	dokumen	9	5	7	8	9	5	7	8	10